



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI KAWASAN  
INDUSTRI PT. JABABEKA, Tbk. KABUPATEN BEKASI**

**(Studi Pemberdayaan Ekonomi Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan  
Rengginang dan Telur Asin)**

**TESIS**

**MOHAMAD AZAM**

**0906655742**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KEKHUSUSAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI KAWASAN  
INDUSTRI PT. JABABEKA, Tbk. KABUPATEN BEKASI**

**(Studi Pemberdayaan Ekonomi Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan  
Rengginang dan Telur Asin)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial (M. Kesos)

**MOHAMAD AZAM**

**0906655742**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KEKHUSUSAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan  
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : MOHAMAD AZAM**

**NPM : 0906655742**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 5 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Mohamad Azam  
NPM : 0906655742  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Tesis : PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI KAWASAN INDUSTRI PT. JABABEKA, TBK. KABUPATEN BEKASI (Studi Pemberdayaan Ekonomi Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Rengginang dan Telur Asin)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial pada Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Johanes Sutoyo M.A. (  )

Penguji : Dra. Fentiny Nugroho, Ph.D. (  )

Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si. (  )

Penguji : Arif Wibowo, S.Sos, SS, M.Hum. (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2012

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Judul yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah Program *Corporate Social Responsibility* Di Kawasan Industri PT. Jababeka, Tbk. Kabupaten Bekasi (Studi Pemberdayaan Ekonomi Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Rengging dan Telur Asin), penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mencapai sustainabilitas program.

Tesis ini disusun, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Johanes Sutoyo M.A. yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan secara sabar dan teliti. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Yang tercinta kedua orang tuaku, H. Ali Imron Dasuki (Alm.) dan Hj. Zahro'ul Churiyah, Istriku Dinda Mardalena serta anakku Mohamad Alif Alfath yang telah memberikan bantuan dukungan moral dan material serta senantiasa mendoakan untuk keberhasilanku.
2. Ibu Fentiny Nugroho, Ph.D dan Ibu Dra. Fitriyah, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program ini.
3. Seluruh staf pengajar yang telah memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan seluruh Staf Sekretariat program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial atas dukungan dan kelancaran pelayanan administrasi.
4. Bapak Hasbullah sebagai Kapusdiklat Kesos Kementerian Sosial RI dan Bapak Drs Chatib MA, purna tugas Kapusdiklat Kesos Kementerian Sosial RI yang telah memberikan kesempatan tugas belajar dan memberikan dukungan biaya pendidikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Di Universitas Indonesia serta para staf atas dukungan pelayanan administrasi.

5. Ibu Hartati Solekhah selaku Direktur KKKS, Bapak Suyoto Sujadi dan Bapak Muchsis Malik, purna tugas pejabat Direktur K2KS Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI, yang telah memberikan izin tugas belajar untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Indonesia beserta rekan-rekan semua di jajaran Direktorat KKKS yang telah memberikan dukungan moril.
6. Bapak Setyono Djuandi Darmono (Presiden Direktur) dan Staf PT. Jababeka, Tbk. selaku pemilik dan pelaksana program CSR yang telah menerima dan bekerja sama dalam seluruh kegiatan dengan penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak Bupati Bekasi Bapak Sa'duddin dan Jajaran Kesbang Linmas Kabupaten Bekasi yang telah memberikan ijin penelitian di wilayah Kabupaten Bekasi.
8. Komunitas diskusi Jababeka, Kris Cahyono Pimred Cikarang Pos, dan Imam, atas saran-saran dan pengalamannya, rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, dan rekan diskusi Habibullah, Rahmi Fitriyanti atas kebersamaannya selama ini serta dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan jalan bagi selesainya tesis ini secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis merasa dalam penulisan tesis ini tentunya masih banyak dijumpai kesalahan baik teknis maupun materi dan analisa. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 5 Januari 2012

Penulis,

**MOHAMAD AZAM**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai *civitas academica* Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Azam  
NPM : 0906655742  
Program studi : Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI KAWASAN INDUSTRI  
PT. JABABEKA, TBK. KABUPATEN BEKASI (Studi Pemberdayaan Ekonomi Pada  
Industri Rumah Tangga Pembuatan Rengginang dan Telur Asin)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 5 Januari 2011

Yang menyatakan

  
(Mohamad Azam)

## ABSTRAK

Nama : Mohamad Azam  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul : Program *Corporate Social Responsibility* Di Kawasan Industri PT. Jababeka, Tbk. Kabupaten Bekasi (Studi Pemberdayaan Ekonomi Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Rengginang dan Telur Asin)

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kawasan Industri PT. Jababeka, Tbk. memiliki keunikan, yaitu sebagai sebuah program yang didorong oleh perusahaan pengembang kawasan industri dengan melibatkan tenant industri, dan dalam pelaksanaan telah berusaha menggunakan pendekatan pemberdayaan untuk mencapai sustainabilitas program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Program CSR PT. Jababeka, Tbk. tahun 2009 dan 2010 pada kegiatan pemberdayaan ekonomi industri rumah tangga pembuatan rengginang dan telur asin masih belum optimal, kelompok sasaran masih belum berdaya dan program belum mencapai sustainabilitas, sehingga dalam pelaksanaan program berikutnya diperlukan adanya perbaikan dalam pendekatan pemberdayaan.

Kata kunci:

Program, *Corporate Social Responsibility*, Kawasan Industri, *tenant* industri, Pemberdayaan, Sustainabilitas.

## ABSTRACT

Name : Mohamad Azam  
Program Study : Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Title : Corporate Social Responsibility Programme At Industrial Estate PT. Jababeka, Tbk. Bekasi District (The Study of Economic Empowerments Domestic Industries of Rengginang and Telur Asin Production)

Corporate Social Responsibility (CSR) programme of PT. Jababeka, Tbk. industrial estate is unique, as a programme who initiative by industrial estate corporation colabored with industrial tenant, and in implementation had use empowerment approachs to make a programme sustainable. This study used a qualitative approach to the type of descriptive analitical research.

The result of this study have that the CSR Programme of PT. Jababeka, Tbk. 2009-2010 of economic empowerment activities as industrial domestic economic productions of rengginang and telur asin has not optimal yet, beneficiaries are not empower and programs are not have sustainabilities, as of in next CSR programme implementation are needs correction of empowerment approach to reach the real sustainability.

### Key words:

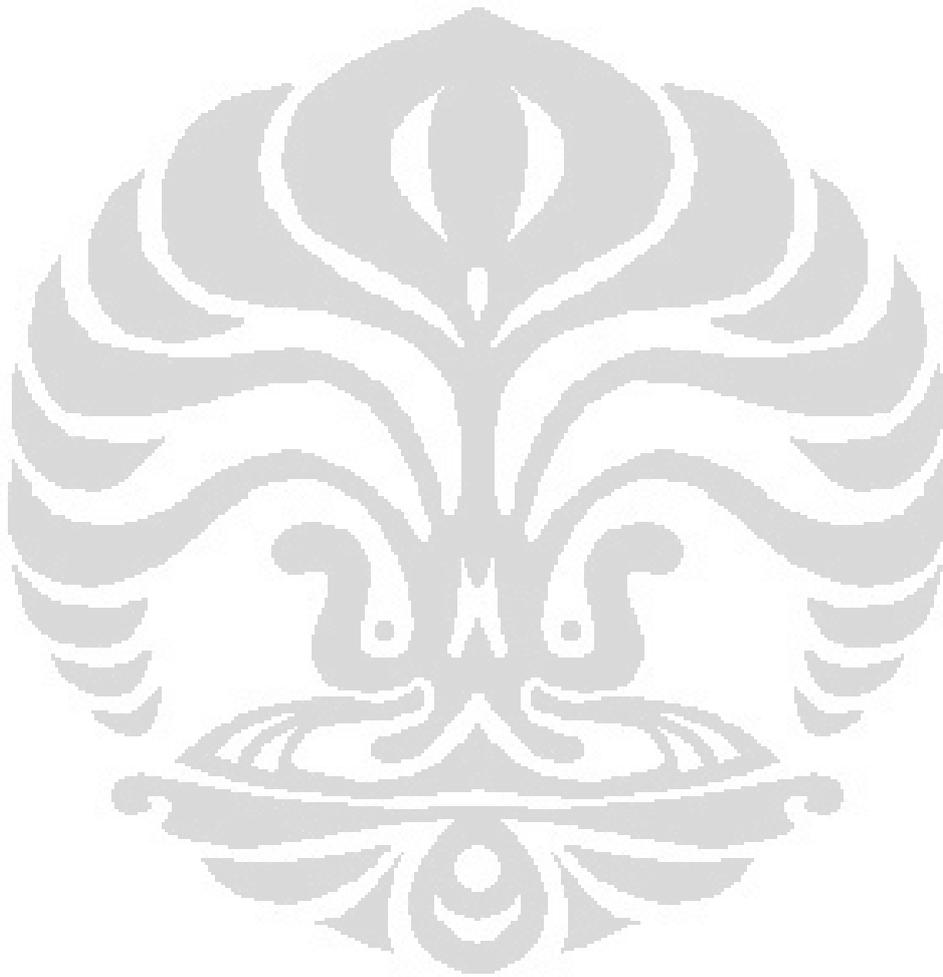
Programme, Corporate Social Responsibility, Industrial Estate, industrial tenant, Empowerment, Sustainability.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1. Manfaat Praktis .....	11
1.4.2. Manfaat Akademik .....	12
1.5. Metodologi Penelitian .....	12
1.5.1. Pendekatan Penelitian .....	12
1.5.2. Jenis Penelitian .....	13
1.5.3. Teknik Pemilihan Informan .....	14
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
1.5.5. Jenis dan Sumber Data .....	17
1.5.6. Teknik Analisa Data .....	17
1.5.7. Lokasi Penelitian .....	18
1.6. Sistematika Penulisan .....	19
<b>2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>21</b>
2.1. Tinjauan Pustaka .....	21
2.1.1. Industri dan Kawasan Industri Sebagai Pilihan Model Pembangunan Ekonomi .....	21
2.1.2. Konsekuensi Pilihan Pembangunan Kawasan Industri	23

2.1.3. Corporate Social Responsibility (CSR) .....	26
2.1.4. CSR Sebagai Model Partisipasi Pembangunan Sosial Oleh Industri .....	31
2.1.5. Sustainable Development dan Pemberdayaan dalam CSR .....	40
2.1.5.1. Konsep Sustainability dan Pemberdayaan .....	40
2.1.5.2. Strategi dan Syarat Pemberdayaan yang Berkelanjutan .....	44
2.1.5.3. Peran-Peran Dalam Pemberdayaan.....	45
2.1.5.4. Kendala-Kendala Dalam Pemberdayaan .....	48
2.2. Kerangka Pikir .....	52
<b>3. KAWASAN INDUSTRI JABABEKA DAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. JABABEKA, TBK .....</b>	<b>53</b>
3.1. Kawasan Industri Jababeka .....	53
3.1.1. Administratif Wilayah .....	53
3.1.2. Deskripsi Kondisi di dalam Kawasan Industri Jababeka .....	54
3.1.3. Fenomena Pertumbuhan Kota Industri.....	56
3.1.4. Deskripsi Kondisi Wilayah di Sekitar kawasan.....	62
3.2. PT. Jababeka Tbk., dan Program Corporate Social Responsibility .....	71
3.2.1. PT. Jababeka, Tbk.....	71
3.2.2. Program CSR PT. Jababeka, Tbk. ....	73
<b>4. TEMUAN LAPANGAN .....</b>	<b>95</b>
4.1. Proses Pemberdayaan Ekonomi Program CSR PT. Jababeka, Tbk. ....	96
4.2. Peran Pendamping dalam Program CSR PT. Jababeka, Tbk.	94
4.3. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Program .....	100
<b>5. ANALISA .....</b>	<b>104</b>
5.1. Analisa Proses Pemberdayaan Ekonomi CSR PT.Jababeka, Tbk. ....	104
5.2. Analisa Peran Pendamping dalam Program CSR PT.Jababeka,Tbk	109
5.3. Analisa Hambatan .....	111

<b>6. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>113</b>
6.1. Kesimpulan .....	113
6.2. Saran .....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	120
DAFTAR LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Proses Produksi dan akibat sampingannya dalam jangka panjang .....	26
Gambar 2.2. Model Stakeholder dari tanggungjawab sosial perusahaan .....	42
Gambar 3.1. Peta Kab. Bekasi perkecamatan, kepadatan jumlah Penduduk .....	53
Gambar 3.2. Aksi Corat Coret Tembok Pabrik.....	58
Gambar 3.3. Salah Satu Bentuk Usaha Yang Berkembang di Kota Jababeka, kuliner.....	59
Gambar 3.4. Kesibukan karyawan di pagi hari, berangkat ke tempat kerja.....	62
Gambar 3.5. Lokasi kawasan industri lain di sekitar kota Jababeka	68
Gambar 3.6. Usaha kontrakan dan masalah sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik.....	69
Gambar 3.7. Bentuk perumahan penduduk yang padat di luar kawasan.....	70
Gambar 3.8. Tumbuhnya daerah kumuh di bantaran sungai kali malang dekat kawasan industri.....	71

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1. Bagan Kerangka Berfikir Penelitian.....	52
Bagan 3.1. Bagan Mata Rantai Perkembangan Ekonomi Supporting Industri di Kota Jababeka.....	60
Bagan 3.2. Bagan Unit Usaha PT.Jababeka, Tbk.....	72
Bagan 3.3. Bagan Struktur Perusahaan PT.Jababeka, Tbk.....	73
Bagan 3.4. Bagan Struktur Organisasi CSR PT.Jababeka, Tbk...	74



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi .....	2
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bekasi .....	5
Tabel 1.3. Tabel Implementasi CSR PT. Jababeka, Tbk. 2006-2010 ....	8
Tabel 1.4. Kegiatan dalam Program CSR Pemberdayaan Ekonomi .....	10
Tabel 1.5. Tabel Informan Berdasarkan Informasi yang Diperlukan ....	14
Tabel 2.1. Tabel Peristiwa Penting yang Mendorong Implementasi CSR .....	37
Tabel 3.1. Tabel Struktur Usia.....	55
Tabel 3.2. Tabel Distribusi Tenaga Kerja.....	55
Tabel 4.1. Rangkuman data temuan .....	102

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian UI
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Kesbangpol
- Lampiran 3 Taksonomi Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara dan Karakteristik informan
- Lampiran 5 Sertifikat Indonesia CSR Award 08 PT. Jababeka Infrastruktur
- Lampiran 6 Peta Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi
- Lampiran 7 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2003-2013
- Lampiran 8 Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan industri di Indonesia terus mengalami perkembangan, dalam upaya untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan adanya kebutuhan meningkatkan daya saing industri dalam persaingan global, membuka kawasan pertumbuhan baru berupa kawasan industri menjadi salah satu pilihan alternatif dalam kebijakan ekonomi nasional.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 tentang kawasan Industri, Pengelolaan kawasan Industri oleh swasta mendapat momentum dalam perkembangannya. Pengembang kawasan industri swasta, segera menyambut peluang ini dengan mempersiapkan infrastruktur dan segala kebutuhan investor akan sebuah wilayah yang kondusif untuk investasi dibidang industri. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Pasca keluarnya peraturan ini, perkembangan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi menunjukkan peningkatan yang agresif.

Seperti dinyatakan oleh HKI dalam release tahun 2011 melalui website resminya *“Today HKI has 59 company members, in 13 provinces, covering total gross area of about +29,000 hectares. There are about +6,000 manufacturing companies operating and employing some +1,500,000 people in the industrial estates.”* (HKI, 2011). *“Hingga kini, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia tahun 2011 melalui website resminya, terdapat jumlah kawasan industri yang menjadi anggota HKI telah mencapai sebanyak 59 perusahaan pengembang kawasan industri yang tersebar di 13 propinsi meliputi wilayah seluas lebih dari 29.000 ha. Di dalamnya terdapat lebih dari 6000 perusahaan manufaktur yang mempekerjakan lebih dari 1.500.000 orang, ”.* (HKI, 2011).

Termasuk di dalamnya terdapat 16 lokasi kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Antara lain : Kawasan Industri Jababeka I, Kawasan Industri Jababeka II, Bekasi Fajar Industrial Estate, Megapolis Manunggal Industrial Estate, LippoCity Development, East Jakarta Industrial Park (EJIP), Hyundai Inti Development,

Rawa Intan, Patria Manunggal jaya, Jatiwangi Utara, Gobel Dharma Nusantara, YKK Indonesia Zipper, Kawasan Dharma Industri, Indo Kargomas Persada, Gerbang Teknologi Cikarang, dan Pura Delta Lestari.

Tabel 1.1. Data Kawasan Industri Di Kabupaten Bekasi

NO	NAMA KAWASAN INDUSTRI	LUAS (Ha)
1	Kawasan Industri Jababeka I	790.0
2	Kawasan Industri Jababeka II	250.0
3	Bekasi Fajar Industrial Estate	700.0
4	Megapolis Manunggal Industrial Estate	760.0
5	LippoCity Development	427.4
6	East Jakarta Industrial Park (EJIP)	320.0
7	Hyundai Inti Development	200.0
8	Rawa Intan	100.0
9	Patria Manunggal jaya	90.0
10	Jatiwangi Utara	20.0
11	Gobel Dharma Nusantara	54.0
12	YKK Indonesia Zipper	20.0
13	Kawasan Dharma Industri	18.0
14	Indo Kargomas Persada	230.0
15	Gerbang Teknologi Cikarang	240.0
16	Pura Delta Lestari	2.000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>6.219.4</b>

Sumber : Disperindag, 2011.

Diantara perusahaan pengembang kawasan industri di Kabupaten Bekasi, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) merupakan salah satu perusahaan pengembang kawasan industri yang terbesar dan agresif melakukan pengembangan wilayahnya.

Data terakhir dari Profile Daerah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, luas kawasan yang dikelola KIJA di Jababeka I dan Jababeka II mencapai 1.570 Ha. Kawasan industri ini berlokasi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Cikarang Selatan dan Kecamatan Cikarang Utara. Hingga tahun 2011, tercatat KIJA sedang melakukan perluasan di Jababeka III yang dibangun di atas lahan seluas 240 hektar yang berdiri di atas tanah tiga desa,

yaitu Desa Tanjung Sari, Desa Simpangan dan Desa Pasir Gombang, semuanya berada di Kecamatan Cikarang Utara. (Perluasan Jababeka III, 2010).

KIJA merupakan Kawasan Industri permulaan di Kabupaten Bekasi yang dikelola oleh pihak swasta, dimulai pada tahun 1989 saat Pemda Propinsi Jawa Barat memberikan izin kepada konsorsium 21 pengusaha untuk mengembangkan sebuah lahan bekas galian bata dan genteng, yang tidak lagi produktif, untuk menjadi kawasan industri. Karena lahan itu terletak di Bekasi, maka kawasan tersebut disebut sebagai Jababeka, singkatan dari Jawa Barat Bekasi, kini pengembangan KIJA mencakup area seluas 5.600 Hektar dengan populasi sekitar 1 juta penduduk. Hingga kini terdapat sebanyak 1.570 perusahaan di kawasan industri ini, seperti Samsung Electronic, ICI, Mattel, KAO, dan Nissin (*Kawasan Industri Jababeka a Transforming City Developer*, (2009).

Lokasi dimana kawasan industri di Kabupaten Bekasi dibangun, bukan merupakan wilayah kosong tanpa penghuni, namun telah ada masyarakat yang pada masa sebelumnya bertumpu pada perekonomian agraris.

Antara masyarakat dan pengembang kawasan industri dan industri di dalamnya bersinggungan dalam beberapa kepentingan, seperti dalam hal penggunaan sumber daya air bersih, pemakaian lahan, udara, dan sarana transportasi, demikian juga dalam kehidupan perekonomian mereka.

Pertumbuhan industri dan permintaan akan lahan kawasan industri Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan, namun disisi lain permasalahan yang melingkupinya juga mengalami peningkatan diantaranya tampak dalam beberapa hasil penelitian yang dilakukan setelah lima tahun pasca berkembangnya kawasan industri (1989). Perkembangan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi, selain memiliki dampak ekonomi yang signifikan, juga memiliki dampak ekologis dan sosial yang tidak dapat diabaikan.

Hasil temuan dalam penelitian R.U. Maruwas Sirait (1994) tentang “Dampak Industri Pada Kualitas Irigasi di Daerah Bekasi” menyimpulkan “meningkatnya kegiatan industri di wilayah tersebut, mengakibatkan keseimbangan air untuk lahan terganggu, Kondisi tersebut mengakibatkan swasembada pangan dan kebutuhan air di wilayah Barat terganggu.” (h.115)

Air merupakan salah satu aset penting bagi masyarakat disekitar kawasan industri, selain untuk kepentingan domestik sehari-hari, juga untuk kepentingan ekonomi utama pada waktu itu yaitu pengairan lahan sawah, menurunnya kualitas hasil pertanian masyarakat berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan mereka.

Hasil penelitian Sopandi (2003). "Pola Adaptasi dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Industri: Studi Kasus di Dusun Sempu Desa Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi". menyatakan : "Perubahan-perubahan guna lahan yang tercermin pada intensitas penggunaan lahan di dusun Sempu Desa Pasir Gombang memberikan dampak langsung terhadap pola adaptasi dan pola hidup serta pekerjaan masyarakat pedesaan, yaitu perubahan pola hidup pedesaan yang agraris (sebagai petani dan usaha lio) menjadi pola hidup perkotaan, seperti : pedagang, buruh, sopir angkutan, pengojek, pengumpul limbah dan sebagainya." (h.125)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran kawasan industri telah mempengaruhi sumber mata pencaharian masyarakat, mata pencaharian merupakan salah satu variabel penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan mereka.

Penelitian Setiawan. (2003). "Identitas Ganda Kabupaten Bekasi : Suatu Transformasi dari Masyarakat Tradisional Menuju Masyarakat Modern." mengemukakan kesimpulan : "...mulailah dilakukan modernisasi di Bekasi yang melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga masuklah investasi dari dalam negeri dan luar negeri ke Kabupaten Bekasi. Terjadilah perubahan mendasar dari desa-desa yang bersifat agraris feodalistik ke masyarakat agraris-kapitalistik,.... jaminan sosial bagi masyarakat miskin, terlantar dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha tidak mendapat porsi yang seimbang sehingga terjadi ketidakseimbangan antara yang bisa menikmati hasil modernisasi dengan mereka yang terpinggirkan, akibatnya muncullah masyarakat kota yang kumuh.... "( h.142)

Penelitian Setiawan ini menegaskan bahwa kehadiran kawasan Industri menjadi salah satu daya tarik kaum urban dan terbentuknya daerah-daerah kumuh di sekitar kawasan industri yang ditempati oleh masyarakat yang terpinggirkan.

Tesis Hariyono (2005). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi. menyimpulkan : “Implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri kurang berhasil mencapai tujuan, ..... perilaku masyarakat di sekitar kawasan industri mengindikasikan tidak adanya dukungan dari masyarakat terhadap kawasan industri, adanya pemaksaan oleh warga sekitar kepada industri di kawasan industri untuk membayar iuran dan retribusi tertentu, ancaman unjuk rasa dan pendudukan pabrik oleh mereka.” (h. 107)

Penelitian Hariyono menunjukkan adanya ketidak pedulian, resistensi dan eksploitasi dari sebagian masyarakat di sekitar kawasan industri, terhadap implementasi pengembangan kawasan industri.

Seiring dengan perkembangan kawasan industri di Kabupaten Bekasi, jumlah penduduk cenderung meningkat tajam dari tahun ke tahun.

Hasil Sementara Sensus Penduduk 2010 di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi berjumlah 2.629.551 atau 2,6 juta jiwa. Laki-laki mencapai 1.345.500 orang dan perempuan di angka 1.284.051 orang.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kab. Bekasi

Tahun	2010	2009	2008
Jumlah Pria (jiwa)	1.345.500	1.059.221	1.037.065
Jumlah Wanita (jiwa)	1.284.051	1.061.901	1.039.081
Total (jiwa)	2.629.551	2.121.122	2.076.146
Pertumbuhan Penduduk (%)	5	2	-
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )	2.071	-	-

Sumber Data : Jawa Barat Dalam Angka 2010, BPS Provinsi Jawa Barat Updated: 10-3-2011

Data BPS diatas menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena peningkatan jumlah penduduk yang signifikan di Kabupaten Bekasi selama kurun waktu 2008 hingga 2010, yang juga bisa diartikan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan dan permasalahan di dalam masyarakat.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan program sosial yang memberikan kontribusi memecahkan permasalahan sosial seperti : kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan hidup.

Disetujuinya klausul CSR masuk ke dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa “setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aturan lebih tegas sebenarnya juga sudah ada di UU PM Dalam pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (pasal 34 ayat (1) UU PM).

Dunia usaha berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup dan faktor sosial. Kini dunia usaha tidak hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah memikirkan aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang disebut juga triple bottom line. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

*Corporate social responsibility* dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya, agar meminimalisir dampak buruk industri pada masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya, sehingga dunia usaha, lingkungan dan masyarakat disekitarnya diharapkan dapat bertahan secara berkelanjutan dan terjadi interaksi mutualisme diantaranya.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Mengingat kawasan industri di Kabupaten Bekasi seperti yang diungkap dalam empat penelitian di atas, berkontribusi terhadap permasalahan sosial pada

masyarakat disekitarnya, maka pengembang kawasan industri juga memiliki tanggungjawab sosial guna ikut menyelesaikannya.

Melalui website resminya, PT. Jababeka Tbk. mengungkapkan bahwa, dalam pengembang kawasan industri di Kabupaten Bekasi PT. Jababeka Tbk. sejak awal telah menyadari pentingnya tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan.

Sebagai sebuah entitas bisnis, PT Jababeka Tbk menempatkan corporate social responsibility (CSR) sebagai suatu kegiatan utama yang dilakukan secara konsisten melalui program-program sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk menjembatani modernitas kawasan industri dengan masyarakat dan lingkungannya. (PT. Jababeka, Tbk. 2009)

Berbagai program CSR dilaksanakan secara terintegrasi dan melibatkan komunikasi intensif dengan seluruh elemen yang terlibat, tidak saja dengan berbagai unsur masyarakat tetapi juga institusi eksternal dan Pemerintah Daerah setempat, agar program yang digulirkan tepat sasaran dan membawa manfaat terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan.

Berdasarkan data yang diolah dari laporan tahunan 2006 s/d 2010, dapat dilihat pola CSR PT. Jababeka Tbk. Sebagai berikut :

Tabel 1.3. Implementasi CSR PT. Jababeka Tbk. 2006 s/d 2010

<b>Kegiatan</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Pendekatan karitatif dan kemanusiaan</b>	Bidang Pendidikan : Beasiswa, pembangunan gedung sekolah	Bidang Pendidikan : Pemberian bantuan kepada sekolah	Ekonomi : Pengembangan Usaha Kecil	Bidang Sosial : Pengembangan pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, Pembinaan kelompok keagamaan, pengembangan seni dan budaya	Bidang Sosial : Pengobatan gratis dan donor darah, pengobatan murah, Bantuan bencana alam
	Kesehatan : Pendirian poliklinik, pencegahan wabah DBD, Khitanan Massal, CHIP	Kesehatan : Pengobatan gratis dan pencegahan wabah DBD	Pendidikan : membangun gedung sekolah, memberikan beasiswa, akses praktek di unit bisnis	Bidang Lingkungan : Pengelolaan lingkungan, Pelestarian alam dan ramah lingkungan,	Bidang Pendidikan : Pembangunan gedung sekolah

Kegiatan	2006	2007	2008	2009	2010
	Keagamaan : perayaan Idul Adha, Pekan Muharram, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, gema ramadhan	Keagamaan : santunan anak yatim, pembagian sembako, dan perayaan hari besar keagamaan	Kesejahteraan Sosial : Pengobatan gratis, CHIP (Children Health Improvement Program, penyuluhan kesehatan,		Bidang Keagamaan dan kemasyarakatan: perayaan hari besar keagamaan, dan 17 agustus.
	Bhakti Sosial : bantuan bencana banjir, gempa yogyakarta	Penataan infrastruktur : pembangunan sarana ibadah, penyediaan sarana air bersih			Bidang Sosial : usaha kesehatan sekolah (penyuluhan dan training keahlian)
	KIE Desa : KIE untuk ormas di Kab. Bekasi, safari 10 desa, Lomba K3 antar kecamatan	Bidang olah raga dan Budaya : rehabilitasi sarana olah raga, sponsorship kegiatan olah raga			Bidang lingkungan : menjaga kebersihan sungai, penanaman pohon, Pameran CSR
	Penataan infrastruktur : penyesuaian dan pembakuan tarif air bersih untuk 700 kk, renovasi masjid di Kota Jababeka dan pengadaa TPS	KIE : Bantuan kepada UKM untuk pengangkutan sampah perumahan			
<b>Pendekatan empowerment dan sustainable development</b>				Bidang Ekonomi: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Bidang Ekonomi: Kemitraan Peternakan dan Perikanan, Penyediaan tenaga kerja
-	-	-	-	<b>Rp. 211.999.086,-</b>	<b>Rp. 357.000.000,-</b>

Sumber : Diolah dari annual report PT. Jababeka Tbk. Tahun 2006 s/d 2010

Tabel 1.3. menggambarkan bahwa sejak tahun 2009 telah terjadi perubahan pola CSR PT. Jababeka Tbk. dari sebelumnya menggunakan pendekatan karitatif dan kemanusiaan ke pendekatan empowerment dan sustainable development, maka penelitian ini membatasi aspek temporal pada program CSR PT. Jababeka Tbk. yang dilaksanakan tahun 2009 s/d 2010 untuk mendekati konteks implementasi CSR saat ini. Seperti juga ditegaskan dalam dokumen Annual Report PT. Jababeka Tbk. Tahun 2009, bahwa telah dilakukan perubahan konsep CSR yang bersifat empowerment.

Pelaksanaan CSR PT. Jababeka Tbk. diantaranya dilaksanakan melalui lembaga bentukannya yaitu Lembaga Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Jababeka (LPPM-Jababeka), pembentukan lembaga khusus untuk pelaksanaan program CSR masih merupakan hal baru di Kabupaten Bekasi.

Kehadiran LPPM-Jababeka sendiri berdasarkan pada suatu kebutuhan adanya sebuah lembaga yang dapat menjembatani kepentingan antara komunitas industri, perumahan, pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar Kota Jababeka.

LPPM-Jababeka hingga saat ini masih merupakan bagian dari tim manajemen PT. Jababeka, Tbk., Lembaga Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Jababeka (LPPM-Jababeka) bertujuan untuk mengembangkan sinergi yang positif dan menciptakan kemitraan antara perusahaan-perusahaan dan entitas lain baik di dalam maupun di luar kawasan Cikarang dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan keutuhan masyarakat Cikarang. Lembaga ini dibentuk untuk perbaikan dalam jangka panjang; pembangunan ekonomi; citra; kesejahteraan umum perusahaan, masyarakat industri, dan masyarakat Cikarang. (PT. Jababeka. Tbk. 2009).

Pelaksanaan CSR PT. Jababeka Tbk. menjadi menarik, selain perusahaan ini merupakan perusahaan pengembang kawasan industri yang tentunya berkepentingan langsung dengan masyarakat di sekitarnya, CSR PT. Jababeka Tbk. juga merintis jalan melalui joint program dengan tenant industri dalam program CSR dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Bentuk kegiatan dari Program CSR pemberdayaan ekonomi tahun 2009 dan 2010 bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.4. Kegiatan dalam Program CSR Pemberdayaan Ekonomi

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan 2009</b>	<b>Kegiatan 2010</b>	<b>Bentuk dan Sifat</b>
Bidang Pemberdayaan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan budidaya Ikan Lele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan budidaya Ikan Patin</li> </ul>	Pembentukan kelompok Pemberian modal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peternakan Kambing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiakan bebek petelur dan penetasan</li> </ul>	Pembentukan kelompok Pemberian modal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Itik Petelur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan telur asin</li> </ul>	Pembentukan kelompok Pemberian modal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya Bebek</li> </ul>		Pembentukan kelompok Pemberian modal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri rumah tangga, usaha kecil pembuatan makanan &amp; kue tradisional rengginang dan keripik pisang</li> </ul>		Pembentukan kelompok Pemberian modal

Sumber : Data Penelitian 2011.

Program CSR Bidang ekonomi : Pada tahun 2009 terdapat 5 kegiatan, dan pada tahun 2010 terdapat 4 kegiatan, bentuk kegiatan adalah pembentukan kelompok dan, Pemberian modal dengan pendekatan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi ini telah dirintis dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan untuk mencapai sustainabilitas.

Kegiatan ini pada mulanya memiliki tujuan jangka panjang untuk membangun sentra-sentra produksi khas masyarakat Cikarang. *Assessment* awal yang dilakukan LPPM-Jababeka menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi keahlian sebagai peternak ikan, unggas, kambing, sapi dan industri kecil skala rumah tangga.

Dari beberapa kegiatan tersebut, dua kegiatan yaitu industri rumah tangga pembuatan rengginang tahun 2009 dan industri rumah tangga pembuatan Telur Asin tahun 2010 merupakan dua jenis kegiatan CSR pemberdayaan ekonomi PT. Jababeka Tbk. yang menarik untuk diteliti, dari kedua kegiatan ini telah dirintis adanya pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk melaksanakan program dan adanya dukungan tenant industri yang mengikuti joint program pada pelaksanaan kegiatan di tahap berikutnya yaitu tahun 2010, namun saat ini kedua kegiatan tersebut sudah tidak berjalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah “Program Corporate Social Responsibility di Kawasan Industri PT. Jababeka Tbk. Cikarang, Kabupaten Bekasi (Studi Pemberdayaan Ekonomi Pada Industri Rumah

Tangga Pembuatan Rengginang dan Telur Asin)”. Penelitian ini berusaha untuk melihat lebih jauh interaksi dalam Program Corporate Social Responsibility di Kawasan Industri PT. Jababeka Tbk. Cikarang, Kabupaten Bekasi dan peran komponen pendamping dan partisipasi masyarakat, serta kendala-kendala di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi oleh PT. Jababeka, Tbk. Tahun 2009-2010?
2. Bagaimana peran pendamping dalam proses pelaksanaan CSR PT. Jababeka, Tbk.?
3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pemberdayaan pada program CSR PT. Jababeka, Tbk. ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan analisis proses pemberdayaan ekonomi dalam program CSR PT. Jababeka, Tbk. untuk kegiatan pembuatan rengginang tahun 2009 dan kegiatan pembuatan telur asin tahun 2010.
2. Mendeskripsikan peran pendamping dalam pemberdayaan ekonomi.
3. Mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif terhadap program CSR di kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi diharapkan dapat memberikan signifikansi sinergis antara dunia praktis dan akademis :

#### **1.4.1 Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi perusahaan pengembang kawasan industri khususnya PT. Jababeka Tbk. Sebagai pemilik program, tentang program CSR di kawasan industri.

Menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja serta Kementerian Sosial khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dalam upaya kedepan untuk sinergi pelaksanaan program CSR yang bagi pengentasan masalah sosial di sekitar kawasan industri.

#### 1.4.2 Manfaat akademik

Penelitian ini mengembangkan kajian ilmu kesejahteraan sosial, diharapkan adanya pemahaman dan pengalaman baru yang muncul dari perspektif emik penelitian.

Menjadi bahan informasi, referensi dan kajian bagi para peneliti, pemerhati, akademisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memahami pelaksanaan CSR di Kawasan Industri.

### 1.5 Metodologi Penelitian

#### 1.5.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana program CSR PT. Jababeka Tbk. dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi dilaksanakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Seperti yang dikemukakan Rubin and babbie (2008) menjelaskan bahwa: “*...Qualitative research is the comprehensiveness of perspective it gives the researcher. By going directly to the social phenomenon under study and observing it as completely as possible, you can develop a deeper understanding of it*”(h.417). “Riset kualitatif memberikan sudut pandang menyeluruh pada peneliti, yang secara langsung berhadapan dengan fenomena sosial yang sedang dipelajari dan diobservasi selengkap mungkin, guna mengembangkan pemahaman mendalam dari fenomena-fenomena sosial tersebut.”

Demikian juga dengan pendapat Locke, Spiduso dan Silverman (1987) dalam Creswell (2002) penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, kelompok atau interaksi tertentu. Pendekatan kualitatif

merupakan pendekatan yang relevan digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat (h.155).

Dalam hal ini penelitian dilakukan pada interaksi dalam Program Corporate Social Responsibility di Kawasan Industri PT. Jababeka Tbk. Cikarang, Kabupaten Bekasi dan peran komponen pendamping dan partisipasi masyarakat, serta kendala-kendala di dalamnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam melakukan penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah merupakan suatu penelitian deskriptif analisis. Babbie (2006) berpendapat, *“A major purpose of many social scientific studies is to describe situations and events. The researcher observes and then describes what was observed. Because scientific observation is careful and deliberate, however, scientific description are typically more accurate and precise than casual description.”* “Tujuan utama dari penelitian ilmiah ilmu-ilmu sosial adalah untuk menggambarkan keadaan dan peristiwa. Peneliti mengamati dan menggambarkan apa yang diamatinya itu. Karena itu pengamatan ilmiah dilaksanakan dengan cermat dan berhati-hati, penggambaran ilmiah akan menunjukkan akurasi dan kesesuaian yang lebih baik daripada deskripsi yang dilakukan secara biasa saja”.

Menurut Bungin (2001), penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang diteliti dan berupaya menarik realitas tersebut sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, berbagai situasi atau fenomena tertentu (h.68).

Pada penelitian ini pertanyaan penelitian difokuskan pada upaya untuk mengetahui gambaran fenomena pelaksanaan program CSR PT. Jababeka Tbk., peran pendamping, masyarakat, organisasi dan interaksi yang terjadi di dalamnya.

### 1.5.3. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan ditentukan secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Beberapa sampel berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian program CSR PT. Jababeka Tbk. Penentuannya antara lain :

Tabel 1.5. Informan berdasarkan informasi yang diperlukan

<b>Informasi</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
A. Proses pelaksanaan Program CSR PT. Jababeka, Tbk. dengan pendekatan Pemberdayaan Ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan rengginang dan telur asin (Tahap persiapan, pengkajian (assessment), perencanaan alternatif program atau kegiatan, pemformulasian rencana aksi, pelaksanaan program, evaluasi dan terminasi).	Masyarakat Penerima manfaat program	4
	Pejabat/ petugas PT. Jababeka, Tbk.	1
	Pelaksana Program (Pejabat/petugas LPPM-Jababeka)	2
B. Peran-peran pendamping dalam pemberdayaan	Tokoh formal/informal	2
C. Hambatan-hambatan di dalam program pemberdayaan		
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

Sumber : diolah dari data penelitian 2011.

Kriteria informan :

#### 1. Penerima manfaat program

Adalah warga masyarakat yang menjadi sasaran program CSR PT. Jababeka, Tbk. tahun 2009-2010, pemberdayaan ekonomi yang terlibat langsung dalam kegiatan dan mengetahui informasi pengalaman, permasalahan dan aspek terkait penelitian, komunitas, perspektif penerima program dan data lapangan terkait dengan program CSR.

## 2. Pihak PT. Jababeka Tbk.

Adalah pihak perusahaan pemilik program yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait konsep, teoritis, historis, permasalahan, program dan aspek terkait penelitian

## 3. Pihak LPPM-Jababeka

Adalah pihak pelaksana program, pendamping dan aktor dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yang terlibat langsung dalam program dan memiliki informasi pengalaman dan pengetahuan terkait penerapan konsep, teoritis, historis, permasalahan, program dan aspek terkait penelitian, pandangan-pandangan terhadap program dan hasil yang dicapai.

## 4. Tokoh

Adalah tokoh formal maupun informal yang mengetahui akan keberadaan program memiliki informasi, permasalahan dan aspek terkait penelitian, komunitas, demografi, sosial, dan perspektif tokoh terhadap program dan data lapangan terkait dengan program CSR.

## 5. Pihak Forum Komunikasi Investor Jababeka (FKIJ) mitra tenant industri

Adalah pihak investor yang mewakili tenant industri di kawasan industri Jababeka yang memiliki pengetahuan terkait program dan perspektif tenant terhadap program.

## 6. Pejabat Dinas Sosial Kab. Bekasi

Merupakan perwakilan dari pemerintah daerah dibidang sosial, memiliki informasi mengenai CSR di Kabupaten Bekasi.

### 1.5.4 Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

#### a. Studi literatur

Teknik ini adalah pengumpulan data dengan mencari hal-hal atau variabel yang berupa dokumen resmi, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya (Arikunto, 1993:200). Termasuk didalamnya literatur, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber elektronik, tujuannya

adalah untuk memperoleh kerangka pemikiran yang dipergunakan dalam analisis

b. Wawancara

Dalam penelitian ini dipergunakan teknik wawancara mendalam dengan instrumen wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini, diawali dengan pertanyaan yang terstruktur, kemudian diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga akan diperoleh jawaban yang meliputi semua variabel dengan keterangan lengkap dan mendalam (Arikunto, 1993:197). Informasi yang telah didapat bisa dikembangkan lebih lanjut selama dan setelah wawancara berlangsung

c. Pengamatan

Teknik pengamatan menjadi penting dilaksanakan karena wawancara terkadang menghasilkan data yang kurang akurat. Teknik pengamatan atau observasi memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Guba dan Lincoln dalam Moleong, 2001:125).

Alat yang dipergunakan dalam melakukan observasi adalah pedoman Observasi, dan foto. Cara kerjanya antara lain dengan melakukan pencatatan dan foto bukti fisik terkait (kejadian, aktifitas)

Observasi dilakukan terhadap tipologi wilayah penelitian dan komunitas untuk mendapatkan substansi informasi yang relevan dengan tipologi kawasan industri Jababeka dan komunitas

Observasi dilakukan terhadap pelaku program untuk mendapatkan substansi data yang relevan dengan informan dan lingkungannya

Observasi dilakukan terhadap jejak program CSR untuk mendapatkan substansi data yang relevan dengan program CSR PT. Jababeka Tbk. dan kondisi saat penelitian

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4. Design pengumpulan data dibawah ini :

#### 1.5.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data skunder dan data primer kualitatif yang diharapkan dapat menunjukkan hal-hal yang dapat menjelaskan pelaksanaan program CSR PT. Jababeka Tbk., peran pendamping, masyarakat, organisasi dan interaksi di dalamnya.

Data primer didapat dari hasil observasi dan wawancara dari sejumlah informan yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR PT. Jababeka Tbk. Sementara data sekunder adalah hasil yang didapat dari pengutipan berbagai buku dan dokumen. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam evaluasi ini, maka peneliti mencari sumber data dari para informan, yaitu orang-orang yang sengaja dipilih peneliti yang dianggap memahami dan mengetahui betul pelaksanaan program CSR PT. Jababeka Tbk.

#### 1.5.6 Teknik Analisa Data

Menggunakan teknik analisis data kualitatif, Analisa data dalam penelitian ini secara umum dibagi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, serta Yin dalam Suprayogo dan Tobroni (2001:199).

##### a. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Dalam penelitian ini, proses reduksi merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyisihkan data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan data ditarik secara sederhana dan dapat dijelaskan.

##### b. Penyajian data

Menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan matrik, grafik, jaringan, table dan bagian yang kesemuanya bertujuan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti selanjutnya menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data, diikuti penyusunan data dalam bentuk deskripsi secara sistematis. Reduksi data dan sajian data disusun pada waktu peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah mengumpulkan data, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data lapangan tersebut.

#### 1.5.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah operasi PT. Jababeka Tbk. yaitu Kawasan Industri Jababeka Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Kawasan ini merupakan salah satu Kawasan Industri terbesar di Kabupaten Bekasi yang dikelola oleh pengembang swasta.

PT. Jababeka, Tbk. merupakan pengembang kawasan industri dan kini berkembang menjadi pengembang kota, seiring perkembangan kawasan yang kemudian diproyeksikan menjadi sebuah Kota Mandiri. Kawasan industri Jababeka merupakan kompleks industri yang dihuni oleh 1500 perusahaan, dan 6000 pekerja yang 2500 diantaranya adalah pekerja asing. Kota ini kemudian menjadi kota internasional, dengan demikian masyarakat menjadi bagian integral dari usaha yang dilaksanakan. Artinya masyarakat sekitar kawasan industri merupakan stakeholder utama perusahaan yang mendapatkan perhatian khusus.

Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Jababeka, Tbk. mengikutsertakan program CSR yang juga dilaksanakan oleh para tenant yang menyewa lokasi pabrik di tempat tersebut dengan model joint program. Dengan besarnya jumlah perusahaan yang ada apabila dikelola dengan tepat maka akan besar pula potensi dalam pengentasan masalah sosial di sekitarnya.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisannya, tesis ini disajikan ke dalam 6 bab yaitu bab satu, memuat gambaran tentang latar belakang perkembangan kawasan Industri dan Corporate Social Responsibility sebagai bagian dari komponen aktivitasnya. Bab ini juga memuat fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi penelitian, metodologi penelitian dan sistematika laporan. Di dalamnya akan kita dapati mulai dari deskripsi historis kebijakan pembentukan kawasan industri hingga kehadiran CSR di wilayah tersebut.

Selanjutnya bab dua memaparkan beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini. Literatur yang digunakan meliputi pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan Corporate Social Responsibility.

Bab tiga memaparkan dua hal utama yaitu (1) lokasi penelitian yaitu Kawasan Industri Jababeka meliputi gambaran umum penduduk, kondisi geografis, kondisi sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi serta (2) memaparkan secara khusus gambaran program Corporate Social Responsibility PT. Jababeka Tbk.

Bab empat adalah paparan hasil penelitian Program Corporate Social Responsibility di Kawasan Industri PT. Jababeka Tbk. untuk pemberdayaan ekonomi industri rumah tangga pembuatan rengginang, dan telur asin, peran komponen pendamping dan partisipasi masyarakat, serta kendala-kendala di dalamnya. Bagian ini dikonstruksi dari informasi dan data yang terkumpul selama penelitian, berupa deskripsi dan eksplanasi secara detail apa yang ditemukan di lapangan serta berbagai perspektif informan/partisipan sehingga memungkinkan pembaca memahami realitas pengalaman dan pandangan informan/partisipan terhadap pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* di Kawasan Industri PT. Jababeka Tbk.

Bab lima ini memaparkan pembahasan penelitian yaitu penyajian proses dan hasil penelitian deskriptif kualitatif Program *Corporate Social Responsibility* di Kawasan Industri PT. Jababeka Tbk. untuk pemberdayaan ekonomi industri rumah tangga pembuatan rengginang, dan telur asin

Bagian ini melihat pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* di Kawasan Industri PT. Jababeka Tbk dengan perspektif yang ada di literatur akademik. Di sini temuan penelitian digolongkan, diklasifikasi, diurutkan dan terperinci sesuai elemen-elemen utama selama penelitian kemudian dibandingkan dengan literatur rujukan yang digunakan.

Bab enam atau bagian terakhir tesis ini mengambil intisari dari hasil temuan lapangan dan pembahasan dalam perspektif literatur *Corporate Social Responsibility* yang baik. Serta menyampaikan saran tindakan yang perlu untuk melanjutkan dan meningkatkan kualitas program CSR dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1. Industri dan Kawasan Industri Sebagai Pilihan Model Pembangunan Ekonomi

Usaha manusia untuk melakukan perbaikan dalam kehidupannya menjadi pokok bahasan yang terus menerus dikaji, penemuan berbagai cara dalam meningkatkan kualitas hidup dan rangkaian aktifitas untuk mendapatkannya, secara makro terangkum dalam konsep pembangunan.

Menurut Midgley (2005) pada awalnya, istilah pembangunan berkonotasi pada sebuah proses perubahan ekonomi yang dibawa oleh proses industrialisasi. Ini mengandung arti sebuah proses perubahan sosial yang dihasilkan dari urbanisasi, adopsi gaya hidup moderen dan perilaku masakini. Juga berkonotasi kesejahteraan yang menawarkan bahwa pembangunan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan level pendidikan mereka, memperbaiki kondisi pemukiman dan kesehatan. Dalam titik ini pembangunan diartikan sebagai kemajuan ekonomi (Midgley, 2005, p.3.). Pembangunan dengan konotasi ini tampaknya juga terjadi telah melatarbelakangi industrialisasi di Indonesia.

Jumlah Penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data BPS tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi sebesar 237.641.326 Jiwa atau Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar ke 4 di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat.

Pertambahan jumlah penduduk selalu diiringi dengan naiknya jumlah permintaan kebutuhan dan potensi penggunaan sumber daya secara besar-besaran. Perkembangan teknologi diharapkan dapat menjadi alternatif jawaban atas permasalahan tersebut, teknologi memungkinkan produksi dibuat secara massal dalam skala industri guna mencukupi tidak hanya kebutuhan domestik, namun juga kebutuhan internasional.

Disisi lain, terdapat peluang ekonomi global, dimana terdapat negara-negara pemilik modal atau investor, memiliki kebutuhan untuk melakukan ekspansi usaha ke wilayah yang dianggap menguntungkan, Indonesia menjadi

salah satu negara tujuan investasi, karena memiliki kriteria seperti ketersediaan sumber daya alam sebagai sumber bahan baku, ketersediaan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja murah, ketersediaan lahan, posisi geografi yang strategis, memiliki jalur distribusi yang baik, sekaligus sebagai daerah tujuan pemasaran dengan konsumen yang juga besar.

Peluang ini berusaha ditangkap oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan-kemudahan perolehan lahan, penyediaan sarana, prasarana dan regulasi yang menarik bagi calon investor agar mau menanamkan investasi di Indonesia.

Berpijak dari tata aturan yang ada, seperti bunyi Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian menyatakan “perlu mendorong pembangunan industri yang dilakukan melalui pembangunan lokasi industri berupa kawasan industri”. Pemerintah memandang perlu untuk membentuk kawasan industri sebagai kawasan terpadu yang dianggap lebih efisien dalam sistem produksi skala industri, maka dikeluarkanlah peraturan tentang kawasan industri ini antara lain :

Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 tentang kawasan Industri, yang menjadi landasan pengelolaan kawasan industri oleh swasta, Keputusan Presiden No. 33 tahun 1991 tentang penggunaan tanah bagi kawasan industri, Keputusan Presiden RI No. 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri, dan Peraturan Pemerintah RI No 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

Kebijakan inilah yang kemudian memungkinkan keran investasi dibuka seluas luasnya masuk ke Indonesia, dengan harapan kapital besar yang ditanamkan dapat menggerakkan roda perekonomian, membuka lapangan kerja, alih teknologi dan diharapkan dapat membawa Indonesia kearah kemajuan.

Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Bab III Visi Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 Halaman 37 “Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional, maupun dalam penyerapan tenaga kerja.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa, hingga saat ini orientasi

pembangunan ekonomi nasional yang telah berlangsung dan direncanakan kedepan adalah untuk memperkuat sektor Industri. Didalamnya tampak adanya orientasi industri ke depan.

Melihat deretan peraturan ini maka tampak bahwa pembentukan kawasan industri merupakan salah satu alternatif pilihan dalam strategi pembangunan ekonomi, dianggap paling rasional dan menguntungkan pada saat ini.

Pengertian industri terangkum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri yang disahkan tanggal 3 Maret 2009, Pasal 1 angka 1 menyatakan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan pengertian Kawasan Industri sebagai kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Selanjutnya pada Pasal 2 menjelaskan tentang tujuan dibangunnya Kawasan Industri antara lain :

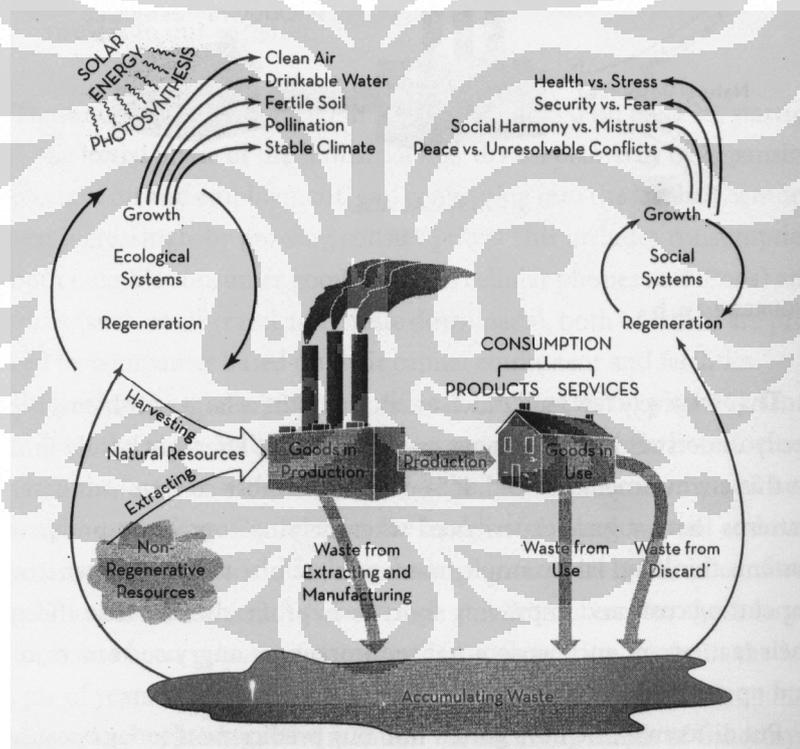
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang;
- b. meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
- c. mempercepat pertumbuhan Industri di daerah;
- d. meningkatkan daya saing Industri;
- e. meningkatkan daya saing investasi; dan
- f. memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

#### 2.1.2. Konsekuensi Pilihan Pembangunan Kawasan Industri

Kebijakan pengembangan kawasan industri didasarkan pada konsep *cluster industry*, dimana diperlukan suatu ruang kompleks industri yang sejenis baik terkait dengan alur proses produksi maupun hasil produksinya. Kebijakan cluster industri ini juga sering dikaitkan dengan fenomena aglomerasi ekonomi yang merujuk pada pengembangan industri yang memperoleh keuntungan dari adanya

urbanisasi ekonomi dan lokalisasi ekonomi. (Suhartono, 2009). Pilihan kebijakan pengembangan industri memiliki konsekuensi yang perlu perhatian serius, agar tidak menjadi bumerang yang merugikan lingkungan dan sosial dalam jangka panjang. (h.606)

Pemusatan ruang industri dalam cluster tertentu disatu sisi dapat meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi. Dalam jangka tertentu industri mampu menunjukkan produktifitas dan berdampak langsung terhadap pendapatan ekonomi, namun harus disadari fakta historis di negara-negara industri (terdahulu) menunjukkan Pembangunan industri yang masif dalam jangka panjang, menimbulkan dampak pencemaran serius, seperti kebisingan, pencemaran lahan, air, udara, perubahan iklim global dan dampak sosial yang tidak terbayangkan sebelumnya.



Gambar. 2.1. Proses Produksi dan Akibat Sampingannya dalam Jangka Panjang

Sumber : Senge at.all, 2008. P. 26.

Ilustrasi gambar 2.1. menunjukkan industri dalam proses produksinya memerlukan sumber daya (manusia dan alam) sebagai bahan baku dan alat produksi, aktifitas ini menghasilkan produk dan jasa untuk dikonsumsi, selain itu

juga menghasilkan limbah dan akibat pada sistem sosial yang serius, meliputi isu kesehatan vs stress, keamanan vs ketakutan, keseimbangan sosial vs ketidakpercayaan, kedamaian vs konflik, dengan demikian perlu adanya kearifan didalam pengelolaan kawasan industri, dimana didalamnya terdapat berbagai aktifitas industri dengan beragam bentuk limbah, dan beragam interaksi. Penelitian ini akan memfokuskan diri pada aspek manusia dan relasinya dengan lingkungan industri dalam program CSR.

Akibat industri ini juga menjadi bahan kajian Midgley (2005), Ia mencontohkan dampak industrialisasi seperti yang terjadi di Missisipi Amerika Serikat, sebuah kompleks industri petrokimia terbesar yang terletak di sepanjang sungai Missisipi, terbentang dari Baton Rouge hingga New Orlean, daerah ini terhitung berhasil dalam pembangunan ekonominya, terdapat beberapa usaha kilang minyak, perusahaan pupuk multi nasional, daerah pertanian dan produsen bahan baku komoditas ekspor, namun kawasan ini justru memiliki catatan tingkat kemiskinan tertinggi, demikian juga dengan angka kematian bayi. Kemiskinan dan keterlantaran sosial justru menjadi karakter wilayah ini. Pembangunan ekonomi dan kekurangan sosial di daerah ini menjadi contoh klasik dari pembangunan yang terdistorsi. Dimana pembangunan ekonomi tidak diiringi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat (h.6).

Keberadaan kawasan industri tidak terlepas dari masyarakat di sekitarnya. Keduanya memiliki hubungan saling mempengaruhi. Kawasan industri yang stabil akan memiliki peluang bagus dalam persaingan merebut perhatian investor, dan memberikan kenyamanan dalam proses produksi bagi para tenant industrinya. Stabilitas bisa tercapai jika masyarakat disekitar kawasan industri berada dalam keadaan kondusif dan terjamin sustainabilitas kesejahteraan sosialnya atau *Sustainable community*.

*Sustainable community* fokus pada pendekatan sistem yang terintegrasi untuk jangka panjang, diantaranya isu-isu yang berhubungan dengan isu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Konsep ini memandang bahwa isu-isu yang berhubungan dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial tersebut merupakan suatu yang terintegrasi. Penekanan diarahkan bagaimana menjaga keseimbangan antar isu-isu ini. Suatu masyarakat yang berkelanjutan harus merujuk pada isu-isu

sosial. Jika suatu masyarakat mempunyai permasalahan sosial penting, seperti kriminalitas, mengakibatkan tidak terwujudnya kestabilan dan masyarakat yang sehat, maka keberlanjutan juga hanya akan menjadi suatu angan-angan saja. Kondisi masyarakat seperti itu tidak akan mampu mengatasi masalah-masalah kunci lainnya, seperti permasalahan lingkungan, sebab mereka akan menjadi sangat sibuk dalam usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan sosialnya. Isu-isu sosial dalam sustainable community meliputi keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan, kriminalitas, hak kekayaan, community building, kerohanian, penegakkan hukum untuk kepentingan lingkungan, dan lain lain. Bagaimana pun keterlibatan masyarakat pada suatu wilayah tidak hanya terbatas pada masalah partisipasi mendukung aktivitas-aktivitas industri yang positif, tetapi pada umumnya masyarakat sekitar industri juga merupakan pekerja yang langsung terlibat dalam aktivitas industri tersebut. (Eco Industrial Sebagai Konsep Dasar Pengembangan, Master Plan Jambi Agro Industrial Park, p.VI.7).

Lebih tegas lagi dalam pandangan Midgley (1995), Pembangunan ekonomi (dalam hal ini industri) tidaklah bermakna (meaningless), kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan (p.23).

### 2.1.3. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial Perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat” (Tunggal, 2008, h. 1). Ini berarti CSR dipandang sebagai kewajiban.

*Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources.* (Kotler, Lee, 2005, p. 3). CSR dipandang sebagai sebuah komitmen dunia usaha terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kontribusi dengan sumber daya perusahaan.

Pengertian CSR cukup beragam, Sukada dan Jalal dalam Suharto, (2008c, h.5) menyajikan 6 pengertian dari berbagai organisasi seperti :

- a. *World Business Council for Sustainable Development*: Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.
- b. *International Finance Corporation*: Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.
- c. *Institute of Chartered Accountants, England and Wales*: Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (shareholders) mereka.
- d. *Canadian Government*: Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.
- e. *European Commission*: Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan.
- f. *CSR Asia*: Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders.

Pengertian CSR yang paling sering dikutip adalah pendapat Elkington, CSR merupakan usaha untuk menyeimbangkan Profit, People, Planet dan ada satu tambahan konsep dari Suharto yaitu Procedure (yang tepat dan profesional), (Suharto, 2008c).

Pengertian CSR yang komprehensif dan relatif masih baru ada dalam rumusan dokumen ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility*, mendefinisikan CSR sebagai : “*Responsibility of an organization for the impacts*

*of its decision and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.” (ISO 26000 : 2010, Guidance on Social Responsibility).*

“Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh dan menerapkan dalam hubungan diantaranya”.

Dalam pengertian CSR menurut ISO 26000 : 2010, Guidance on Social Responsibility setidaknya terdapat tujuh isu pokok mengenai yaitu : 1) Pengembangan Masyarakat, 2) Konsumen, 3) Praktek Kegiatan Institusi yang sehat 4) Lingkungan, 5) Ketenagakerjaan, 6) Hak asasi manusia, 7) Organizational Governance

Dari pengertian tersebut dapat dikelompokkan beberapa kesamaan makna dan tujuan CSR yaitu adanya Komitmen, Kewajiban, Tujuan Kebaikan, Keberlanjutan, Hubungan mutualisme antara stakeholder dan pelaku usaha.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas bila ditinjau dari substansi filosofis pengertian CSR menurut Prayogo (2011), terdapat dua hal pokok yang selalu ada dalam setiap pengertian yaitu etika (ethics) yang mendasari moral aktifitas CSR dan tindakan (action) yang menjadi perwujudan dari moral. (p.180). Kedua hal ini yang kemudian dapat dijadikan pijakan untuk melihat karakteristik CSR korporasi.

Bila ditinjau dari sasaran CSR, terdapat dua arah yaitu ke dalam korporasi dan keluar korporasi. Sasaran CSR ke dalam korporasi meliputi isu pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok dan berhubungan dengan profit. 1)

Pemegang saham dengan isu seperti Komunikasi dan keluhan pemegang saham, pembelaan, dan hak. 2) Karyawan atau buruh dengan isu tunjangan, kompensasi dan penghargaan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, program bantuan karyawan, promosi kesehatan, kealpaan dan perputaran karyawan, cuti kehadiran, hubungan dengan serikat kerja, pemecatan dan naik banding, pemutusan hubungan kerja, selesai kontrak, pensiun dan persiapannya, keadilan dan diskriminasi kerja, wanita didalam manajemen atau dewan direksi, perawatan dan akomodasi keluarga, komunikasi karyawan, keamanan dan kesehatan kerja, kerja paruh waktu, sementara, atau karyawan kontrak. 4) Pelanggan dalam CSR meliputi isu seperti Komunikasi pelanggan, keamanan produk, keluhan pelanggan, layanan pelanggan khusus, dan masalah lainnya. 5) Pemasok dengan isu kemampuan relatif dalam memasok, kebijakan umum, dan masalah lainnya. Sasaran CSR ke luar korporasi meliputi stake holder umum yaitu masyarakat dan pemerintah dengan isu sosial dan lingkungan meliputi : kesehatan umum, keamanan dan perlindungan, penghematan energi dan bahan baku, penilaian lingkungan atas proyek, masalah lingkungan lainnya, keterlibatan kebijakan umum, hubungan masyarakat, investasi dan sumbangan sosial. (Clarkson, dalam Tunggal, p.22).

Penelitian ini membatasi diri pada lingkup CSR keluar korporasi, dimana masyarakat sekitar kawasan industri adalah salah satu stakeholder primer perusahaan yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan dalam jangka panjang dan memerlukan mendapat perhatian khusus.

#### 2.1.4.2. Kedudukan CSR dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Meskipun telah membayar pajak kepada pemerintah, perusahaan tidak bisa lepas tangan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan.

Menurut Suharto (2008c) di Indonesia masih menerapkan residual welfare state, manfaat pajak seringkali tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat kelas bawah, orang miskin dan komunitas adat terpencil. Oleh karena itu, bagi kalangan yang setuju UU CSR, CSR merupakan instrumen cash transfer dan suplemen sistem "negara kesejahteraan residual", (h. 4-5).

Kedudukan CSR dalam pekerjaan sosial dikenal dengan nama pekerjaan sosial industri. Pekerjaan Sosial Industri dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik pekerjaan sosial yang menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metode pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dan lingkungannya, terutama lingkungan kerja. Pekerjaan Sosial Industri dapat menangani beragam kebutuhan individu dan keluarga, relasi dalam perusahaan, serta relasi yang lebih luas antara tempat kerja dan masyarakat yang dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (Suharto, 2007). Pekerjaan Sosial Industri menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial dalam pemberian pelayanan, program dan kebijakan bagi para pegawai dan keluarganya, manajemen perusahaan, serikat-serikat buruh dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

Tata laksana program CSR perusahaan perlu untuk berjalan seiring sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi guna mempercepat pemerataan kesejahteraan.

Dalam “Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial”, Midgley (2005) dikenal pula hubungan 3 pilar pembangunan yaitu, pemerintah, masyarakat dan pasar atau dunia usaha, ia menyebut model ini dengan perspektif institusional yang berusaha memobilisasi institusi sosial yang berbeda untuk mengangkat tujuan pembangunan sosial yaitu kesejahteraan rakyat. Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatur, mengkoordinasi implementasi yang berbeda. Pemerintah secara aktif mengarahkan proses pembangunan sosial dengan cara memaksimalkan partisipasi masyarakat, market dan individu. Pemerintah juga berkontribusi langsung melalui berbagai kebijakan dan program sektor publik.(p. 204-205).

Sejalan dengan ini dalam “Membangun Indonesia Emas”, Agustian (2005) memaparkan peran Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial sebagai berikut : Peran pemerintah dibagi dalam tiga kelompok, yakni regulasi, pelayanan dan fasilitasi. Peran regulasi berupa pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan yang menghambat upaya pemberdayaan masyarakat, menetapkan regulasi-regulasi yang dapat mendukung

ekonomi rakyat berkembang, penegakan terhadap pelaksanaan produk hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah) dan lain-lain. Peran pelayanan diwujudkan melalui berbagai sektor terkait, terutama pada peran pelayanan yang tidak mampu dilakukan oleh sektor swasta ataupun yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat sendiri. Peran fasilitasi diwujudkan antara lain adalah pemetaan kembali kondisi masyarakat secara nasional maupun regional. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dapat diakses oleh berbagai pihak yang peduli pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Mendorong berbagai pihak untuk turut serta mengatasi permasalahan pembangunan. Pemerintah dapat pula menjadi jembatan/ fasilitasi terhadap apa yang diinginkan masyarakat dengan pihak swasta. Dalam hal ini berperan sebagai fasilitator, regulator, motivator, penyediaan prasarana publik (infrastruktur), (p.210).

Peran dunia usaha seperti perbankan, lembaga keuangan lainnya, dapat memberikan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui penyediaan anggaran, bantuan teknis, dan pendampingan bagi usaha mikro (salah satunya adalah konsultan keuangan/ pendamping usaha mikro kecil dan menengah mitra bank untuk peningkatan daya serap terhadap pendanaan perbankan, serta aspek penguatan kelembagaan, antara lain legal framework lembaga kredit mikro dan pemberdayaan kelembagaan penjamin kredit.(p.210). Peran dunia usaha lainnya adalah melalui program CSR yang ditujukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar lokasi industri atau dalam lingkup yang lebih luas lagi.

Dalam Agustian (2005) dibedakan adanya beberapa Peran masyarakat yaitu : peran advokasi, asistensi, pendampingan, dan kontrol sosial. 1. Masyarakat dengan lembaganya menyuarkan aspirasinya kepada pemerintah mengenai kondisi lingkungannya. Pihak organisasi non pemerintah dan organisasi massa menjadi pendamping dan menyuarkan kehendak masyarakat melalui jalur advokasinya. 2. Peran asistensi pendampingan. Secara individual maupun kelembagaan, masyarakat memberikan asistensi dan atau pendampingan ekonomi rakyat dalam pengembangannya melalui berbagai mekanisme yang telah banyak berkembang di masyarakat. 3. Peran kontrol sosial. Secara individu maupun kolektif, masyarakat melakukan kontrol dalam pembangunan mulai dari tahap

perencanaan sampai dengan pelaksanaannya melalui mekanisme partisipatori (h.211).

Masing-masing peran ini memerlukan manajemen yang baik dalam mengoptimalkan usaha pembangunan kesejahteraan sosial, berikut adalah pendapat Bappenas dan Kementerian Sosial.

Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM, BAPPENAS, Ceppi S Sumadilaga, saat berbicara dalam seminar *The Real CSR : Peran CSR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin di Indonesia*, yang digagas republika di Jakarta, Rabu (12/10), menyebutkan salah satu langkah konkret dan mendasar untuk segera dilaksanakan adalah pembagian peran. Pembagian peran yang dimaksud meliputi kesepakatan bersama, mengetahui peran masing-masing dan pihak-pihak yang terlibat memiliki hak untuk turut serta dalam sumbang saran pemikiran, tenaga dan lain sebagainya. Pemerintah memiliki program pengentasan kemiskinan yang terbagi menjadi empat kluster sasaran pembangunan. Empat kluster tersebut, antara lain kluster I (Rumah Tangga), Kluster II (Komunitas), kluster III (kredit usaha rakyat) dan IV (kebijakan pro rakyat). Dari keempat kluster itu, CSR sendiri mampu berperan dalam kluster II (komunitas), dan III (Kredit Usaha Rakyat). Sementara pemerintah dapat fokus menangani kluster I (rumah tangga) dan kluster IV (program pro rakyat). (Republika, 13 Oktober 2011).

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial di bagian Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, sesuai dengan kewenangannya dalam merumuskan kebijakan ditingkat nasional, telah melakukan pengembangan terhadap konsep-konsep terkait, antara lain : dalam landasan filosofis ada konsepsi Kesetiakawanan Sosial, ditingkat operasional ada konsepsi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan investasi sosial, kemudian ditingkat aplikasi kebijakan pemerintah mendorong diberikannya reward atau penghargaan bagi para pelaku CSR baik individu maupun organisasi dengan memberikan CSR Award yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, memperkuat aspek kelembagaan seperti keterlibatan pemerintah dalam *Corporate Forum For Community Development (CFCD)*, dan melakukan fasilitasi terhadap

penyebarluasan efek baik CSR melalui event-even nasional seperti pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial pada setiap tanggal 20 Desember.

Kedudukan CSR menurut Kementerian Sosial dapat dilihat dalam buku Indikator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, ditinjau dari aspek ketahanan sosial masyarakat (2004) menyebutkan “Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial merupakan suatu badan atau lembaga, kelompok masyarakat atau perorangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.(Kemensos .2004. h.6) termasuk di dalamnya lembaga berbadan hukum yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, dan program CSR dapat dikategorikan sebagai bagian dari program pelayanan sosial kepada masyarakat.

Sumodiningrat (2007) dalam Merajut Kembali Konsepsi Kesetiakawanan Sosial dalam Tatanan Masyarakat mengemukakan, Kesetiakawanan Sosial sebagai suatu nilai masyarakat yang bersifat dinamis, kesetiakawanan sosial merupakan bentuk dari solidaritas sosial baik yang bersifat mekanik pada masyarakat tradisional maupun yang bersifat organik pada masyarakat industri (h.9-10). Lebih lanjut dijabarkan dalam potret empirik kesetiakawanan sosial yang bersifat organik dalam organisasi sosial/perusahaan antara lain 1) Pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa lembaga sosial, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pemerintah, demikian halnya yayasan yang bergerak pada penanggulangan masalah sosial. Lembaga-lembaga ini kemudian dikategorikan dalam Konsepsi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), 2) Gerakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang saat ini dilakukan oleh beberapa badan usaha menunjukkan sikap kepedulian dan kebersamaan antara perusahaan dengan warga sekitar yang berdampak pada adanya sambung rasa antara warga dan perusahaan (h.17).

Konsepsi investasi sosial yang dikembangkan Kementerian Sosial dalam Suharto (2007) merujuk pada model tanggungjawab sosial perusahaan atau Model Investasi Sosial Perusahaan, merujuk pada perluasan peran perusahaan yang tidak hanya mengurus kesejahteraan pegawai dan kebutuhan konsumen saja melainkan turut pula peduli akan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan , gagasan corporate social investmen lebih bernuansa pemberdayaan, program

sosial yang dirancang dalam konsep investasi sosial perusahaan umumnya memiliki dampak yang berdimensi lebih luas, dan jangka panjang (sustainabel). Dalam konteks investasi sosial perusahaan pelayanan sosial dari perusahaan tidak dipandang sebagai tanggung jawab sosial saja melainkan lebih jauh lagi sebagai bagian dari rekayasa sosial dan strategi perusahaan yang rasional, terencana, dan berorientasi pada pencapaian keuntungan sosial jangka panjang bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan masyarakat (h.22-23).

#### 2.1.4.3. Perkembangan Implementasi CSR

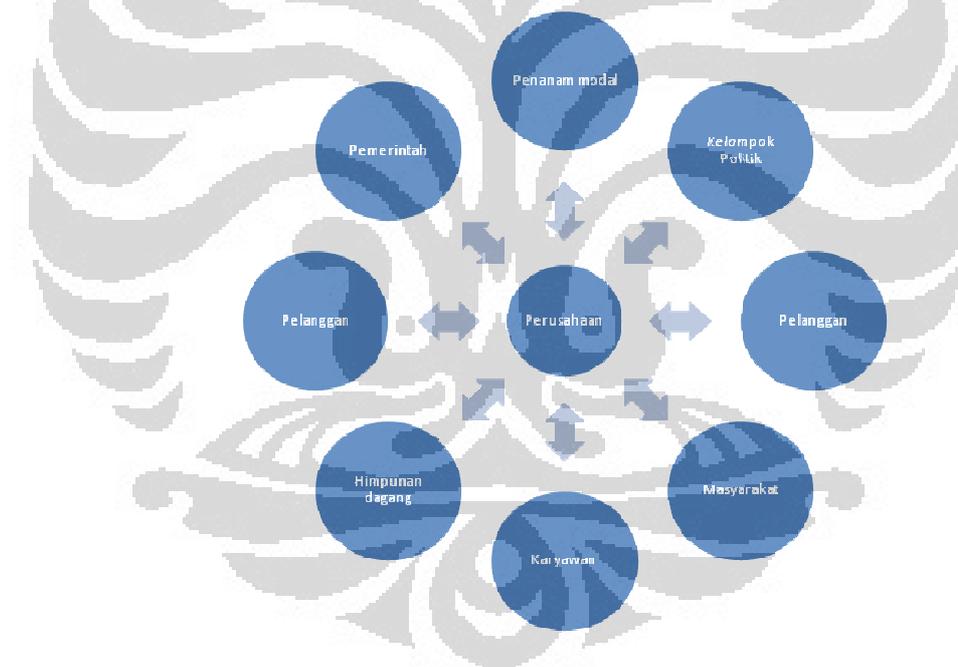
Dalam perkembangan teoritis terdapat perbedaan pandangan mengenai tanggungjawab perusahaan terhadap hal lain selain profit seperti tanggungjawab lingkungan dan sosial. Salah satu yang terkenal adalah pandangan ekonom Milton Friedman, yang dipublikasikan secara luas dalam *The New York Magazine* 13 September 1970, ia menulis tajuk "*The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profit*", pandangannya kini dikenal dengan Model pemegang saham : "satu-satunya tanggungjawab sosial yang dimiliki oleh organisasi adalah memuaskan pemiliknya, yaitu pemegang saham. Memaksimalkan keuntungan untuk memaksimalkan kekayaan dan kepuasan pemegang saham. "adalah tidak bertanggungjawab sosial apabila perusahaan mengalihkan waktu, dana, dan perhatiannya dari memaksimalkan keuntungan kepada kegiatan derma dan organisasi amal".

- Organisasi tidak dapat bertindak efektif sebagai lembaga moral bagi semua pemegang saham.
- Waktu, dana dan perhatian dialihkan kepada masalah sosial sehingga mengurangi efisiensi pasar. Pada saat yang sama perusahaan bersaing untuk mendapatkan bahan baku, pekerja berbakat, pelanggan, dan dana investasi.

"Pengalihan dana, waktu, dan sumber daya perusahaan untuk tujuan sosial akan melukai pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemegang saham" (Tunggal, h.25). Pendapat Friedman ini kini tidak lagi populer sejalan dengan adanya perkembangan tuntutan usaha yang lebih adil untuk seluruh pihak yang berkepentingan.

Korporasi tetap memiliki tanggungjawab etika dan dia harus bertindak untuk ikut bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah yang juga ditimbulkannya. korporasi tidak berdiri sendiri, untuk berusaha ia juga tergantung pada kondisi disekitarnya, apabila ini diabaikan maka dapat mengganggu proses produksinya.

Model yang dikemukakan Mulligan ini kemudian berkembang menjadi model Stakeholder atau pihak yang berkepentingan, model ini melihat bahwa tanggungjawab sosial manajemen yang terpenting adalah kelangsungan hidup jangka panjang (bukan hanya memaksimalkan laba), yang dicapai dengan cara memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepetingan terhadap perusahaan (bukan hanya pemegang saham), pihak yang berkepentingan adalah orang atau kelompok dengan kepentingan yang sah dalam suatu perusahaan. (Tunggal, h.39-50).



Gambar 2.2. Model stakeholder dari tanggungjawab sosial perusahaan

Sumber : T. Donaldson & L.E. Preston, "The Stakeholder Theory of The Corporation : Concept, Evidence, and Implications," *Academy of Management Review* 20 (1995): 65-91 dalam Tunggal h. 26

Gambar 2.2. menunjukkan berbagai kelompok berkepentingan yang harus dipuaskan oleh organisasi untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang.

Istilah CSR semakin populer terutama setelah diulas dalam buku *Cannibals With Forks "The Triple Bottom Line in 21st Century Business"* (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas *the World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: profit, planet dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Suharto, 2008).

Kemp(2001) dalam *Corporate Social Responsibility in Indonesia : Quixotic Dream or Confident Expectation?*. Melaporkan hasil penelitiannya dalam *Technology, Business and Society Programme Paper Number 6*, December 2001. United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) : Genewa, yang menyimpulkan sebagai berikut : “Indonesia mungkin mendapatkan keuntungan dari CSR, namun CSR tidak dapat memecahkan isu – isu eksploitasi, perusakan lingkungan, dan standar minimal buruh, terutama saat keuangan korporasi barat tidak tersalurkan pada masalah lingkungan atau lobby-lobby terhadap tata aturan perburuhan, dan ketidakadilan pada masyarakat. Pada satu titik dalam pembangunan, menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakomodasi prinsip paham CSR model barat, dan juga mengakomodasi prinsip paham kemanusiaan, namun pada kenyataannya, terdapat konflik melekat yang khas antara CSR dan politik kebudayaan bahwa dalam implementasi CSR di Indonesia masih sebatas kosmetik, perubahan yang tampak dipermukaan masih hanya sebatas ilusi. Saya berpendapat bahwa implementasi CSR dapat berjalan efektif, bila memenuhi syarat kelengkapan yaitu pemerintahan demokrasi yang efektif dan civil society. Adalah prematur untuk mengatakan CSR di Indonesia sudah berjalan, saat kelengkapan masyarakat sipil secara struktural dan keterwakilannya masih lemah.”

Daniri, (2007) dalam *Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Chairman of Permanent Committee on Good Corporate Governance, yang diterbitkan Kadin Indonesia. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah

perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. James Collins dan Jerry Porras meluncurkan *Built To Last; Suc cesful Habits of Visionary Companies di tahun 1994*. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata.

Tabel 2.1. Peristiwa Penting yang mendorong implementasi CSR

<b>Peristiwa</b>	<b>Capaian Penting</b>
<b>Dorongan Global</b>	
Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro Brazilia 1992 "Rio Earth Summit on the Environment"	perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
James Collins dan Jerry Porras meluncurkan <i>Built To Last; Suc cesful Habits of Visionary Companies di tahun 1994</i> .	Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata
Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia "World Summit on Sustainable Development (WSSD)"	memunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility)
Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB	Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan corporate social responsibility
Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 Badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility	Perundingan penyusunan standar Corporate Social Responsibility.
Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO.	Pembentukan "Strategic Advisory Group on Social Responsibility pada tahun 2002

Pada bulan Juni 2004 diadakan pre-conference dan conference bagi negara-negara berkembang	
Pada bulan September 2004, ISO (International Organization for Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional berinisiatif mengundang berbagai pihak	Pembentukan tim (working group) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: <i>Guidance Standard on Social Responsibility</i> .
Tahun 2004 bulan Oktober, penyusunan draft New York Item Proposal atau NWIP	New York Item Proposal atau NWIP diedarkan kepada seluruh negara anggota
Dilakukan voting terhadap draft New York Item Proposal pada bulan Januari 2005,	29 negara menyatakan setuju dengan New York Item Proposal atau NWIP, sedangkan 4 negara tidak setuju.
Januari 2005, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, melalui Global Governance Initiative	kalangan bisnis diajak memikirkan soal kemiskinan melalui praktik CSR.
Pada tanggal 8 – 9 September 2005 bertempat di Jakarta, Indonesia menjadi tuan rumah AFCSR (Asian Forum for Corporate Social Responsibility)	memaparkan bagaimana CSR harus dipraktikkan oleh bisnis di Asia.
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyatakan dalam sebuah side-event Pertemuan PBB New York (14-16/9),	Praktik CSR adalah wujud komitmen dunia bisnis untuk membantu PBB merealisasikan target Millennium Development Goals (MDGs).
London Stock Exchange sejak tahun 2001	Memiliki Socially Responsible Investment (SRI) Index dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) yang memiliki FTSE4Good
Resolusi Uni Eropa pada tanggal 13 Maret 2007	Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi berjudul “Corporate Social Responsibility: A new partnership” yang mendesak Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban yang terkait dengan persoalan akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur (directors’ duties), kewajiban langsung luar negeri (foreign direct liabilities) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (environmental and social reporting).
Di Inggris, perusahaan diikat dengan kode etik usaha, dan pada 2006 disahkan Companies Act 2006	Mewajibkan perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek untuk melaporkan bukan saja kinerja perusahaan (kinerja ekonomi dan

	financial) melainkan kinerja sosial dan lingkungan. Laporan ini harus terbuka untuk diakses publik dan dipertanyakan. Dengan demikian, perusahaan didesak agar semakin bertanggung jawab.
<b>Dorongan Kebijakan Nasional</b>	
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR	Pemerintah memasukkan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).	UU PM Dalam pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 34 ayat (1) UU PM, mengatur tentang sanksi, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sumber : Diolah dari Daniri, Mas Ahmad.(2007) Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Chairman of Permanent Committee on Good Corporate Governance, Kadin Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Siregar (2007). Dalam Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada masyarakat Indonesia. Jurnal Sosio Teknologi Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007, berpendapat “Konsep tanggungjawab sosial perusahaan sudah dikenal sejak awal 1970, secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stake holder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Program CSR yang terpenting adalah aturan yang mewajibkan program harus berkelanjutan (sustainable). Melakukan Program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih

besar, kepada perusahaan itu sendiri berupa citra perusahaan dan para stakeholder terkait.”

## 2.1.5. Sustainable Development dan Pemberdayaan dalam CSR

### 2.1.5.1. Konsep Sustainability dan Pemberdayaan

Konsep Pemberdayaan dan sustainability dalam pelaksanaan program CSR kini kian menjadi tren. Dokumen tentang ide dasar dari konsep “Sustainable development” dapat dilihat dari the “Club of Rome” pada tahun 1972, yaitu sekelompok orang yang terdiri dari Para manajer, ahli ilmu teknik, dan ilmuan se Eropa yang berhasil menyusun suatu dokumen penting mengenai keprihatinan terhadap lingkungan yang disebutnya sebagai “The Limit of Growth” (Friedman, 1975 dalam Agustian, 2005). Pesan penting dari dokumen tersebut diantaranya adalah bahwa sumber daya alam telah berada pada suatu tingkat yang memperhatikan dalam menunjang keberlanjutan (sustainability) pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Kondisi daya dukung lingkungan mendapat ancaman dari kegiatan overdevelopment atau pembangunan yang berlebihan.

Sustainability diartikan sebagai “suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi mendatang (World Commission On Environment and Development, 1987. *Our Common Future*, dalam Agustian, 2005).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek manusia, jadi pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang berpusat pada manusia. Maka konsekuensi dari sudut pandang ini, penelitian ini akan difokuskan dalam koridor pengertian keberlanjutan sosial. Sehingga bentuk sustainabilitas yang lain diarahkan untuk menunjang kualitas keberlanjutan sosial. Kata kunci dalam sustainabilitas sosial adalah pemberdayaan.

Konsep empowerment (pemberdayaan) muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Konsep ini dimunculkan oleh John Friedman dalam *Empowerment: The Politics of alternative development*, MIT Press, Massachusetts, 1992. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya

alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. “pemberdayaan masyarakat” pada hakikatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individual. (Friedman, 1992, dalam Agustian, 2005). Titik fokusnya adalah lokalitas sebab civil society akan siap diberdayakan melalui isu-isu lokal.

Konsep empowermen, merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. Ditingkat ideologis, konsep empowermen merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up, antara growth strategy dan people-centered strategy. Sedangkan ditingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi (Friedman, 1992, dalam Agustian, 2005).

Menurut Adi (2008, h.83-84) melihat bahwa : Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu program atau sebagai proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja.

Hogan (2000, h.20) dalam Adi (2008, h.85) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan yaitu:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan Penidakberdayaan masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*);
- c. Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek (*identify one problem or project*)
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*); dan
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan nya (*develop and implement action plans*)

Pemberdayaan dipandang sebagai proses lebih bernuasa humanis, sebagaimana dinyatakan oleh Kusnaka dalam Hikmat (2001, h. 11), yaitu : “pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial budaya”

Bentuk pemberdayaan masyarakat sebagai program, dapat dijelaskan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang dikembangkan oleh Adi ( 2008, h. 244-258), terdiri dari 7 tahapan, yakni tahap persiapan (*engagement*), tahap pengkajian (*assessment*), tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (*designing*), tahap pemformulasian rencana aksi (*designing*), tahap pelaksanaan program (implementasi), Tahap evaluasi dan tahap terminasi.

Penjelasan tentang tahapan tersebut sebagai berikut, sebagaimana yang dikembangkan oleh Adi (2008, h. 244-258) :

- a. Tahap *Engagement*. Tahapan persiapan ini sekurang-kurangnya terdiri dari 2 hal yaitu penyiapan lapangan dan penyiapan petugas. Penyiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen perubah (*change agent*) mengenai pendekatan atau konsep yang akan dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesamaan pandangan diantara tenaga pengubah (*change agent*), terutama apabila tim pengubah berasal dari latar belakang yang berbeda. Sedangkan pada penyiapan lapangan, petugas (*community worker*) melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik secara informal maupun formal. Pada tahap inilah terjadi kontak dan kontrak awal dengan kelompok sasaran. Kedekatan *community worker* dengan kelompok sasaran akan mempengaruhi peran serta masyarakat pada tahap berikutnya.
- b. Tahap *Assessment*  
Proses *assessment* yang dilakukan di sini dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *felt needs*) dan juga sumber

daya yang dimiliki klien. Dalam tahapan ini masyarakat dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang dibicarakan adalah permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Proses pengkajian (*assessment*) ini dapat dilakukan secara individual (*individual assessment*) melalui tokoh-tokoh masyarakat ataupun dapat pula melalui kelompok. Dalam tahap ini juga ditentukan apa yang menjadi prioritas masalah.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini agen perubah (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Dalam proses ini petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan pada saat itu dan tentu disesuaikan dengan sumber daya.

d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini *community worker* membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini telah terpilih dan ditentukan program atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini juga fasilitator berperan membantu masyarakat memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis.

e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau kegiatan

Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara agen perubah dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga.

f. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Evaluasi atau pengawasan yang paling tepat digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah evaluasi internal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh warga masyarakat sendiri. Evaluasi dapat dilakukan pada input, proses, dan juga pada hasil.

g. Terminasi

Tahap terminasi ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Idealnya tahap ini dilakukan apabila masyarakat atau komunitas sasaran benar-benar sudah berdaya. Pemutusan hubungan dengan komunitas sasaran ini sebaiknya dilakukan secara pelan-pelan, bertahap, tidak secara langsung ditinggalkan begitu saja oleh *change agent* sehingga dapat dipastikan ketika agen perubah keluar dari komunitas tersebut keadaan sudah jauh berubah dan komunitas sasaran sudah relatif mandiri.

#### 2.1.5.2. Proses Pemberdayaan yang Berkelanjutan

Strategi Pemberdayaan masyarakat adalah strategi yang disusun secara komprehensif dan integral, yaitu strategi pembangunan yang berprinsip partisipatif, demokratis, dan disertai penegakan hukum dan bekerjanya mekanisme pasar untuk mewujudkan kepercayaan dan rasa aman bagi kehidupan masyarakat. Strategi pemberdayaan diturunkan lebih lanjut menjadi dua upaya, yakni pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan produktivitas (Agustian, 2005, h. 207).

Agustian (2005, p. 121) mengemukakan tiga strategi yang digunakan : 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Sudut pandangnya adalah bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya. 2. Memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat (pemberdayaan). Dalam kerangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret, memberikan penyediaan berbagai sarana dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang

yang akan membuat masyarakat lebih berdaya. 3. Pemberdayaan yang berarti melindungi. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah merupakan hal yang mendasar dalam upaya pemberdayaan rakyat. Melindungi dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dalam implementasinya strategi ini mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Strategi pertama cocok untuk masyarakat yang relatif maju (perkotaan). Strategi kedua sesuai dengan kondisi kelompok masyarakat yang masih tertinggal (pedesaan).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari peran pendamping dengan berbagai fungsinya.

#### 2.1.5.3. Peran – Peran dalam Pemberdayaan Pendamping

Pendampingan dilakukan oleh para pelaku perubahan, berikut adalah berbagai peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat, peran pelaku perubahan sebagai *community worker* dalam suatu proses intervensi komunitas menurut Spregel (1975), Zastrow (1986) dalam Adi (2008, h. 141-148) sekurang-kurangnya terdapat 7 (tujuh) peran yang dapat dikembangkan oleh *community worker* antara lain : 1) pemercepat perubahan (*enabler*), 2) perantara (*broker*), 3) pendidik (*educator*), 4) tenaga ahli (*expert*), 5) perencana sosial (*social planner*), 6) advokat (*advocate*) dan 7) aktivis (*activist*). Peran *community worker* dalam Adi (2003, h. 95-96) sebagai berikut :

##### a. Pemercepat perubahan (*enabler*)

Sebagai *enabler*, seorang *community worker* membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka serta mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. peran sebagai *enabler* ini adalah peran klasik dari seorang *community worker*. Dasar filosofis dari peran ini adalah “*help people to help themselves*”.

Adapun empat fungsi utama yang dilakukan *community worker* sebagai pemercepat perubahan (*enabler*) adalah:

- Membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka;
- Membangkitkan dan mengembangkan organisasi dalam masyarakat

- Mengembangkan relasi interpersonal yang baik;
- Memfasilitasi perencanaan yang efektif.

b. Perantara (*broker*)

Peranan seorang perantara (*broker*) terkait erat dengan upaya menghubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat, tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Peran sebagai perantara, yang merupakan peran mediasi dalam konteks pengembangan masyarakat juga diikuti dengan perlunya melibatkan klien dalam kegiatan penghubungan ini.

c. Pendidik (*educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan. Disamping itu ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan. Dalam kaitan dengan hal ini, seorang *community worker* tidak jarang harus menghubungi rekan dari profesi lain yang menguasai peran tersebut. Aspek lain dari peran ini adalah keharusan bagi seorang *community worker* untuk selalu belajar. Karena apabila seorang *community worker* merasa sudah tidak perlu belajar mengenai topik yang akan dibicarakan, maka ia mungkin akan terjebak untuk menyampaikan pandangan yang kurang *up to date* dan kurang menjawab tantangan ataupun masalah yang muncul pada waktu itu.

d. Tenaga Ahli (*Expert*)

Peran sebagai *expert* mempersyaratkan adanya kemampuan untuk dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai ranah.

e. Perencana Sosial

Peran perencana sosial membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data tentang permasalahan sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisis dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut.

f. Advokat

Peran advokat mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan atau pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan atau layanan tersebut tidak mempedulikan (bersifat negatif atau menolak tuntutan warga).

g. Aktifis

peran aktifis menuntut pelaku perubahan untuk melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan seringkali tujuannya adalah pengalihan sumberdaya atau kekuasaan (power) pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan (disadvantage group), yang dianggap sebagai korban.

Peran Masyarakat

Adi (2008), menyederhanakan partisipasi masyarakat dalam pengertian berikut: Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (p.111).

Pentingnya partisipasi dalam pembangunan menurut Conyers (1991, h. 154-155) ada 3 alasan utama yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta program-program yang gagal.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Kepercayaan semacam ini penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.
- c. Karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Mikkelsen (2005:54) mengutip Chambers (2002) dalam Adi (2008, p.108) melihat partisipasi sering dipergunakan dalam tiga bentuk berikut :

1. Partisipasi digunakan sebagai label kosmetik, agar proyek yang diusulkan terlihat menarik sehingga lembaga donor dan pihak pemerintah mau membiayai proyek tersebut.
2. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan praktik mengkooptasi. Dalam hal ini partisipasi digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga di tingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek.
3. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan (*empowering Process*). Partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memampukan (*enable*). Masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah.

#### 2.1.5.4. Kendala-Kendala dalam Pemberdayaan

Dalam pelaksanaannya, peningkatan partisipasi masyarakat cenderung mengalami hambatan dari berbagai faktor. Conyers (1991, h. 186) menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi tersebut sebagai berikut :

Faktor pertama yaitu hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri. Nyata sekali bahwa masyarakat tidak akan berpartisipasi atas kemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir.

Faktor kedua yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau aktivitas yang direncanakan tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

Dalam memahami kendala didalam proses pemberdayaan berikut disajikan teoritis kendala menurut Watson, dengan buku *Planning Of Change* edisi kedua dalam Adi (2008, P. 259-274), mengemukakan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas yang secara garis besar dibagi dua, yaitu kendala yang berasal dari diri individu dan kendala yang berasal dari sistem

sosial, kendala ini yang dapat menghambat terjadinya suatu perubahan (pembangunan). Kendala-kendala tersebut adalah:

1. Kendala yang berasal dari kepribadian individu

a. Kestabilan (Homeostatis)

Homeostatis merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan (stabilizing forces) dorongan-dorongan dari luar. Oleh karena itu, suatu proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat membuat perubahan yang permanen pada diri individu.

b. Kebiasaan (Habit)

Faktor internal lain yang dapat menghambat suatu perubahan adalah faktor kebiasaan. Setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan (otonomi fungsional).

c. Hal yang Utama (Primacy)

Bila tindakan pertama yang dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi suatu situasi tertentu, ia cenderung mengulangnya pada saat yang lain (ketika menghadapi situasi yang sama).

d. Seleksi Ingatan dan Persepsi (Selective Perception and Retention)

Penyeleksian persepsi yang ada dapat membantu community worker dan masyarakat dalam mengambil keputusan. Tetapi di sisi yang lain penyeleksian ini dapat pula menghambat perubahan yang akan terjadi

e. Ketergantungan (dependence)

Ketergantungan terhadap seseorang dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Bila dalam suatu kelompok masyarakat terlalu banyak orang yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain maka proses 'pemandirian' masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan.

f. Superego

Superego yang terlalu "kuat" cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaruan dan kadangkala menganggap pembaruan sebagai suatu hal yang tabu.

g. Rasa Tidak Percaya Diri (Self-Distrust)

Rasa tidak percaya diri merupakan konsekuensi dari ketergantungan pada masa kanak-kanak yang berlebihan, serta dorongan dari superego yang terlalu kuat. Rasa tidak percaya diri yang tinggi juga membuat seseorang tidak yakin akan kemampuannya sehingga berbagai potensi yang dimilikinya sulit untuk muncul ke permukaan.

#### h. Rasa Tidak Aman dan Regresi (Insecurity and Regression)

Faktor internal lain yang dapat menghambat partisipasi yang efektif adalah kecenderungan untuk mencari “rasa aman” yang ia peroleh di masa lalu. Mereka merasa bahwa perubahan yang akan terjadi justru akan dapat meningkatkan “kecemasan dan ketakutan” (anxiety) mereka. Berdasarkan hal ini mereka menjadi pihak yang cenderung untuk menolak pembaruan.

#### i. Faktor Predisposisi (Predisposing Factors)

Faktor predisposisi merupakan sesuatu yang muncul sebelum (antecedents) perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan seseorang.

### 2. Kendala yang Berasal dari Sistem Sosial

#### a. Kesepakatan terhadap Norma Tertentu (*Conformity to Norms*)

Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis ‘mengikat’ sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Pada titik tertentu, norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaruan) yang ingin diwujudkan. Misalnya pada komunitas yang mempunyai norma yang menhalalkan perjudian, minuman keras, dan prostitusi. Maka akan sulit bagi pelaku perubahan untuk merombak norma tersebut.

#### b. Kesatuan dan Kepaduan Sistem dan Budaya (*Systemic and Cultural Coherence*)

Perubahan pada suatu system social ataupun budaya yang sudah begitu menyatu pada masyarakat tentunya akan sangat sulit dilakukan. Karena komunitas sasaran sudah terbiasa dengan sistem sosial dan budaya yang ada.

#### c. Kelompok Kepentingan (*Vested Interests*)

Adanya berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat karena

mereka cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan, dan memperluas asset yang mereka miliki tanpa memerhatikan kepentingan kelompok lainnya.

d. Hal yang Bersifat Sakral (*The Sacrosanct*)

Salah satu yang mempunyai nilai kesulitan untuk berubah yang cukup tinggi adalah ketika suatu teknologi ataupun program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap 'sakral' dalam suatu komunitas.

e. Penolakan terhadap "Orang Luar" (*Rejection of "Outsiders"*)

Dari sudut pandang psikologi dikatakan bahwa manusia mempunyai sifat yang universal, salah satunya adalah ia mempunyai rasa curiga dan rasa "terganggu" (*hostility*) terhadap orang asing. Oleh karena itu, seorang *social worker* harus mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik agar ia tidak menjadi "orang luar" dalam masyarakat tersebut.

f. Faktor Penguat Perubahan (*Reinforcing Factors*)

Factor penguat perubahan adalah sesuatu yang muncul sebelum (*antecedents*) perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud. Faktor penguat perubahan terkait dengan covert (tersembunyi) dan overt (terbuka) behaviour dari pihak yang terkait dengan komunitas sasaran.

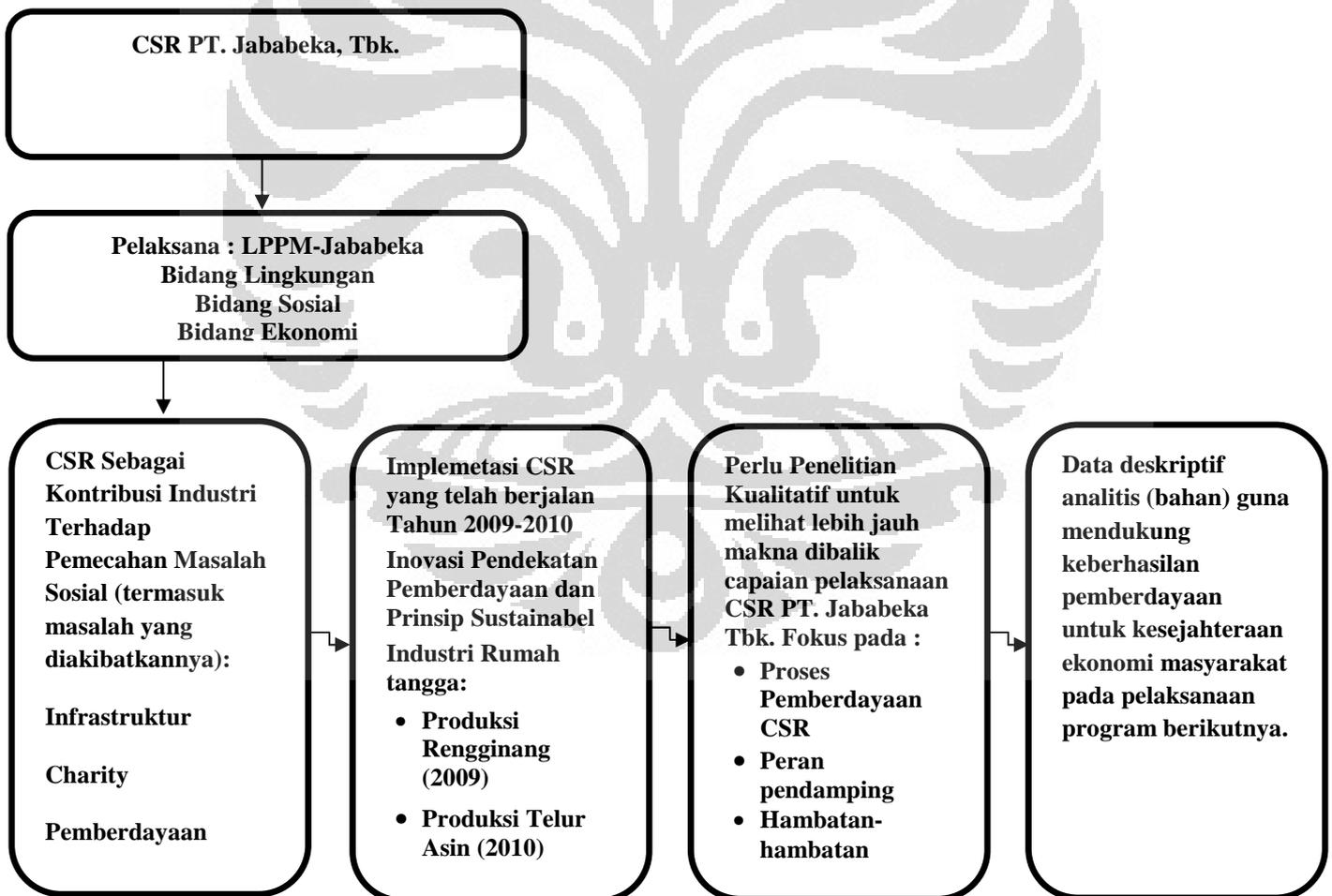
g. Faktor Pemungkin Perubahan (*Enabling Factors*)

Faktor pemungkin perubahan adalah factor yang mengikuti (*subsequent*) suatu perilaku dan menyediakan 'imbalan' (*reward or incentive*) yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut. Termasuk di dalamnya adalah aspek keterjangkauan layanan ataupun ketersediaan pelatihan guna pengembangan keterampilan baru untuk melakukan perubahan.

## 2.2. Kerangka Pikir

Kebijakan ekonomi pembentukan kawasan industri sebagai kawasan pertumbuhan baru oleh pemerintah yang masih dijalankan hingga kini menimbulkan berbagai akibat memerlukan jalan keluar, agar kebijakan berjalan dengan akibat yang dapat juga diatasi. CSR merupakan salah satu jalan bagi kontribusi industri dalam memecahkan masalah termasuk mengeliminasi dampak yang diakibatkannya, konsep CSR telah dilembagakan dalam peraturan formal sehingga pihak korporasi memiliki kewajiban atas pelaksanaannya.

Penelitian ini berpijak pada program CSR PT. Jababeka, Tbk. yang dilaksanakan pada tahun 2009-2010 dengan melihat tiga hal yaitu proses pelaksanaannya, peran dalam Pemberdayaan dan hambatan-hambatan yang muncul dalam proses.



Bagan 1.1. Kerangka Pikir Penelitian

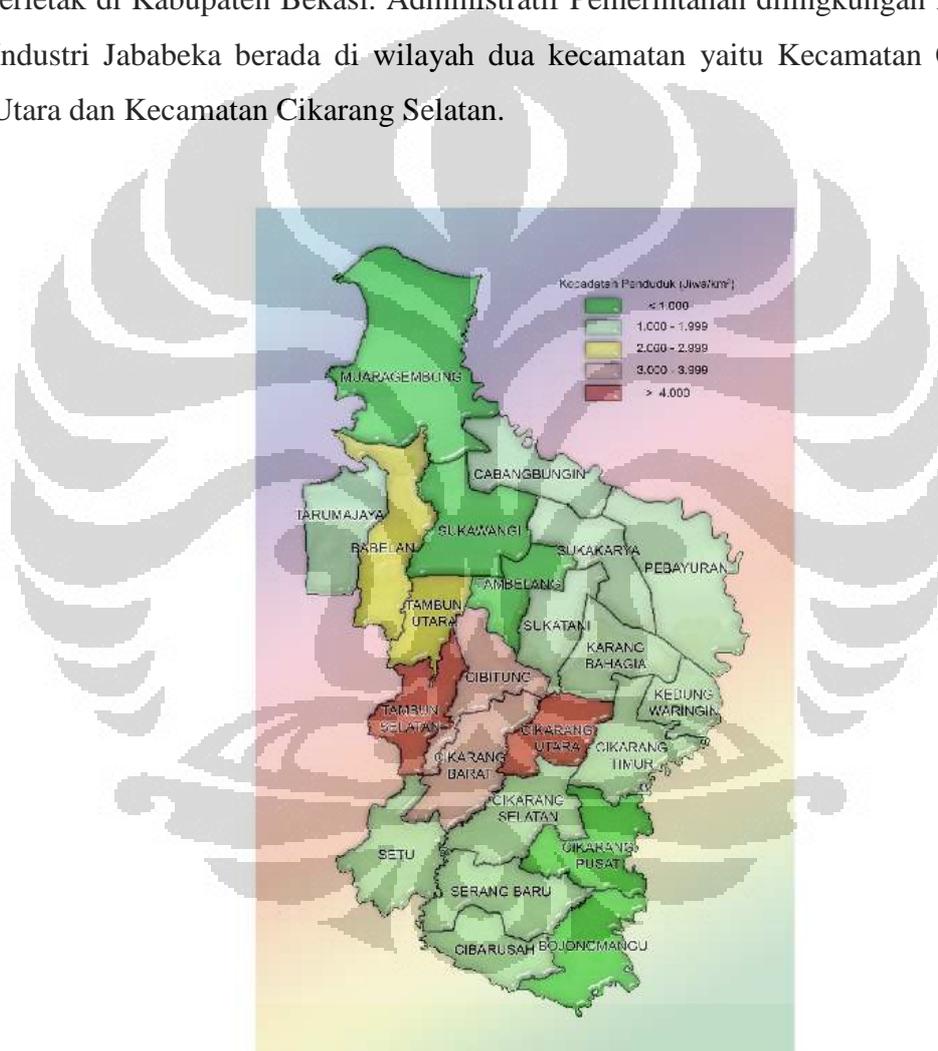
Sumber : Penelitian, 2011

**BAB 3**  
**KAWASAN INDUSTRI JABABEKA DAN PROGRAM *CORPORATE***  
***SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. JABABEKA, TBK.**

**3.1. Kawasan Industri Jababeka**

**3.1.1 Administratif Wilayah**

Kawasan Industri Jababeka merupakan salah satu kawasan industri yang terletak di Kabupaten Bekasi. Administratif Pemerintahan dilingkungan Kawasan Industri Jababeka berada di wilayah dua kecamatan yaitu Kecamatan Cikarang Utara dan Kecamatan Cikarang Selatan.



Gambar 3.1. Peta Kab. Bekasi perkecamatan, kepadatan jumlah Penduduk

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi, 2008.

Kecamatan Cikarang Utara merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk diatas 4000 jiwa per Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Cikarang Selatan memiliki kepadatan penduduk antara 1000 hingga 2000 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kita dapat melihat Kawasan Industri Jababeka dengan membedakan menjadi dua kelompok wilayah yaitu : gambaran kondisi di dalam Kawasan dan kondisi di sekitar Kawasan.

### 3.1.2. Deskripsi kondisi di dalam Kawasan Industri Jababeka

#### 3.1.2.1. Gambaran Umum Kawasan

Kawasan Industri Jababeka adalah merupakan kawasan pertumbuhan dengan sumber tarikan industri. Kawasan pertumbuhan ini kemudian dikenal dengan nama Kota Jababeka. Ciri utama masyarakatnya adalah masyarakat industri perkotaan. Heterogen, dominan pekerjaan dibidang jasa, keahlian sudah terspesialisasi, pendidikan baik,

#### 3.1.2.2. Geografi

Kota Jababeka terletak di 35 Km dari pusat kota Jakarta, tepatnya berada di pusat Kabupaten Bekasi diantara posisi 6° 10' 53" – 6° 30' 6" Lintang Selatan dan 106° 48' 28" – 107° 27' 29" Bujur Timur.

Kota Jababeka berada di sisi jalur tol Bekasi-Cikampek, Wilayah ini dapat dicapai melalui akses dua pintu tol baru, yaitu di kilometer 29 dan di kilometer 34. Bentuk kontur tanah wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian lebih dari 6 meter di atas permukaan laut.

#### 3.1.2.3. Demografi

Populasi penduduk Kota Jababeka sesuai data terakhir tahun 2011 ini mendekati jumlah 1,2 juta jiwa, dengan komposisi penduduk 51% laki-laki dan 49% perempuan. Refleksi angka pertumbuhan penduduk rata-rata tahunan mencapai 1,6% di Indonesia, dengan asumsi satu keluarga memiliki 5 orang anggota maka dapat diperkirakan bahwa pada tahun 2025 mendatang diproyeksikan jumlah penduduk Kota Jababeka akan mencapai hingga 1,5 juta jiwa. (Darma, 2011).

Populasi Kota jababeka cukup moderat, di dominasi oleh usia muda, 58% populasi berada di bawah usia 29 tahun, dan 41% populasi dibawah usia 19 tahun,

50 % populasi berada di usia 20 dan 49 tahun, dan 24 % nya berada di usia 40 tahun atau lebih. Ini artinya golongan usia produktif mendominasi populasi.

Tabel 3.1. : Struktur Usia

Usia	Persentase
0 – 9	20 %
10 – 19	21 %
20 – 29	17 %
30 – 39	19 %
40 – 49	14 %
50 – 59	5 %
60 +	4 %

Sumber : Darma, 2011, h. 10.

Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Jababeka meningkat dengan beberapa alasan, salah satu alasan adalah karena adanya ekspansi dan peningkatan sistem pendidikan. Populasi pelajar dan pekerja meningkatnya suplai makanan dan jaminan kesehatan, berkembangnya infrastruktur dan meluasnya program keluarga berencana. Pada saat yang bersamaan metode pendidikan informal dan meluasnya ketersediaan media menjangkau lebih banyak orang, menjadikan lebih banyak orang mendapatkan informasi. Berbagai kesempatan pekerjaan juga tumbuh dari sektor private.

Tabel 3.2. : Distribusi Tenaga Kerja

Estate Area	SDM (Estimasi)	Persentase Distribusi Tenaga Kerja (%)			
		Management Kunci (entrepreneur)	Management Senior/ Menengah	Supervisor	Blue Collar
Industrial Estate	730.000	5	18	27	50
Commercial Estate	28.000	10	20	30	40

Sumber : Darma, 2011, h. 10

#### 3.1.2.4. Infrastruktur (Pendidikan, Kesehatan)

Pendidikan 12.000 siswa, Infrastruktur pendidikan 16 sekolah, lima terbesar diantaranya President University, SMA President, SMP President, Al-Azhar, dan BPK Penabur. Institusi Pelatihan Kejuruan sebanyak 36 lembaga. Rumah sakit, Klinik, dan pusat medis lainnya sebanyak 56, Pusat Fitness, Aerobic dan Club Olahraga 16 buah.

### 3.1.2.5. Industri, perumahan, area komersial

Total Area Pembangunan Kota Jababeka meliputi wilayah seluas 5.600 Ha. Dengan populasi sebanyak 1.168.000 penduduk. Industri menyerap 730.000 pekerja. Jumlah rumah 31.000 unit. Kawasan ini digunakan oleh 1.500 perusahaan industri.

Investasi Asing mengalir dari 30 negara, 12 negara dengan investasi terbesar diantaranya antara lain : Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Belanda, Jepang, Hongkong, Korea, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Populasi *expatriat* atau tenaga kerja asing di wilayah ini mencapai 4000 orang.

Sebagai sebuah kota yang di desain menjadi Kota Mandiri, Kota Jababeka memiliki infrastruktur sarana Pengolahan Air bersih 2 unit, Sarana Pengolahan Limbah Air 2 unit, 3 perusahaan penyedia jasa layanan listrik antara lain PLN, Cikarang Listrindo dan Bekasi Power. Bandar internasional 1 lokasi, hotel berbintang tiga dan empat sebanyak 9 hotel. Pusat perbelanjaan, Plaza dan Mal sebanyak 28 buah, Kantor polisi dan kantor militer terdiri atas 5.000 tenaga keamanan / personel pengamanan. Transportasi umum Kota Jababeka memiliki 18 lane.

### 3.1.3. Fenomena Pertumbuhan Kota Industri

Kondisi didalam Kawasan Kota Jababeka

#### a. Lingkungan

Isu lingkungan merupakan isu penting dalam Industrialisasi, faktor ini seringkali menjadi bumerang apabila tidak dikelola secara tepat hingga dapat mengancam keberlangsungan industri.

Kota Jababeka meliputi luasan wilayah sebesar 5,600 Ha, dibagi dalam peruntukan industri, pemukiman dan komersial, saat ini telah dibangun untuk area industri seluas 1.840 Ha., peruntukan pemukiman seluas 1.130 Ha, dan untuk area lain yang siap dibangun seluas 2.630 Ha.

Wilayah ini merupakan dataran rendah yang di belah oleh Irigasi Tarum Barat. Irigasi ini terhubung dengan Sungai Kalimalang, Kali Lemah Abang, Sungai Cikarang, dan Sungai Ulu. Selain berguna bagi industri, air dari aliran sungai-sungai ini merupakan sumber pengairan sawah yang merupakan salah satu

andalan pendapatan Kabupaten Bekasi dan juga menjadi sumber air minum dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat sekitar.

Dalam hal limbah buangan berbentuk cair, PT. Jababeka, Tbk. melakukan pengolahan melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) berstandarisasi, dan hanya yang telah diolah dapat di lepas ke lingkungan, sedangkan untuk kebutuhan konsumsi dilakukan IPAB (Instalasi Pengolahan Air Bersih).

Kota Jababeka mendesain sedemikian rupa sehingga industri dapat terintegrasi dengan area pemukiman dan area bisnis dengan memberikan ruang bagi keberlangsungan daya dukung lingkungan, penempatan lubang-lubang biopori sebagai area resapan, termasuk keberadaan sungai, dan pepohonan disekitarnya.

Bangunan gedung untuk industri di Kota Jababeka berbentuk cluster dan dipisahkan dari area pemukiman. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak kebisingan dari mesin industri dan bau yang ditimbulkannya.

Dalam sistem produksinya, industri menggunakan energi yang bersumber dari dua pemasok listrik swasta yaitu, PT. Cikarang Listrindo, dan PT. Bekasi Power. Sehingga tidak tergantung dengan pasokan listrik dari PLN yang juga dipergunakan oleh masyarakat.

Aktifitas perkantoran industri dilaksanakan sesuai jam kerja biasa yaitu Pk.07.30 hingga 17.00, sedangkan dalam proses produksi di pabrik-pabrik dilakukan dengan model shift, tergantung kebijakan masing-masing manajemen tenant industri. Sehingga Kota Jababeka merupakan kota yang terus terjaga dengan aktifitas industri sepanjang hari, dengan demikian keamanan diwilayah ini mendapat perhatian serius dari pengembang yang mempekerjakan 500 personel keamanan yang terbagi dalam 5 wilayah penugasan.

Keterkaitan antara pabrik dengan masyarakat sekitar terjadi dalam hal kebutuhannya akan sumber daya manusia sebagai penggerak peralatan industri, interaksi lebih jauh terjadi antara para pekerja industri yang memiliki kebutuhan hidup seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, hiburan, dan lainnya yang disediakan oleh pengembang maupun yang disediakan oleh masyarakat di sekitar Kawasan.

Dalam pengamatan terhadap fasilitas pabrik, seperti tembok pagar pembatas pabrik di beberapa bagian, seperti tampak di wilayah Industri I dan di wilayah Industri Utara, terdapat fenomena graffiti, berupa coretan-coretan berbentuk tulisan dengan cat semprot, demikian juga di wilayah pintu keluar masuk kawasan yang bersebelahan dengan akses pemukiman diluar kawasan, walaupun terlihat kecil dipermukaan, fenomena ini patut dipertimbangkan sebagai tindakan yang memiliki maksud tertentu seperti simbol keberanian dan pesan emosional pelaku.



Gambar 3.2. Aksi corat-coret tembok pabrik

Sumber : Data Penelitian 2011

#### b. Perekonomian

Perekonomian sektor industri ditandai dengan spesialisasi pekerjaan, pekerjaan paling banyak ditawarkan adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, antara lain kebutuhan tenaga kerja untuk management industri kelas menengah, tenaga spesialis, karyawan (buruh), tenaga keamanan, tenaga kebersihan, atau tenaga distribusi atau kelompok pegawai industri. Mereka telah terspesialisasi berdasarkan kebutuhan akan fungsi-fungsi tertentu di dalam industri.

Di sektor kewirausahaan, ditandai dengan tumbuhnya model perekonomian yang sangat tergantung dengan Industri yaitu perekonomian supporting industri di sektor produksi dan jasa dengan berbagai bentuk seperti jasa maintenance peralatan pabrik, keamanan, kebersihan, bongkar-muat,

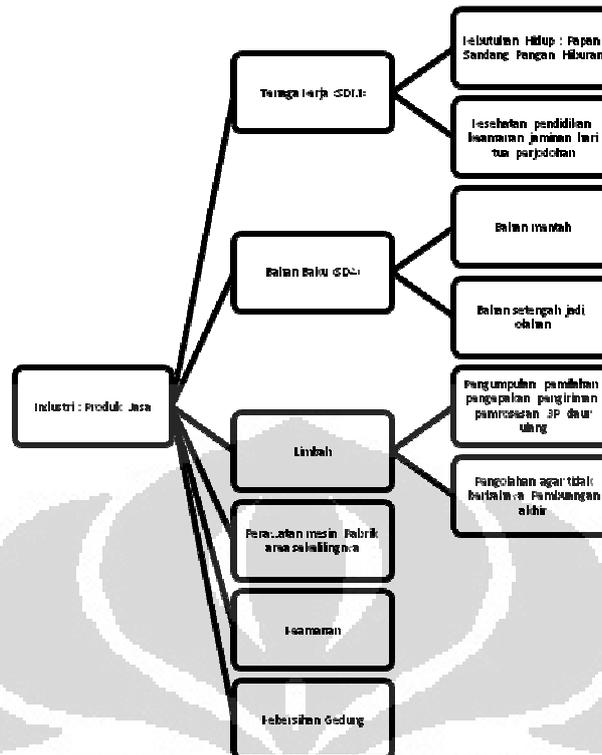
pertamanan, interior, eksterior, meubelair, pengiriman barang, transportasi dan sebagainya, juga usaha dibidang pemenuhan kebutuhan pokok seperti kuliner, hiburan, fashion, kontrakan, laundry, percetakan, teknologi informasi, kesehatan, finance, pendidikan dan masih banyak ragam lainnya, kesemuanya ini sangat tergantung dengan keberadaan industri, artinya apabila terjadi guncangan terhadap industri, maka wirausaha sektor supporting industri inilah yang pertama kali merasakan akibatnya.



Gambar 3.3. Salah satu Bentuk Usaha yang berkembang di Kota Jababeka, Kuliner

Sumber : Data Penelitian 2011

Sedangkan Pengembang mewadahi opportunity ini dalam area komersial yang sengaja ditata dan diperuntukkan bagi para investor yang ingin menanamkan investasinya di Kota Jababeka.



Bagan 3.1. Mata rantai perkembangan ekonomi supporting industri di Kota Jababeka

Sumber : Diolah dari hasil observasi penelitian 2011

### Pendidikan

Kota Jababeka selain dikenal sebagai icon industri, juga memiliki icon pendidikan yang dipersiapkan sebagai tarikan berikutnya yang akan membawa dampak peluang kerja ikutan lainnya yaitu President University.

Pendidikan di dalam Kota Jababeka ditandai dengan tumbuhnya sektor pendidikan swasta yang menyiapkan tenaga untuk kebutuhan industri.

### c. Perumahan dan Sosial

Industri di Kota Jababeka menciptakan tarikan akan tenaga kerja dari berbagai tingkatan manajemen, setiap tingkatan ekonomi memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda. Peluang ini dimanfaatkan oleh pengembang dengan membangun kompleks perumahan dengan berbagai variasi disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Tabel 3.3. Overview of Residential Cluster

No.	Residential Cluster	Number of Units/ Lots
1.	Serta Alam	1.582
2.	Mekar Alam	2.134
3.	Graha Karya	414
4.	Mekar Indah	586
5.	Serta Indah	1.707
6.	Serta Asri	1.740
7.	Buana Asri	1.172
8.	Tropicana Residence	436
9.	Kemang Terrace Golf	13
10.	Graha Asri	4.789
11.	Graha Persada	934
12.	Graha Bhakti	472
13.	Graha Pavilion	86
14.	Tropicana Garden	46
15.	Gardenia	81
16.	Simpruk Garden	139
17.	The Veranda Golf Town House	16
18.	Student Housing Academia	446
19.	Golf Village	408
20.	Ambassador Village	76
21.	The Verranda Extention	36
22.	Metro Park Condominium	2 tower (288 Unit)

Sumber : Darma, 2011, P. 16-17

Dengan demikian dalam kompleks ini terjadi pengelompokan penghuni berdasarkan pada tingkat kemampuan pemenuhan kebutuhan, sehingga setiap cluster dihuni oleh komunitas dengan karakter tertentu yang mencirikan kelas mereka, pengelompokan masyarakat ini juga terjadi dengan adanya rutinitas Jam kerja, kesamaan tempat kerja, kesamaan daerah asal, kesamaan hobby, kesamaan tingkat kedudukan dalam manajemen industri.



Gambar 3.4. Kesibukan Karyawan di pagi hari,  
berangkat ke tempat kerja

Sumber : Data Penelitian 2011

#### 3.1.4. Deskripsi kondisi wilayah di sekitar Kawasan

##### 3.1.4.1. Gambaran Umum

Wilayah yang disebut perseroan sebagai ring satu dan menjadi prioritas kegiatan CSR-nya sebagai berikut : wilayah Kec. Cikarang Utara meliputi desa-desa Wangunharja, Pasir Gombang, Mekar Mukti, Tanjung Sari, Simpangan. Dan di wilayah Kec Cikarang Selatan yaitu Desa Cibatu, dan Sukaresmi.

Tujuh wilayah desa ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kawasan Industri Jababeka. Wilayah-wilayah tersebut merupakan area yang terimbas secara langsung oleh aktifitas industri. Ciri masyarakat di wilayah ini adalah masyarakat peralihan dari perekonomian pertanian ke industri.

##### 3.1.4.2. Geografi dan Administratif

Berdasarkan sumber dari Profil Cikarang Utara dan Cikarang Selatan (2009), sebagai berikut :

Kecamatan Cikarang Utara :

Kecamatan Cikarang Utara memiliki luas sebesar 3.594,22 Ha terbagi menjadi 11 desa, yang terdiri dari: Wangunharja, Harjamekar, Pasirgombang, Mekarmukti, Simpangan, Tanjungsari, Cikarangkota, Karangbaru, Karangasih, Karangraharja, Waluya.

Topografi

Ditinjau dari topografinya, Kecamatan Cikarang Utara termasuk dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 15 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan ruang, sebanyak 48% luas wilayah Kecamatan Cikarang Utara, yaitu 1,868.72 Ha, merupakan kawasan industri. Hal tersebut mendorong terbangunnya permukiman perkotaan di Kecamatan Cikarang Utara seluas 1.868,96 Ha (48%). Penggunaan lahan lainnya, seperti hutan kota/jalur hijau, pertanian, maupun permukiman perdesaan sangat minim, hanya 5% dari luas wilayah Cikarang Utara.

Kecamatan Cikarang selatan.

Secara administratif, Kecamatan Cikarang Selatan yang memiliki luas sebesar 4.906 Ha terbagi menjadi 7 desa, yang terdiri dari Desa Sukasejati, Ciantra, Sukadami, Serang, Sukaresmi, Cibat, dan Pasirsari.

Ditinjau dari topografinya, Kecamatan Cikarang Selatan termasuk dataran yang lebih rendah dari daerah sekitarnya dengan ketinggian rata-rata 15 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan ruang sebanyak 48% luas wilayah Kecamatan Cikarang Selatan, yaitu 2.847,94 Ha, merupakan kawasan permukiman perkotaan. Permukiman perkotaan yang ada juga merupakan bangkitan kegiatan industri di Cikarang Selatan, dengan area seluas 2.310,77 Ha (43%). Penggunaan lahan lainnya, seperti pertanian, hutan kota, maupun permukiman perdesaan sangat minim, hanya 3% dari luas wilayah Cikarang Selatan.

#### 3.1.4.3. Demografi

##### Jumlah Penduduk Kecamatan Cikarang Utara

Berdasarkan data tahun 2008, Kecamatan Cikarang Utara memiliki 142.883 jiwa penduduk, dengan penduduk laki-laki (69.912 jiwa) lebih sedikit daripada perempuan (72.971 jiwa). Persebaran penduduk di Kecamatan Cikarang Utara tidak merata, penduduk terkonsentrasi pada wilayah permukiman yang tumbuh berkembang di sekitar kawasan industri. Hal tersebut ditunjukkan oleh kepadatan penduduk pada Desa Cikarangkota (141 jiwa/Ha), Simpangan (68 jiwa/Ha), dan Karangasih (64 jiwa/Ha),

##### Perekonomian Cikarang Utara

Sumber penghasilan utama dari wilayah ini adalah sektor industri pengolahan serta perdagangan besar/eceran dan rumah makan. Kecamatan Cikarang Utara memiliki 180 industri kecil yang sebagian besar merupakan

kerajinan rumah tangga yang tersebar di seluruh desa. Bentuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang cukup berkembang di Kecamatan Cikarang Utara adalah kerajinan dari kayu seperti pembuatan perabotan rumah tangga (lemari, kursi, meja), kerajinan dari logam, dan industri makanan. Berkembangnya industri kecil dan kerajinan rumah tangga di Kecamatan Cikarang Utara didukung oleh keberadaan Kawasan Industri Jababeka.

Selain itu sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang merupakan kebutuhan dari kegiatan industri juga turut memberi kontribusi sebesar 5% bagi PDRB, sedangkan sektor lainnya menunjukkan kontribusi yang sangat kecil. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor industri cukup stabil dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Cikarang Utara digerakkan oleh sektor industri pengolahan.

#### Kependudukan Kecamatan Cikarang Selatan

Berdasarkan data tahun 2008, Kecamatan Cikarang Selatan memiliki 70.840 jiwa penduduk, dengan penduduk laki-laki sebesar 34.399 jiwa relatif lebih sedikit dari penduduk perempuan yang berjumlah 36.441 jiwa. Persebaran penduduk di Kecamatan Cikarang Selatan relatif merata, penduduk tersebar di seluruh desa yang sumber penghasilan utama penduduknya dari sektor jasa dengan kepadatan penduduk berkisar antara 12 – 23 jiwa/Ha. Namun, pada Desa Sukajati yang sumber penghasilan utama penduduknya dari sektor pertanian hanya berkepadatan penduduk 3 jiwa/Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah yang menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti jasa maupun industri pengolahan, cenderung dipilih oleh penduduk untuk bertempat tinggal.

#### Perekonomian Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Selatan memiliki 133 industri kecil yang sebagian besar merupakan kerajinan rumah tangga yang tersebar di seluruh desa. Bentuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang cukup berkembang di Kecamatan Cikarang Selatan adalah kerajinan dari kayu seperti pembuatan perabotan rumah tangga (lemari, kursi, meja, dan sebagainya), kerajinan dari logam, kerajinan dari kain, dan industri makanan. Berkembangnya industri kecil dan kerajinan rumah tangga di Kecamatan Cikarang Selatan didukung oleh keberadaan Kawasan

Industri. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor industri cukup stabil dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Cikarang Selatan digerakkan oleh sektor industri pengolahan.

#### 3.1.4.4. Infrastruktur

##### Infrastruktur Kecamatan Cikarang Utara

Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik bagi rumah tangga di Kecamatan Cikarang Utara disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sudah menjangkau hampir seluruh rumah tangga, jumlah pelanggan listrik mencapai 38.445 yang didominasi pelanggan rumah tangga di Desa Karangasih dan Simpangan. Pada Kawasan Industri kebutuhan listriknya dipasok seluruhnya oleh Perusahaan Listrik Swasta. Dalam hal penyediaan air bersih, sebagian besar kebutuhan rumah tangga sudah dapat disuplai oleh PDAM yang memproduksi sebesar 8.170 m<sup>3</sup> dan mendistribusikan air sebanyak 7.722 m<sup>3</sup>. Sampai dengan tahun 2008, jumlah rumah tangga termasuk kegiatan industri dan bisnis yang menggunakan PDAM sebanyak 16.724 pelanggan. Di sisi lain, penyediaan air bersih pada Kawasan Industri dilakukan oleh pihak swasta.

Dari sisi sarana telekomunikasi, sampai dengan tahun 2008 baru 5.283 pelanggan yang sudah terlayani oleh PT. Telkom yang sudah menyebar di seluruh desa di Kecamatan Cikarang Utara. Penggunaan telepon kabel yang merata hingga seluruh desa menunjukkan tingkat komunikasi yang tinggi karena berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Cikarang Utara. Berkembangnya sarana dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cikarang Utara juga ditunjukkan dengan penempatan 55 BTS yang tersebar pada seluruh desa, dengan konsentrasi pada Desa Mangunraharja dan Harjamekar yang memiliki pelanggan terbanyak dan merupakan pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan, penggunaan jaringan internet juga sudah cukup meluas terutama di daerah-daerah yang merupakan pusat perekonomian, seperti pada kawasan industri dan sentra-sentra bisnis.

Pada umumnya, ketersediaan prasarana jalan sudah cukup baik, terutama dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Ditinjau dari kondisi permukaan jalan pada 2008, dari jalan di Cikarang Utara sepanjang 39,04 km, sebagiannya

telah dilakukan perkerasan beton dan sebagiannya lagi sudah dilakukan perkerasan aspal. Banyaknya kendaraan berat yang melewati jalan-jalan di Kecamatan Cikarang Utara mengakibatkan kualitas jalannya terus menurun, sehingga diperlukan peningkatan pengelolaan dan perbaikan secara berkelanjutan. Kondisi ketersediaan prasarana jalan tersebut dapat dinilai cukup baik, terutama bagi kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan, ditinjau dari sarana angkutannya mayoritas daerah di Kecamatan Cikarang Utara dapat dijangkau dengan angkutan umum dan ojeg motor. Kondisi lalu lintas di Kecamatan Cikarang Utara sangat ramai terutama pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi seperti pada daerah Kawasan Industri Jababeka dan sekitarnya.

#### Infrastruktur Kecamatan Cikarang Selatan

Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik bagi rumah tangga di Kecamatan Cikarang Selatan disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sudah menjangkau hampir seluruh rumah tangga. Pada tahun 2008, jumlah pelanggan listrik mencapai 20.728 yang penggunaannya merata di seluruh desa. Sedangkan kebutuhan listrik pada Kawasan Industri dipasok seluruhnya oleh Perusahaan Listrik Swasta yaitu PT. Cikarang Listrindo. Dalam hal penyediaan air bersih, sebagian besar kebutuhan rumah tangga sudah dapat disuplai oleh PDAM yang memproduksi sebesar 113.271 m<sup>3</sup> dan mendistribusikan air sebesar 107.674 m<sup>3</sup>. Sampai dengan tahun 2008 tercatat terdapat 11.772 pelanggan PDAM yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga. Pada Kawasan Industri kebutuhan air juga disuplai oleh pihak swasta.

Sampai dengan tahun 2008 baru 4.040 pelanggan di 6 desa, terkecuali Desa Sukajati yang relatif terpencil dan belum terlayani oleh telepon kabel. Berkembangnya sarana dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cikarang Selatan juga ditunjukkan dengan penempatan 49 BTS yang tersebar pada seluruh desa, dengan konsentrasi pada Desa Sukaresmi dan Pasirsari yang memiliki pelanggan terbanyak dan merupakan pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan, penggunaan jaringan internet juga sudah cukup meluas terutama di daerah-daerah yang merupakan pusat perekonomian, seperti pada Kawasan Industri.

Pada umumnya, ketersediaan prasarana jalan sudah cukup baik, terutama dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Berdasarkan administratif jalannya, maka dari panjang jalan 178,0 km, terdapat jalan desa sepanjang 121,5 km dan sisanya merupakan jalan kabupaten dan jalan negara/provinsi. Ditinjau dari kondisi permukaan jalan pada 2008, 70% jalan di Kecamatan Cikarang Selatan sudah dilakukan perkerasan beton, sedangkan sisanya masih merupakan jalan berbutir terutama pada jalan di Desa Sukasejati.

Banyaknya kendaraan berat yang melewati jalan-jalan di Kecamatan Cikarang Selatan mengakibatkan kualitas jalannya terus menurun, sehingga diperlukan peningkatan pengelolaan dan perbaikan secara berkelanjutan. Kondisi ketersediaan prasarana jalan tersebut dapat dinilai masih kurang baik, terutama bagi kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan pusat kegiatan ekonomi. Kondisi lalu lintas di Kecamatan Cikarang Selatan cukup ramai terutama pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi seperti pada daerah Kawasan Industri dan sekitarnya.

### 3.1.5. Kondisi disekitar Kawasan Industri Jababeka

#### a. Lingkungan

Di sekitar Kawasan Industri Jababeka selain terdapat desa-desa yang berbatasan juga terdapat beberapa kawasan industri lainnya yaitu : MM 2100, Delta Mas, LIPPO Cikarang, Hyundai, EJIP dan Bekasi Fajar.



Gambar 3.5. Lokasi Kawasan Industri Lain di Sekitar Kota Jababeka

Sumber : Diadaptasi dari Holtorf, Gunther W.(2005), Peta Jakarta : Jabodetabek, Street Atlas and index Cartografi Version 2.0, CD-Rom 2005/06, Huber Kartographie : Munchen

Ketujuh Kawasan Industri ini juga memiliki tanggungjawab sosial atas permasalahan yang terjadi di sekitarnya.

Selain terdapat lingkungan perumahan penduduk yang tertata dengan baik dan rapi, namun seperti juga lingkungan perkotaan yang sedang tumbuh lainnya, disini juga terdapat area perumahan yang padat dan area kumuh khas perkotaan. Di daerah ini berdiri rumah-rumah kontrakan dan kos-kosan, masyarakat menyebutnya sebagai daerah “kontrakan seribu pintu”. Para karyawan industri yang berasal dari luar daerah yang tidak tertampung di kompleks industri, atau dengan alasan agar lebih berhemat atau karena memang kemampuan finansialnya terbatas, mereka lebih memilih untuk tinggal di daerah ini, yang memang relatif lebih terjangkau dibandingkan di kawasan perumahan yang disediakan oleh pengembang.



Gambar 3.6. Usaha Kontrakan dan masalah sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik

Sumber : Data Penelitian 2011

#### b. Perekonomian

Tanpa melihat apakah masyarakat pendatang atau asli Bekasi, dilihat dari aktifitas ekonomi berhubungan dengan industri, terdapat tiga kelompok ekonomi masyarakat di daerah sekitar kawasan industri Jababeka, antara lain pertama, masyarakat setempat yang menikmati keberadaan industri dan terlibat dalam aktifitasnya (seperti kontrakan, pengelola limbah, sebagai tenaga kerja tetap di industri), kelompok ini bekerja disektor supporting industri, mereka ini kelompok masyarakat yang bisa menyesuaikan diri dengan baik dengan keberadaan industri, dan sangat tergantung dengan keberadaan industri.

Kedua, kelompok masyarakat yang lebih memilih jalur kewirausahaan di sektor pertanian dan tidak berhubungan dengan kawasan industri (sektor jasa, perdagangan dan industri kecil), mereka berupaya menciptakan lapangan kerja sendiri dengan berbagai kreatifitas, kelompok ini relatif stabil dan terjamin keseimbangan ekonominya. Kelompok ini relatif independent dan tidak tergantung keberadaan industri.

Namun ada sebagian yang lain yang tidak dapat mengikuti pola industri yang menghendaki standar tertentu untuk aktifitasnya (spesialisasi, standar pendidikan, keterampilan, usia) kelompok ketiga ini antara lain : masyarakat dengan karakteristik kisaran usia diatas 27 tahun, tingkat pendidikan antara SD

dan SMP, tidak memiliki keterampilan yang spesifik dan hanya mengandalkan tenaga. Mereka ada yang tertampung disektor informal sebagai contoh menjadi tukang ojek, tenaga buruh kasar, dan ada yang tergolong sebagai penganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Ketiga kelompok masyarakat ini memiliki pandangan dan harapan yang tersendiri terhadap CSR yang dilaksanakan oleh industri.



Gambar 3.7. Bentuk perumahan penduduk yang padat di luar Kawasan

Sumber : Data Penelitian 2011

#### c. Sosial

Kehadiran industri menarik arus urbanisasi ke kawasan ini, mereka yang mengadu nasib dengan bermodalkan kenekatan membawa kelompok masyarakat ini untuk bertahan hidup dengan mengandalkan sumberdaya seadanya dan mendayagunakan segala pilihan hidup yang dimilikinya untuk dipergunakan, seperti menempati lahan kosong, bekerja serabutan, atau terkonsentrasi di kantung-kantung wilayah dengan berdasar kedekatan etnis, daerah asal, agama atau kesamaan lainnya. Ini dapat dengan mudah kita jumpai di sekitar kawasan industri.



Gambar 3.8. Tumbuhnya daerah kumuh di bantaran sungai dekat kawasan industri

Sumber : Data Penelitian 2011

### **3.2. PT. Jababeka, Tbk. dan Program Corporate Social Responsibility**

#### **3.2.1. PT. Jababeka, Tbk.**

PT. Jababeka, Tbk. adalah merupakan sebuah perusahaan pengembang, bidang usaha perusahaan ini telah berkembang dari semula pengembang kawasan industri menjadi pengembang kota, karena adanya kebutuhan akan fasilitas pendukung seperti hiburan, pendidikan, pusat bisnis, lapangan golf, club bisnis dan fasilitas lainnya.

Bisnis perseroan dibagi dalam 3 segmen, yaitu 1. Real estat, 2. Infrastruktur dan jasa pelayanan, 3. Fasilitas pendukung dan hiburan. Segmen-segmen tersebut saling berkaitan.

##### **1. Real estat,**

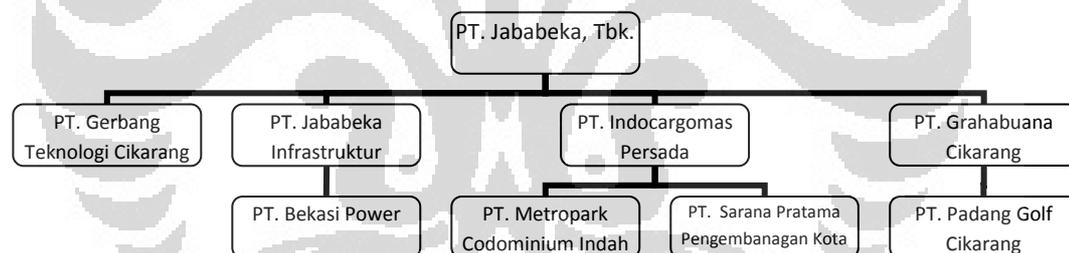
Inti dari bisnis perseroan adalah menjual real estat dan menyediakan berbagai ragam produk bagi pelanggan di kawasan industri, perumahan, dan komersial.

Kawasan industri : Perseroan menyediakan berbagai macam produk industri yang cocok bagi perusahaan multinasional berskala besar, usaha kecil menengah maupun perusahaan kecil. Keunggulan perseroan adalah memberikan solusi pengembangan industri yang komprehensif melalui pelayanan satu atap dan menawarkan antara lain kavling industri dan pabrik siap pakai yang disesuaikan

dengan kebutuhan tipe industrinya. Perseroan memberikan akomodasi bagi industri berskala ringan, hingga menengah di Kota Jababeka dan industri berskala ringan hingga menengah di Kota Jababeka.

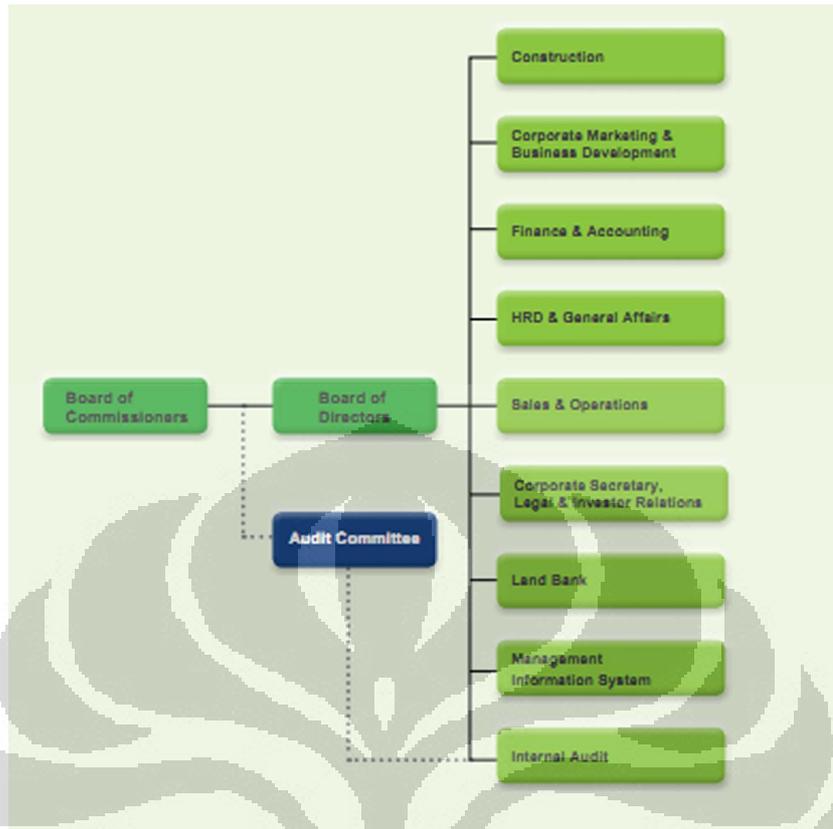
Kawasan Perumahan : Perseroan menawarkan berbagai tipe rumah yang mengakomodir segala tingkat sosial, pembangunan rumah tersebut berkonsep kluster yang dikembangkan sesuai kebutuhan pasar baik individu maupun korporat. Kawasan perumahan perseroan dilengkapi dengan fasilitas yang istimewa, diantaranya lapangan golf, botanical garden dan President Executive Club.

Kawasan Komersial : Produk Komersial terdiri dari ruko hingga lahan untuk komersial di Kota Jababeka. Selain itu lahan ukuran besar terletak strategis didalam kawasan perumahan, juga dapat dijual kepada investor khususnya di educational park, proyek Medical City dan Indonesia Movieland. Perseroan juga menawarkan ruang perkantoran dan area komersial untuk disewakan baik di Kota Jababeka.



Bagan 3.2. Unit Usaha PT. Jababeka, Tbk.

Sumber : PT. Jababeka, Tbk. 2010, h.39.



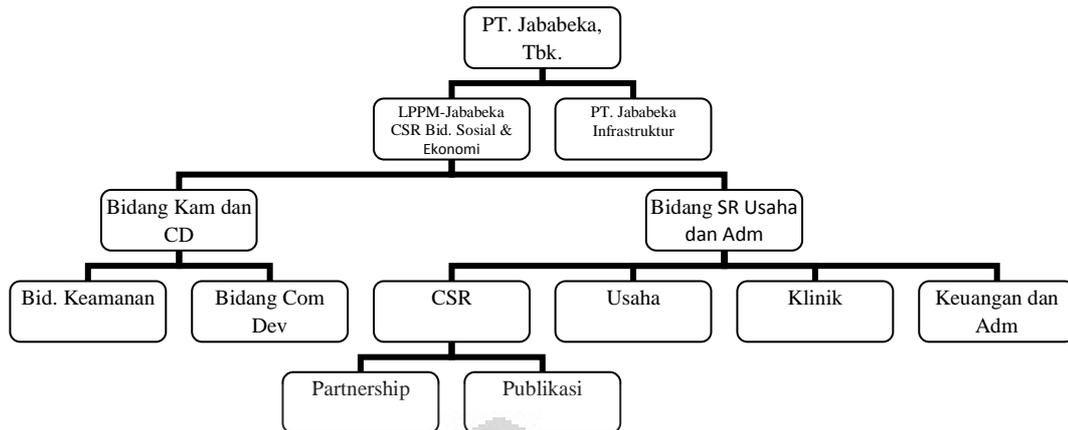
Bagan 3.3. Struktur Perusahaan PT. Jababeka, Tbk.

Sumber : PT. Jababeka, Tbk. 2010, h.39.

### 3.2.2. Program CSR PT. Jababeka, Tbk.

Perseroan berpendapat bahwa keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Keharmonisan antara masyarakat dengan perusahaan dibangun melalui dua arah dalam program pengembangan warga masyarakat desa binaan disekitar wilayah operasi perusahaan.

Dalam pelaksanaan Program CSR PT. Jababeka, membentuk sebuah unit lembaga yang diketuai setingkat Direktur bernama LPPM-Jababeka. Adapun struktur lembaga dan mekanismenya dalam release Direktorat Pemberdayaan Kelembagann Sosial Masyarakat (2009, h. 134-136) adalah sebagai berikut :



Bagan 3.4. Struktur Organisasi CSR PT. Jababeka, Tbk.

Sumber : Jababeka, 2009 dan Direktorat Pemberdayaan Kelembagann Sosial Masyarakat (2009, h. 134)

CSR Jababeka meliputi tiga bidang yaitu bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dengan mekanisme sebagai berikut :

#### Bidang Lingkungan

CSR Bidang Lingkungan ditangani oleh PT. Jababeka Infrastruktur yang dipimpin oleh seorang General Manager. Departemen pelaksana yang terkait dengan CSR bidang lingkungan adalah Dept. Waste Water Treatment Plant (WTP), dan Dept. Environmental Monitoring dan Dept. Estat management.

Kegiatan CSR bidang lingkungan fokus pada pengolahan air limbah, penyediaan air bersih, pemantauan potensi pencemaran lingkungan dan pemeliharaan tanaman/ landscape.

#### Bidang Sosial

CSR Bidang Sosial ditangani oleh lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) dalam hal ini adalah Departemen Community Development, terdiri dari satu orang Senior Manager yang membawahi Seksi Community Development dan tiga orang staf dan seksi Customer Care Residential yang juga memiliki tiga orang staf.

Departemen Com.Dev. Fokus pada pembinaan relationship dengan tokoh masyarakat dan aparat desa/ kecamatan, dan melakukan program-program sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugasnya departemen Com.Dev. dibantu dan berkoordinasi dengan Divisi Keamanan dan Klinik LPPM.

#### Bidang Ekonomi

CSR bidang Ekonomi juga ditangani oleh Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) dalam hal ini adalah Departemen Corporate Social Responsibility (CSR). Dept. CSR terdiri dari satu orang senior manager dengan dibantu oleh tiga orang staf.

Dalam kegiatannya Dept. CSR fokus pada tiga aspek yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat, menjalin partnership dengan tenant dan publikasi kegiatan CSR. Dalam pelaksanaan tugasnya Dept. CSR dibantu dan berkoordinasi dengan Dept. Com.Dev. dan Dept. Usaha.

Program CSR PT. Jababeka, Tbk. 2009-2010

Secara keseluruhan dalam rilis Annual repport PT. Jababeka, Tbk tahun 2009 dan 2010 program CSR PT. Jababeka, Tbk. 2009-2010 digambarkan sebagai berikut : Latar Belakang

- Tuntutan lingkungan global dalam penerapan CSR.
- CSR merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
- Mencerdaskan kehidupan berbangsa.
- Perubahan konsep CSR yang bersifat sustainable Development
- Harapan masyarakat terhadap perusahaan dapat memberikan manfaat untuk mereka.

Visi : Menjadi pengembang kota terbaik dan terpercaya

Misi : Terpercaya, profesional dan selalu berjuang untuk melampaui harapan Program-program tanggungjawab sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat bertujuan untuk :

- a. Menjembatani modernitas kawasan industri dengan masyarakat dan lingkungannya.
- b. Pengembangan usaha kecil masyarakat
- c. Memberikan peluang kerja bagi ratusan penduduk lokal yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap
- d. Memajukan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM
- e. Mendekatkan akses pelayanan medis bagi warga dengan biaya terjangkau
- f. Mempererat hubungan dengan warga sekitar
- g. Apresiasi atas berbagai kekayaan seni dan budaya yang ada ditengah masyarakat

**Universitas Indonesia**

- h. Memudahkan pengelolaan dan pengendalian dampak yang timbul dari kegiatan industri, konsep 3R (reduce, recycle, reuse) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan program efisiensi energi sebagai upaya menurunkan efek gas rumah kaca.
- i. Menggerakkan pembentukan klub pecinta tanaman.
- j. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
- k. Membuka akses lapangan kerja industri pada masyarakat
- l. Penyediaan infrastruktur sarana, prasarana pendidikan
- m. Transfer pengetahuan tentang kesehatan pada siswa sekolah
- n. Meringankan penderitaan korban bencana
- o. Menjalin kebersamaan dalam toleransi umat beragama, secara rutin Perseroan berpartisipasi secara aktif dan mendukung kegiatan keagamaan

Sasaran CSR PT. Jababeka, Tbk. yang eksternal adalah masyarakat disekitar Kawasan industri Jababeka.

Bentuk Kegiatan CSR PT. Jababeka, Tbk. Tahun 2009

PT. Jababeka, Tbk. melaksanakan inisiatif-inisiatif tanggungjawab sosialnya melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat untuk menuju kemandirian dalam konteks pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Perseroan menempatkan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai suatu kegiatan yang harus ada dan dilakukan secara konsisten, kepedulian perseroan dijalankan melalui program-program tanggungjawab sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, untuk menjembatani modernitas kawasan industri dengan masyarakat dan lingkungannya.

Berbagai program tanggungjawab sosial dilaksanakan perseroan secara terintegrasi dan melibatkan komunikasi intensif dengan seluruh elemen pemangku kepentingan yang terlibat, tidak saja dengan berbagai unsur masyarakat tetapi juga institusi eksternal dan pemerintah daerah setempat, agar program yang digulirkan tepat sasaran dan membawa manfaat terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan.

Tahun 2009 perseroan telah mengembangkan program-program pengembangan masyarakat yang memberi kontribusi positif bagi masyarakat dengan tujuan utama untuk :

1. Meningkatkan peluang usaha, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
2. Menyediakan akses dan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, keagamaan, seni dan budaya serta pemeliharaan lingkungan.

Inisiatif sosial perseroan sepanjang 2009 difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Perseroan mengeluarkan dana sebesar Rp. 211.999.086 untuk pelaksanaan kegiatan CSR baik yang dilakukan sendiri ataupun kolektif dengan pihak lain.

#### A. Bidang Ekonomi/ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tanggungjawab sosial perusahaan dalam bidang ekonomi difokuskan pada upaya pengembangan usaha kecil masyarakat. Program ini dirancang berdasarkan hasil dari pemetaan sosial dan survei lapangan, meliputi tiga sektor utama dalam roda perekonomian lokal masyarakat komunitas : perikanan, peternakan dan industri rumah tangga dengan bahan baku makanan sebagai produksi utamanya.

Program ini membantu usaha mikro masyarakat di desa-desa sekitar kawasan, mencakup : usaha peternakan kambing, ikan, telur itik, bebek, dan ikan lele, serta usaha kecil pembuatan makanan & kue tradisional.

Perseroan juga menjalin kerjasama dengan institusi eksternal dan pemerintah daerah setempat yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Bekasi dan PT. Ming Horng Asktechnica Industrial dan PT. MTM dengan membantu pengembangan beberapa usaha mikro masyarakat.

Memfasilitasi penyelenggaraan “Pasar Festival” sebagai wahana olahraga, rekreasi dan wisata kuliner bagi masyarakat, kegiatan ini diadakan setiap akhir pekan. Outputnya memberikan peluang kerja bagi ratusan penduduk lokal yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

#### B. Bidang Sosial

Program Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Kepedulian sosial Perseroan dalam bidang pendidikan dilaksanakan untuk memajukan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan meliputi penyediaan sarana-prasarana pendidikan, pelatihan komputer bagi guru SD, beasiswa bagi mahasiswa di President University, serta pemberian kesempatan kerja praktik dan studi banding di kawasan industri dalam program “Kota Jababeka Amazing Tour” bagi siswa dan mahasiswa.

Perseroan juga melakukan sharing program dengan institusi eksternal seperti :

- Perseroan bersama PT. Mattel Indonesia menjalin kerjasama dalam program renovasi sekolah dan pengadaan fasilitas pendidikan
- Program Beasiswa bagi siswa tidak mampu bersama PT. Air Products Indonesia
- Renovasi gedung sekolah dan perbaikan fasilitas pendidikan kerjasama dengan PT. Cikarang Listrindo.
- Program pengecatan ulang gedung sekolah dilakukan bersama PT. International Paint Indonesia
- Kampanye “Safety Riding for Ojek Community” bekerjasama dengan PT. ICI Paints Indonesia

#### Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat

Salah satu kegiatannya adalah Program Pengobatan Murah melalui Klinik YSPK yang didirikan Perseroan, dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan medis bagi warga dengan biaya terjangkau. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari program pengobatan gratis yang telah rutin dilakukan Perseroan.

Program ini telah memberikan pelayanan kesehatan bagi warga desa di wilayah ring 1 Perseroan, dengan melibatkan partisipasi dari PT. Mane Indonesia dan Rumah Zakat Indonesia.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga dilakukan dengan melanjutkan program-program kesehatan masyarakat lainnya, meliputi fogging di daerah rawan wabah dan program peningkatan gizi bagi ibu dan balita. Dilingkup kesehatan sekolah, Perseroan mengadakan program pembinaan UKS di Sekolah

tingkat menengah pertama dan menengah atas di wilayah Cikarang Utara, termasuk membantu pengadaan fasilitas P3K.

#### Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan

Tujuan untuk mempererat hubungan dengan warga sekitar. Perseroan menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada perayaan Idul Fitri 1430 H, Perseroan bekerjasama dengan 30 Tenant dikawasan membagikan paket sembako, dan pembagian hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1430 H, bagi warga tidak mampu di desa-desa sekitar kawasan. Aktifitas lain dalam bidang ini antara lain meliputi penyelenggaraan tabligh akbar, pembinaan terhadap kelompok-kelompok keagamaan, bantuan renovasi sarana ibadah, santunan anak yatim, bakti sosial dan perayaan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional.

#### Pengembangan Seni dan Budaya

Wujud apresiasi atas berbagai kekayaan seni dan budaya yang ada ditengah masyarakat dimanifestasikan Perseroan dengan memfasilitasi pembentukan beberapa komunitas budaya dan pementasan karya-karya seni budaya seperti wayang kulit, gamelan jawa, tari Bali, dan seni karawitan Sunda, melalui pendirian Jababeka Multi Cultural Centre.

Perseroan juga menyelenggarakan kegiatan kebudayaan tahunan “The 2nd International Culture Festival” dengan melibatkan partisipasi dari komunitas budaya lokal, asional dan internasional pada tahun 2009.

#### C. Bidang Lingkungan

##### Pengelolaan Lingkungan

Perseroan secara komprehensif menerapkan program-program pengelolaan lingkungan di dalam dan sekitar kawasan, diantaranya program pollution prevention yang bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan pengendalian dampak yang timbul dari kegiatan industri, konsep 3R (reduce, recycle, reuse) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan program efisiensi energi sebagai upaya menurunkan efek gas rumah kaca.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perseroan melakukan kegiatan antaralain: pembangunan dan pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu dan Instalasi Pengolahan Pengolahan Air Bersih (IPAB), sistem

monitoring terhadap kualitas air limbah; udara; sampah; air tanah dan air permukaan, serta pemanfaatan lumpur hasil proses sebagai bahan baku semen dan kegiatan komposting dari pemanfaatan sampah domestik.

#### Program Pelestarian Alam dan Ramah Lingkungan

Perseroan melalui Jababeka Botanical Garden secara aktif melakukan kegiatan penanaman pohon, salah satunya program “one man one three” bekerjasama dengan Departemen Kehutanan. Jababeka Botanical Garden juga telah menggerakkan pembentukan klub pecinta tanaman.

Kegiatan lainnya adalah pembuatan lubang Biopori, penerapan pupuk organik dan penyelenggaraan lomba kebersihan lingkungan di lingkup Desa sekitar kawasan. Keseluruhan upaya ini merupakan komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Meningkatnya kesadaran konsumen akan kelestarian lingkungan yang lebih baik ditanggapi Perseroan dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, desain rumah dan penataan lansekap yang ramah lingkungan.

#### Bentuk Kegiatan CSR PT. Jababeka, Tbk. Tahun 2010

Kesadaran Perseroan bahwa keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sejak tahun 2009 Perseroan telah melaksanakan program CSR yang bersifat berkelanjutan, dan bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kemampuan yang mereka miliki.

Agar program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran salah satu strategi dalam menjalankan program ini adalah dengan melihat kebutuhan masyarakat yang berkaitan langsung dengan perusahaan.

Keharmonisan antara masyarakat dengan perusahaan dibangun melalui dua arah dalam empat program pengembangan bagi warga masyarakat desa binaan disekitar wilayah operasi perusahaan.

Perseroan mengeluarkan anggaran Rp. 357.000.000,- untuk pelaksanaan kegiatan CSR yang dilaksanakan sendiri dan kolektif dengan pihak lain.

#### A. Bidang Ekonomi

Bidang Peternakan dan Perikanan

Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dalam program peternakan dan perikanan sampai dengan tahun 2010 masih tetap berlanjut, dan program pembiakan bebek petelur dikembangkan lagi menjadi program pembuatan telur asin. Dengan pengembangan usaha dari hulu ke hilir maka akan diperoleh tambahan pendapatan mulai dari penetasan telur itik sampai pembuatan telur asin. Sedangkan untuk perikanan air tawar telah dibentuk kelompok tani pembudidayaan ikan patin dengan memanfaatkan lahan milik Perseroan. Program kemitraan peternakan ini telah membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.

Sharing program bersama dengan tenant industri merupakan program CSR Jababeka yang efektif untuk mensosialisaikan usaha yang dilakukan masyarakat dan berpotensi untuk dikembangkan.

#### Penyediaan Tenaga Kerja

Kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja, Perseroan bekerjasama dengan tenant industri dalam memfasilitasi warga masyarakat yang berkeinginan untuk mencari pekerjaan di pabrik-pabrik. Sebanyak 270 orang telah terserap di beberapa perusahaan tenant Jababeka.

#### B. Bidang Pendidikan

##### Pembangunan Gedung Sekolah

Tahun 2010 Perseroan bekerjasama dengan para tenant industri telah membantu merenovasi dan membangun gedung sekolah dasar disekitar kawasan. Sebanyak tiga sekolah dasar yang masing-masing dibangun tiga unit kelas beserta meubelair.

Pembangunan gedung sekolah ini tidak saja dilakukan disekitar kawasan tetapi juga diluar kawasan seperti bantuan pembangunan kembali gedung sekolah di Padang, Sumatera Barat yang hancur akibat musibah gempa bumi tahun lalu.

Perseroan melakukan sharing program pembangunan gedung sekolah ini secara rutin bersama-sama dengan tenant industri seperti PT. Cikarang Listrindo, PT. Mattel Indonesia, PT. United Tractor Pandu Engineering, Forum Komunikasi Investor Jababeka, dan PT. Mane Indonesia.

#### C. Bidang Sosial

##### Pengobatan Gratis dan Donor Darah

Kegiatan pengobatan gratis yang rutin dilakukan bergantian setiap bulan di desa sekitar untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan. Tahun 2010 sekitar 2000 orang masyarakat sekitar mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan donor darah sepanjang tahun 2010 telah diadakan dua kali dengan diikuti sekitar 600 peserta donor.

#### Pengobatan Murah

Program pengobatan murah dilakukan sejak tahun 2009 untuk menjawab kebutuhan warga sekitar akan layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Sepanjang tahun 2009-2010 sekitar 3.300 pasien telah berobat.

#### Usaha Kesehatan Sekolah

Pembinaan usaha kesehatan sekolah dilakukan untuk memberikan penyuluhan kepada para siswa-siswi tentang pentingnya menjaga kesehatan, pertolongan pertama dalam kecelakaan, bahaya narkoba, pengertian tentang obat-obatan, pemberian peralatan dan perlengkapan P3K.

#### Bantuan Bencana Alam

Ketika banjir melanda kawasan sekitar Cikarang dan Karawang pada awal bulan Maret 2010, Perseroan bersama ormas kepemudaan telah melakukan kegiatan bhakti sosial dengan memberikan sembako untuk membantu korban bencana alam.

Pengumpulan dana dari jajaran pimpinan sampai dengan karyawan diberikan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir Wasiar dan meletusnya gunung Merapi.

#### Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan

Untuk menjalin kebersamaan dalam toleransi umat beragama, secara rutin Perseroan berpartisipasi secara aktif dan mendukung kegiatan keagamaan seperti Tabligh Akbar, dengan memberikan hewan kurban ke tiga belas desa, mengadakan kegiatan bhakti sosial dengan memberikan bantuan sembako untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu, dan mengadakan Gema Ramadhan bersama dengan para tenant industri. Perseroan juga secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI.

#### D. Bidang Lingkungan

Pada bulan Agustus 2010, dalam menjaga kebersihan lingkungan, kelestarian sungai, danbantaran sungai di Kali Ulu, Cikarang, Perseroan dan perusahaan-perusahaan lain yang berada di kawasan Bekasi bersama-sama berpartisipasi melakukan penanaman pohon dan pembersihan sungai.

Perkembangan CSR di tingkat lokal Propinsi Jawa Barat menunjukkan adanya trend peningkatan. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, memfasilitasi perkembangan CSR ditingkat propinsi dengan meluncurkan website [www.csrjabar.com](http://www.csrjabar.com), aktifitas ini mulai dioperasikan pada bulan Januari 2011, berkembang dari layanan SMS Aktivitas CSR antar Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat dengan mitra CSR Jabar, ditindak lanjuti dengan Forum diskusi, pertemuan-pertemuan, Seminar, Rakor CSR di Bappeda Provinsi Jawa Barat, kemudian menjadi situs yang memfokuskan diri pada berita seputar Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki oleh dunia usaha dan dunia industri dan diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan pada pembangunan daerah, inisiatif ini pada awalnya digagas dari Bappeda Propinsi Jawa Barat.

Upaya yang dilakukan antara lain penajaman program-program CSR Jawa Barat melalui inventarisasi data base, Diskusi CSR, penyusunan Leaflet CSR Jawa Barat, penyusunan Peraturan Gubernur Tim Fasilitator CSR Jawa Barat, CSR Gathering. pemerintah Propinsi Jawa Barat juga telah merilis draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Fasilitasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat, (*draft* terlampir).

Adapun bidang yang menjadi fokus perhatian CSR Propinsi Jawa Barat tercantum dalam Bagian kedua pasal 6 draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Fasilitasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat antara lain : a. Pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, b. Kesehatan yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, serta kualitas tenaga kesehatan

yang kompeten, c. Bina Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan, dan d. Peningkatan Daya Beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui agribisnis, pengembangan perikanan serta pengembangan dan perlindungan pasar tradisional.

Dalam inventarisasi yang telah dilakukan oleh Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat ditemukan adanya persepsi Pemerintah Daerah terhadap aktifitas CSR di Jawa Barat sebagai berikut (csrjabar. 2011):

- Terdapat banyak industri/korporasi yang beroperasi di Jawa Barat (ini berarti adanya potensi yang besar dimiliki Jawa Barat)
- Sebagian kalangan swasta telah melaksanakan program “CSR” atau “CSR Like”
- Kondisinya pada saat ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga perlu didorong untuk terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antara Agenda Pembangunan Pemerintah dengan Program CSR kalangan swasta
- Dengan luasnya cakupan wilayah maka pemerintah Propinsi merasa perlu mendorong pengembangan dan perluasan program CSR, melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah

Keterlibatan PT. Jababeka, Tbk dalam CSR di tingkat Jawa Barat dapat dilihat dari keikutsertaannya sebagai Mitra CSR Jawa Barat yang telah dirintis sejak tahun 2011, dan menempatkan perwakilannya dalam CFCD Jawa Barat sejak tahun 2010.

Pengaruh pemerintah pusat dalam pelaksanaan CSR PT. Jababeka, Tbk. dapat ditelusuri dari keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan tersebut antara lain : kegiatan Indonesian CSR Awards tahun 2008 dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.

Pada kegiatan pameran dan workshop kesetiakawanan sosial pada rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada 20 Desember 2010, di Sikuit Sentul Bogor, PT. Jababeka Tbk. tercatat sebagai salah satu perusahaan yang aktif mengikuti, mewakili salah satu perusahaan peserta dari Propinsi Jawa Barat.

## BAB 4

### TEMUAN LAPANGAN

Program CSR PT. Jababeka, Tbk. tidak terlepas dari Grand Design Kota Jababeka secara keseluruhan, ini tampak dalam wawancara peneliti dengan informan SD pejabat senior PT. Jababeka, Tbk,. Mengenai konsep pembangunan Kota Jababeka, SD menuturkan bahwa, “..... pembangunan tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat, .... *Grand Design* daripada Kota Jababeka adalah bagaimana memadukan antara datangnya kapital dari luar negeri dengan bagaimana tumbuhnya kesejahteraan buat rakyat kita.”(Desember, 2011).

Sebagai sebuah perusahaan pengembang kota, PT. Jababeka, Tbk. menganggap masyarakat disekitar kawasan industri sebagai *stakeholder* penting, mereka kemudian mengambil kebijakan membentuk sebuah lembaga LPPM-Jababeka untuk melaksanakan tugas-tugas terkait masyarakat sekitar kawasan termasuk di dalamnya adalah tugas-tugas pelaksanaan CSR ke masyarakat.

“..... di Jababeka, yang terkait dengan masyarakat, teknis dilakukan oleh LPPM (Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat), garis kebijakannya kita mau laksanakan CSR yang menjadi solusi.” (SD, Desember, 2011). Lembaga ini yang kemudian dapat bergerak bebas diantara PT.Jababeka, Tbk, mitra tenant industrinya dan masyarakat. Selain melaksanakan sendiri program CSR milik Jababeka, LPPM-Jababeka juga aktif mengajak kepada para *tenant* industri untuk melaksanakan program CSR secara bersama atau *sharing* program.

Bentuk CSR yang telah dilaksanakan oleh PT.Jababeka, Tbk. dalam program pemberdayaan ekonomi antara lain pada kegiatan Industri rumah tangga pembuatan rengginang pada tahun 2009 dan pemberdayaan ekonomi dengan *sharing* Program pada kegiatan pembuatan telur asin tahun 2010 dengan mitra tenant industri PT. MTM.

#### 4.1. Proses Pemberdayaan Ekonomi

A. Program CSR PT. Jababeka, Tbk. dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan rengginang Tahun 2009.

1) Tahap Persiapan,

CSR PT. Jababeka, Tbk., bidang Ekonomi ditangani oleh Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Jababeka, yaitu bagian Departemen Corporate Social Responsibility (CSR). Departemen CSR terdiri dari satu orang senior manager dengan dibantu oleh tiga orang staf. Dalam kegiatannya Departemen CSR fokus pada tiga aspek yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, menjalin partnership dengan tenant dan publikasi kegiatan CSR. Pada saat pelaksanaan tugasnya Departemen CSR dibantu dan berkoordinasi dengan Departemen *Community Development* dan Departemen Usaha.

“personil kami jumlahnya terbatas, namun untuk pembagian tugas yang dianggap perlu akan melibatkan sebagian petugas dari Jababeka Infrastruktur, ya... saling bantulah...” (WD, Desember 2011).

Sebagian besar kekuatan personil LPPM-Jababeka ada pada Departemen Keamanan untuk menjaga keamanan di dalam kawasan, sedangkan personil untuk pelaksanaan tugas CSR berperan pada manajemen pengelolaan program.

“CSRnya Jababeka memang di tugaskan ke LPPM, Fungsi LPPM ini macam-macam, ada pemberdayaan, pendidikan, kesehatan, ditambah lagi dengan koordinasi dengan desa, lurah, camat fungsi koordinasi, tapi bukan koordinasi kerja, koordinasi untuk komunikasi, menjaga keamanan dilingkup kawasan, jadi persoalan kami disini banyak, tapi kalau dilihat dari struktur, paling tidak terdapat fungsi keamanan, CD (*Community Development*) dan CSR. CD menangani permasalahan di internal seperti perumahan, dan hubungan industrial dan CSR menangani kerjasama program dengan tenant industri dan pemberdayaan.”(DA, Desember 2011).

“.....program untuk satu tahun kedepan harus sudah ada di bulan Desember tahun ini..... antara lain personil, melihat kelompok sasaran, memilih dan menetapkan peserta beserta jumlahnya, menyusun jadwal pelaksanaan, persiapan lain, surat surat, dan pendanaan, penyusunan program juga dilakukan

oleh LPPM.” (WD, Desember, 2011). Ini artinya sebelum memasuki tahun berjalan persiapan program telah selesai dilaksanakan.

Pemilihan dan penentuan sasaran program menurut WD, “.....didasarkan pada apakah mereka memiliki kemampuan (potensi), sehingga mudah bagi kita untuk mengembangkan, potensi-potensi lain yang dimiliki juga menjadi pertimbangan,” (WD, Desember, 2011).

“.....dalam menentukan sasaran , terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak desa, dari kami menyampaikan kriteria sasaran, antara lain sudah memiliki dasar usaha, lebih baik lagi apabila dilokasi yang bersamaan ada beberapa usaha yang sama,” (WD, Desember, 2011).

Langkah-langkah pendahuluan yang dilakukan oleh LPPM seperti dijelaskan DA berikut, “.....sebelum memulai sebuah program LPPM terlebih dahulu melakukan rapat-rapat koordinasi internal, kemudian menugaskan pada petugas yaitu staf CSR untuk turun lapangan, ini dilakukan untuk melihat apa kebiasaan masyarakat .....” (DA, Desember 2011).

“..... kami (LPPM) dari tahap awal pekerjaan melibatkan aparat setempat seperti petugas desa, dan ketua RT yang dimintai masukan tentang sasaran dan kegiatan apa yang cocok dengan masyarakat setempat.....” (DA, Desember 2011).

Keterangan berbeda disampaikan AS, informan Kecamatan Cikarang Utara, “saya tahu, kegiatan itu ada di Desa Pasir Gombang, kami dari Kecamatan biasanya hanya turut mengetahui saja kegiatan-kegiatan CSR yang diadakan oleh LPPM, sedangkan yang lebih tahu secara keseluruhan desa tempat kegiatan dilaksanakan, untuk aktifitas teknis mereka, kami tidak terlibat.”

Tahun 2009 atas rekomendasi dari desa Pasir Gombang, telah dipilih sasaran program yaitu Ibu NS dan Ibu MR. Seperti dituturkan oleh Ibu NS, “....., orang desa yang memperkenalkan saya dengan orang Jababeka, kata dia ada yang kasih modal,”(NS, Januari, 2012). Hal yang sama disampaikan Ibu MR, “..... Orang LPPM diantar orang desa, Pak Sekdes kesini ....., yang atur Pak Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Pasir Gombang, begitu, soalnya dia yang urusan apa, sambung menyambung, Sekdes ama ketua BPD, jadi dia yang urusan.”(MR, Januari, 2012). Pada tahap ini terjalin komunikasi antara LPPM-

Jababeka, Desa Pasir Gombang, BPD Pasir Gombang dan masyarakat yang menjadi sasaran program.

## 2) Tahap Pengkajian

Setelah data dan informasi terkumpul, LPPM kemudian melakukan penelaahan, “dari data usaha rumah tangga yang masuk, rata-rata memiliki aset dan permodalan yang sangat kecil, sehingga ini memungkinkan untuk lebih ditingkatkan lagi kemampuannya..... kami melihat adanya kebutuhan tambahan modal usaha pada kelompok sasaran.....” (WD, Desember, 2011).

Pada tahap ini terdapat usulan- usulan seperti disampaikan WD, “..... usulan pemberian bantuan kredit tanpa bunga kepada kelompok sasaran agar mereka dapat meningkatkan produksinya, dan usulan untuk membuka pasar baru untuk mereka, ..... , produksi kelompok sasaran akan dibantu untuk disalurkan ke koperasi – koperasi tenant industri.” Usulan-usulan yang ada kemudian dibawa ke rapat perencanaan LPPM.

## 3). Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan,

“ada dua pilihan pemberdayaan yang bisa dilakukan, pertama adalah pengembangan yang kedua adalah penumbuhan, alternatif pertama kita tinggal melihat kebutuhan mereka apa, kemudian dipenuhi dan kegiatan berjalan menjadi lebih baik sedangkan alternatif kedua lebih susah pak, ada kerja tambahan, kita pemberitahuan, buat kelompok lebih dahulu, ada pelatihannya, dan ini memerlukan anggaran dan tenaga ekstra.”(WD, Desember, 2011).

“kita sampai saat ini masih melakukan *trial-trial*, dan belajar dari pengalaman untuk pembenahan-pembenahan, sehingga ya kita jalani saja apa yang diperintahkan.” (WD, Desember, 2011).

Pada kegiatan pemberdayaan tahun 2009 salah satunya direncanakan kegiatan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada (usaha pembuatan rengginang), untuk ditingkatkan produksinya dan diberikan alternatif potensi jangkauan pemasaran ke konsumen baru. Bentuk kegiatannya adalah kredit tanpa bunga, “.....pilihan sasaran kelompok usaha rumah tangga produksi rengginang Ibu NS dan Ibu MR. Kunjungan awal dilakukan bulan Desember 2008 oleh

LPPM dan pihak Desa, ini dilakukan sekaligus sebagai penjajagan program.”(AD, Desember, 2011).

#### 4) Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

”Program dimatangkan melalui rapat-rapat internal LPPM, kemudian kami mengajukan usulan ini ke rapat pimpinan (perusahaan) untuk mendapatkan persetujuan, bila disetujui berarti ada anggarannya, bila tidak berarti ada alternatif lain yang mungkin telah disiapkan.....” (AD, Desember, 2011).

Pada saat itu, salah satu kegiatan yang dirumuskan adalah pemberdayaan dengan membuka akses ekonomi pada masyarakat, berupa pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga kepada usaha kecil disetujui untuk dilaksanakan.

“..... tujuan dari program ini adalah memberdayakan masyarakat lokal dengan mengembangkan kegiatan ekonominya, bantuan permodalan kredit usaha diberikan kepada Ibu MR dan Ibu NS tanpa dikenai bunga dan potongan. Sistem pengembalian dengan cara diangsur setiap bulan melalui bagian keuangan Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM)-Jababeka, sedangkan jangka waktu pengembalian dengan angsuran adalah 12 bulan.” (AD, Desember, 2011)

“Pembayaran angsuran akan mulai dibayarkan setelah masa *grace period* 1 bulan (waktu tengat yang diberikan sebagai kelonggaran) dari waktu pemberian bantuan dana, yaitu Januari 2009. besaran nilai angsuran setiap bulan diambil berdasarkan kesepakatan.....” (AD, Desember, 2011).

“Mpok mah bayar bangsa seratus - seratus lima puluh ribu sebulan, dicicil sampe lunas..... ambilnya kan di bagi dua, bangsa dua jutaan ...., bayarnya ya kita ke LPPM sana, anak yang anter....” (MR, Januari 2012).

#### 5) Tahap Pelaksanaan Program atau kegiatan

Penerima manfaat untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi industri rumah tangga pembuatan rengginang adalah kelompok Ibu NS, kelompok ini terdiri dari dua orang yaitu Ibu MR dan Ibu NS.

Awal mula mereka berhubungan dengan program CSR PT. Jababeka, Tbk. menurut Ibu MR, “..... ada pemberitahuan tentang tawaran program datang lewat

orang desa, mereka sama orang desa datang kesini, ditunjukkan sama orang desa, ini ada saudara saya .....” (MR, Januari, 2012).

“disini yang mendapat bantuan baru saya saja, dan kakak saya Ibu NS, kita mah taunya bikin aja, kita tidak tahu disananya dibikin apa (sentra industri makanan kecil), orang LPPM datang pokoknya mah kita siap bikin, Bu MR bikin anu ini-ini-ini, kalau saya sanggup langsung saya kerjakan.” (MR, Januari, 2012)

Proses penerimaan bantuan, “pada awalnya kami dihubungi oleh Pak Sekdes Desa Pasir Gombang, diberi tahu mau apa tidak dikasih pinjaman, tapi tanpa bunga, besarnya waktu itu adalah Rp. 3.000.000,-, sebesar itu juga saya yang minta, karena ditanya butuhnya berapa, dalam perjanjiannya yang masuk kesana ada nama saya dan nama kakak saya Ibu NS, jadi mereka maunya pinjaman ini kita tanggung berdua..... Pencairan anggaran diberikan langsung oleh LPPM ke rumah.” (MR, Januari, 2012)

Keterlibatan Ibu MR dalam program seperti yang dituturkannya, “..... saya tahunya ada yang ngasih kabar dari desa, itu MR dapet bantuan.....” (MR, Januari, 2012)

Sedangkan Ibu NS mengaku hanya ikut-ikutan saja, “.... Ibu mah, ikut-ikutan ajah, itu yang dapet bantuan sebenarnya adik .....”(NS, Januari, 2012)

Bantuan permodalan diberikan secara langsung kepada Ibu MR dan Ibu NS di tempat usaha pembuatan makanan dan kue tradisionalnya di Kp. Warung Kobak, Desa Pasir Gombang. “kasih bantuannya.....mereka datang sendiri kerumah, orang desa sama LPPM” (NS, Januari, 2012).

Mengingat bulan Januari waktu itu adalah masih musim penghujan, dimana panas matahari tidak cukup untuk pengeringan produk rengginang, maka bantuan pinjaman modal tidak langsung dipergunakan, .....“uangnya ya saya simpen dahulu..... kalau sewaktu-waktu perlu kan bisa dipake....” (MR, Januari, 2012). Pada dasarnya Ibu NS dan Ibu MR ini merupakan pengusaha musiman, pekerjaan rutin untuk berproduksi akan intensif dilakukan tiga bulan menjelang ramadhan, untuk waktu di luar ramadhan tergantung adanya pemesanan dan kondisi cuaca, “.... mulai bulan rejab, ruwah dan puasa, pokoknya berkah dah idul fitri, pasti banyak pesenan” (NS, Januari, 2012).

#### 6) Tahap evaluasi dan 7) Tahap terminasi

Hingga saat penelitian dilakukan, LPPM-Jababeka sebagai pelaksana program belum melakukan tahap evaluasi, “kami baru akan melakukan evaluasi atas program-program kami mulai tahun depan (2012), untuk pelaksanaannya biasanya Jababeka mempercayakan pada Tim Konsultan yang di tunjuk. (WD. Desember, 2011).

Sedangkan untuk tahap terminasi, program berjalan dengan sendirinya, dalam hal ini yang dilakukan adalah membuka akses ekonomi berupa ketersediaan modal finansial untuk pengembangan usaha dan pembukaan akses ke konsumen atau pangsa pasar baru di Kawasan Industri, “masa satu kali program adalah satu tahun, artinya setelah masa itu diprediksi modal telah kembali, dan ini bisa digulirkan lagi untuk pengembangan yang baru. Apabila mereka telah berhasil maka akan kita jadikan percontohan, namun tidak semudah yang dibayangkan.” (WD. Desember, 2011).

“kita inginnya program sustain, melihat kondisi sasaran kita agaknya berat, perlu kerja ekstra agar kita bisa maju bersama ....” (WD. Desember, 2011).

“kalau saya melihat, mereka memerlukan banyak hal, terutama peningkatan pengetahuan, namun untuk itu diperlukan pelatihan, bila waktu pelatihan cukup lama kita juga pertimbangkan dari segi biayanya.” (WD. Desember, 2011).

#### B. Program CSR PT. Jababeka, Tbk. dengan pendekatan Pemberdayaan Ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan Telur Asin tahun 2010

##### 1) Tahap Persiapan,

Program CSR, PT Jababeka, Tbk yang dilaksanakan bersama (mitra) dengan perusahaan tenant industri disebut *sharing* program. Kegiatan industri rumah tangga pembuatan telur asin ini merupakan kegiatan *sharing* program, antara LPPM-Jababeka dengan perusahaan tenant industri PT. MTM (Menara Terus Makmur), sebuah perusahaan lokal domestik milik PT.Astra Otoparts,Tbk., yang bergerak dibidang manufaktur suku cadang tempaan untuk kebutuhan industri.

Dalam garis kebijakan perusahaan, PT. Jababeka, Tbk. menginginkan program CSR di kawasan industri untuk dilaksanakan sinergi antar CSR tenant industri yang akan difasilitasi oleh pengembang kawasan, ini dilakukan agar dampaknya lebih terlihat dengan hasil yang lebih luas, “...CSR itu kalau dari Jababeka dari dulu kita kerjakan atas nama pelanggan-pelanggan kita sebab kalau CSR itu dikerjakan oleh masing-masing perusahaan dampaknya itu beda kalau dikerjakan bersamaan, kalau masing-masing perusahaan itu mau nyumbang....., tapi kalau bersama-sama sumbangan itu bisa berbentuk rumah sakit yang baik sekali, atau sekolahan yang baik sekali, demikian juga bila ditujukan untuk pemberdayaan akan lebih luas, karena dana yang disatukan pasti lebih efisien...” (SD, Desember, 2011).

Fasilitasi pengembang untuk pelaksanaan CSR tenant industri adalah dengan dibentuknya LPPM-Jababeka sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri. Di dalam struktur LPPM (Bab 3, h. 74) terdapat bagian partnership, bagian ini bertugas untuk melakukan pendekatan dan kerjasama dengan tenant industri dalam program CSR bersama (*sharing program*).

CSR pemberdayaan ekonomi produksi telur Asin, WD menceritakan, pada mulanya LPPM-Jababeka melakukan pertemuan-pertemuan awal dengan pihak tenant industri, “..... *joint program* ini kami menempuh dua cara, pertama apabila ada pihak tenant industri yang memiliki program CSR, kami menyampaikan surat, apakah program tersebut bisa dilakukan secara bersama. Cara kedua, program dari kami, kami yang aktif mengajak tenant industri untuk terlibat dalam program CSR dengan mendatangi mereka dan memaparkan rencana program bersama yang telah kami susun dulu perencanaannya.”(WD, Januari, 2012).

“..... CSR kawasan itu berbeda dari korporasi lain, ada kekhasan, tidak seperti di Freeport, pertambangan batu bara atau pabrik semen, kita tidak memproduksi seperti itu, produk kita yaitu memberikan rasa aman ke perusahaan dan perumahan, sebagai bentuk jasa. Demikian juga dengan CSR kami, tentu terkait dengan masalah-masalah tersebut.” (AD, Desember, 2011).

“informasi dari desa mengarahkan Dusun Sempu merupakan tempat yang tepat untuk pelaksanaan program, dari desa setempat akan mengumpulkan anak-anak muda dalam mendukung kegiatan .....” (AD, Desember, 2010).

## 2) Tahap Pengkajian

Pengkajian dilakukan dalam rapat-rapat koordinasi bersama, kegiatan industri rumah tangga pembuatan telur asin ini merupakan jenis kegiatan penumbuhan usaha baru, atau menciptakan sentra produksi baru, inisiatif program berasal dari PT. MTM yang di dukung dan di fasilitasi oleh LPPM-Jababeka. Dalam melakukan pilihan program, CSR PT MTM dan LPPM-Jababeka terlebih dahulu melakukan survey terhadap potensi usaha yang telah ada di masyarakat. “...setelah kita mendapat informasi bahwa PT. MTM ingin melaksanakan CSR, kita dukung sepenuhnya dengan memberikan jalan yang sudah kita rintis dengan desa pasir gombang, alternatif lokasi di desa ini karena merupakan wilayah padat terdekat dan ada masyarakat miskinnya yang memerlukan bantuan..... kondisi ini kita paparkan dalam rapat dengan PT. MTM....” (AD, Desember, 2010).

PT. MTM berperan sebagai pemilik uang sebagai modal untuk dipinjamkan, sedangkan LPPM-Jababeka menjadi lembaga koordinasi penyaluran bantuan dan penyiapan event-event yang diperlukan oleh PT. MTM. “....tenantkan urusannya bisnis operasional produksi, tidak untuk mengurus masyarakat, sementara Jababeka mau di posisi mana, karena kita merasa memiliki tanggungjawab kita hadir sebagai advisor dan juga sebagai pelaksanaan juga akhirnya. Dari *tenant* taunya pokoknya bereslah, ini kita ada program ada kontribusi .... dan LPPM sebagai pelaksana”(AD, Desember, 2012).

Pertemuan-pertemuan pendahuluan kemudian dilaksanakan antara pihak terkait (PT. MTM, LPPM-Jababeka) dan pihak Desa Pasir Gombang sebagai lokasi yang akan dijadikan sasaran program. “..... semua pihak terkait kami undang dan kami libatkan dalam program” (AD, Desember, 2011).

Hal lain dikemukakan oleh EC, tokoh dusun sempu, “.....Bapak (Saya) diangkat jadi RT tahun 2009, namun untuk kegiatan bangsa telur asin oleh anak-anak itu (2010) Bapak tidak tahu, ..... mereka dapat ada bantuan langsung

dihubungi dari desa. Sama PT (perusahaan) Penyerahan juga langsung di balai desa kalo tidak salah ya....”(EC, Januari, 2012).

### 3). Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan,

Bentuk program yang direncanakan adalah pembentukan kelompok untuk dilatih pembuatan telur asin, pelatihan pembuatan telur asin dan pemasaran, pemberian modal usaha berbentuk pinjaman tanpa bunga dan membuka akses pasar ke konsumen kantin dan catering pabrik, sebagai pangsa pasar awal adalah di kantin PT. MTM sendiri.

“...kelompok ini merupakan usulan dari Desa Pasir Gombang, menurut mereka anak-anak muda ini siap untuk dilatih, mereka pada waktu itu belum ada pekerjaan tetap, pelatihan dan sosialisasi program pengembangan usaha masyarakat yang dilaksanakan selama satu hari, di Balai Desa Pasir Gombang pada bulan Juni tahun 2010.....” (AD, Desember, 2011).

“kelompok ini diproyeksikan untuk dapat membentuk kelompok lain yang akan membantu mereka dan dapat dilatih oleh mereka sendiri, gambaran pada waktu itu, nantinya akan terbentuk kelompok-kelompok lain dari masyarakat sendiri yang dapat mengambil manfaat modal bergulir dari program ini.” (AD, Desember, 2011).

### 4) Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Usulan dan rumusan jenis usaha industri rumah tangga berasal dari PT. MTM. “usaha pembuatan telur asin dipilih sendiri oleh PT. MTM, ini dimukakan dalam rapat bersama, alasannya karena adanya permintaan pasar yang tinggi atas produk telur asin terutama untuk kebutuhan catering industri di Perusahaan tersebut, adanya pengalaman dari manajemen PT.MTM tentang kebutuhan pasar telur asin yang kontinyu di wilayahnya, alasan lain adalah proses perawatan dan pembuatan yang sangat mudah serta adanya prospek keuntungan yang tinggi dari hasil penjualan produk telur asin.” (WD, Desember, 2011).

Bantuan modal pengembangan usaha diberikan oleh CSR PT. MTM melalui LPPM-Jababeka. Bantuan ini berupa kredit pinjaman lunak yang harus dikembalikan melalui cicilan tanpa bunga. Setelah dana tersebut kembali, dana ini

akan digunakan kembali untuk pengembangan usaha masyarakat lainnya. “...alasan bantuan modal berbentuk kredit tanpa bunga adalah agar sasaran program memiliki tanggungjawab dan ada semangat berjuang untuk mengembalikan, jadi tidak berfikir bahwa itu merupakan uang cuma-cuma.”(WD, Desember, 2011).

##### 5) Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau kegiatan

Bentuk program adalah pembentukan kelompok usaha, pelatihan pembuatan dan pemasaran telur asin, dan memberikan bantuan permodalan kredit tanpa bunga kepada usaha kecil pembuatan telur asin untuk memenuhi pangsa pasar catering di kawasan industri.

Kelompok sasaran dibentuk secara bertingkat, yaitu kelompok pertama sebagai kelompok pendamping dan kelompok kedua sebagai kelompok pekerja. “setahu saya pada waktu itu ada kelompok anak-anak muda yang diketuai oleh ZK, dan yang mengerjakan pembuatan telur asin sehari-hari adalah kelompok Ibu EN, kelompok ini terdiri atas ibu-ibu sini...”(EC, Januari, 2012).

kelompok ZK berperan sebagai kelompok pendamping, untuk kelompok usaha rumah tangga Ibu ER. Tujuan program ini adalah memberdayakan masyarakat lokal dalam mengembangkan kegiatan ekonominya.

Penuturan Ibu EN, “.....dulu bikin telur asinnya disini, yang ngerjain saya (EN), si (NA), Bu (Us), saya ngerjain ini di suruh oleh ZK” (EN, Januari 2012).

Kelompok ZK, kelompok ini terdiri dari tiga orang yang masih muda, yaitu ZK sebagai ketua, AD sebagai bendahara dan EI sebagai pemasaran. Kelompok ini mengurus segala manajemen operasional seperti arus keuangan, penyediaan stok bahan baku dan distribusi pemasaran. Kelompok ini terbentuk setelah sebelumnya diberikan informasi bahwa akan ada bantuan kredit usaha tanpa bunga dari PT. MTM.

“Pelaksanaan CSR PT. MTM dan LPPM-Jababeka juga melakukan pembinaan dalam proses persiapan dan pelaksanaan program dengan memantau kegiatan di lapangan.” (WD, Januari 2012)

“awalnya Ibu menyewakan rumah Ibu untuk pembuatan telur asin, Ibu-ibu sini dilatih sama anak-anak, mereka yang mendapat pelatihan dari PT

(perusahaan), bikin telur asin itu gampang-gampang susah, telur kita kosek dulu (bersihkan), kita rendem dulu, ngredemnya lama sekitar satu minggu lebih hingga sepuluh hari, hasil dikirim ke kantin atau *catering* pabrik, .....”(EN, Januari 2012).

EN menceritakan, “Harga telur perbutir, dijual kira-kira cenggo persatuan (Rp.1500.), sayang sekarang sudah berhenti karena pasokan telur tidak ada lagi, langka, kalau telurnya nggak ada ya kita tidak bisa berproduksi lagi, permintaan ada banyak dari PT. Mereka minta rutin sekitar lima puluh butir sehari.” (EN, Januari, 2012).

Menurut US anggota kelompok EN, “Usaha mengalami bangkrut, dari kiriman telur mentahnya yang langka pak, ini ngandelin dari daerah Selang Sironggeng, pasokan telur mentahnya hanya sedikit, tidak mampu melayani permintaan yang rutin padahal mah kalau katering untuk yang ke PT.-PT itu pasti rutin dan permintaannya banyak. Usaha ini bertahan hingga akhir 2010.” (US, Januari, 2012), Ini berarti usaha hanya mampu bertahan selama enam bulan.

US, “sewaktu pasokan telur bebek tidak ada (kosong), kami bingung, sekarang ini tidak ada yang ngatur lagi sih, udah pada kerja semua, kita-kita ini ibu rumah tangga semuanya, nggak ada anak muda sekarang mah, pada kerja semua.’ (US, Januari, 2012). Usaha pembuatan telur asin ini akhirnya berhenti beroperasi pada akhir tahun 2010.

#### 6) Tahap evaluasi dan 7) Tahap terminasi

Tahap evaluasi sama seperti juga pada program bantuan untuk usaha rengginang, belum dilaksanakan, sedangkan tahap terminasi belum sempat dilakukan karena usaha berhenti terlebih dahulu.

## 4.2. Peran Pendamping dalam Program CSR Pemberdayaan Ekonomi

A. Program CSR PT. Jababeka, Tbk. dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan rengginang Tahun 2009.

LPPM-Jababeka sebagai lembaga pelaksana program memiliki peran-peran strategis diantaranya sebagai perantara, penghubung antara keinginan PT. Jababeka, Tbk. untuk melaksanakan program-program CSRnya, dengan masyarakat. Lembaga ini merencanakan program dan menghubungkan sasaran program dengan akses ekonomi dan akses pemasaran di Kawasan Industri,

Peserta program dihubungkan oleh LPPM-Jababeka dengan konsumen di kawasan industri, seperti cerita Ibu MR, “.....minta stok orang itu (LPPM) untuk PT Dongsa Korea, katanya di taruh di koperasinya PT itu, sama orang kantor LPPM, kita nggak tahu-tahu, pokoknya disalurkan sama orang LPPM, koperasinya di Jababeka Cikarang Baru itu kantornya, yang pernah beli langsung kesini ada ada orang Amerika, ketagihan itu orang sekali bawa tiga ratus, lalu ngebel lagi dari sono kesini minta dikirim lagi.” (MR, Desember, 2012).

“..... ada orang Jepang datang kerumah sama orang LPPM, minta contoh rengginang, dia buat di anter kesono. Tapi saya tidak sanggup, mintanya bangsa 1000 biji, bukannya kenapa... tapi benterinya (panas) tidak ada...” (MR, Desember, 2012).

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta program belum mendapat tindak lanjut dari LPPM-Jababeka, “batasan program dari kami untuk saat itu adalah pemberian akses permodalan dan jalan pemasaran, untuk hal lain belum terpikirkan”(WD, Desember, 2011).

LPPM-Jababeka memberikan perhatian kepada peserta program untuk diikutsertakan dalam pameran yang diikutinya, “pernah diajak ikut pameran sama LPPM, sayanya nggak mau, mbung ah saya nggak bisa ngomongnya kata saya begitu, waktu di Jakarta itu ada pameran, saya mau dibawa, disuruh mau diajak, saya tidak ikut pameran, tapi sempet difotoin alat-alatnya, barang produksinya, menggorengnya.” (MR, Desember, 2011).

B. Program CSR PT. Jababeka, Tbk. dengan pendekatan Pemberdayaan Ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan Telur Asin tahun 2010

LPPM-Jababeka ini dalam melaksanakan kegiatannya terlebih dahulu melakukan *assesment*, kemudian atas hasil *assesment* sebelumnya terhadap permasalahan yang ada tentang apa yang diperlukan menurut kaca mata korporasi maka LPPM-Jababeka mulai menyusun program-program dalam membantu mencari solusi bagi sekitarnya. Mempertimbangkan bahwa kawasan sekitar Kota Jababeka masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep citra pemasaran kawasan secara umum. Apabila kawasan disekitar semakin baik, ini akan membawa keuntungan pula bagi perwajahan Kota Jababeka yang tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi, dengan masuknya investasi, akan turut menggerakkan roda perekonomian lanjutan dari gerbong usaha korporasi.

Pelaksanaan program CSR pemberdayaan ekonomi tahun 2010 yaitu produksi telur asin, pada program ini LPPM-Jababeka dan PT. MTM telah mencoba melakukan pembentukan kelompok sasaran sebagai pendamping bagi kelompok lain, dalam hal ini adalah kelompok ZK yang mendampingi kelompok EN.

Adapun peran yang dilakukan oleh kelompok ZK adalah sebagai perantara, mereka yang menghubungkan kelompok EN dengan LPPM-Jababeka. Mereka juga bertindak melakukan pengelolaan atau manajemen usaha dimana terdapat struktur organisasi ketua, bendahara dan anggota-anggota. Pekerjaan telah terspesialisasi.

Menurut EN, “anak-anak muda itu (kelompok ZK) bikin kelompok terus ngajuin ke PT (perusahaan), untuk mendapat dukungan bantuan, yang megang ini .... sekarang tidak disini lagi, ketua kelompoknya bernama ZK.”(EN, Januari, 2012).

“yang megang keuangan, urusan beli telur mentah dan kirim-kirim barang kalau sudah mateng mereka, kita ibu-ibu bantuin ngosek dan bikinnya....” (EN, Januari, 2012).

“dari PT dan LPPM pernah nengok kesini, waktu pertama sampai beberapa kali.....” (EN, Januari, 2012).

“.... pesanan banyak, kita sempet tidak bisa penuh, kita orangnya terbatas, telur mentahnya juga langka.... tidak tentu....” (EN, Januari, 2012).

Dalam kegiatan CSR rengginang dan telur asin, peran komunitas masih belum menonjol, keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan kegiatan CSR PT. Jababeka, Tbk. masih terbatas sebagai peserta dari program yang didesain oleh lembaga (LPPM-Jababeka).

Peran LPPM-Jababeka dalam Program CSR adalah sebagai perencana, pelaksana, dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan berhubungan langsung dengan mitra binaan.

Menurut DA, LPPM-Jababeka membenarkan bahwa sebagian tugas LPPM adalah untuk menjembatani antara pihak yang berkepentingan seperti PT. Jababeka, Tbk, Tenant Industri, dan masyarakat baik yang didalam Kota Jababeka maupun yang disekitarnya.

### **4.3. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Program**

A. Program CSR PT. Jababeka, Tbk. dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan rengginang Tahun 2009.

Hambatan-hambatan dalam implementasi program CSR PT. Jababeka, Tbk. tampak dari wawancara dengan informan adalah sebagai berikut : hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi pembuatan rengginang tahun 2009, Ibu MR menuturkan, “Kalau musim begini (musim hujan, pada bulan Januari) rengginang tidak berproduksi, benternya (panas matahari) harus bagus, kemaren ada orang Jepang datang kerumah sama orang LPPM, minta contoh, dia buat di anter kesono. Tapi saya tidak sanggup, mintanya bangsa 1000biji, bukan karena tidak sanggup membuat, tapi karena kondisi cuaca tidak mungkin untuk menjemur rengginang. Kalau ada mesin open bisa jalan terus, tapi mahal, mesin ini juga yang panasnya harus bagus seperti dijemur biasa.”(MR, Januari, 2012).

Selain membuka akses modal pinjaman lunak LPPM-Jababeka juga membuka keterjangkauan akses pasar di kawasan industri dengan menitipkan produksi mereka di koperasi tenant industri, namun ini juga terkendala karena adanya kesulitan administrasi dan teknis, seperti teknis pembayaran, kerapihan produk, ketepatan produksi, keseragaman, dan yang paling penting adalah teknis

pembayaran. Seperti yang diceritakan Ibu NS (Januari,2012), “kalau koperasi tidak sanggup saya mah, mending diiderin di kampung, ibu tidak tertarik, ribet urusannya, kalo di koperasi seminggu dua minggu kalau belum abis belum dibayar, sisanya dibawa pulang lagi, kalau dikampung tidak pernah ada sisa, asal ada barang aja, berapa ribu barang abis pasti, duitnya pasti ada, minta dikemas, diapain, kalau dikampung tidak perlu, barang begitu aja udah, ambil nih umpama seribu, apa lima ratus, dia pergi aja sebentar udah abis”(NS, Januari, 2012).

Ibu NS malah khawatir terhadap modal pinjaman, “.....kalo duit-duit pinjaman itu saya mah takut kagak kebayar, itung-itungan saya teh saya capek itu upahnya ya itu, buka saur-buka saur, kalo di kitakan utang wajib di bayar, ibu sudah tua kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab...” (NS, Januari, 2012).

Sejalan dengan pernyataan Ibu NS, Ibu MR menyampaikan, “sebetulnya tidak ada kesulitan dalam pemasaran, ada limpahan pasar dari Jababeka karena ada permintaan baru, disini udah pada dateng sendiri pesenan, pada tahu dah, itu lebaran dari mana aja tetangga-tetangga pada dateng, kue mateng, kue mentah, mateng harga rengginang bangsa 1200-1500, mentah 900, yang dititip ke koperasi sudah mateng, yang mentah minta berapa ratus ntar dibungkusin, 10-20 perbungkus, gimana pesenan dari LPPM aja, saya sudah bilang kalau musim hujan saya tidak sanggup, daripada ntar utang saya gede kan tidak berproduksi tapi pengembalian harus jalan terus, mendingan saya kagak bikin, jadi tidak usah bayar utang.”(MR, Januari, 2012)

Ketika ditanya apakah mereka masih mengharapkan adanya bantuan lagi keduanya secara terpisah menyatakan pikir-pikir dulu, dengan kata lain merasa belum membutuhkan.

Ada perasaan kurang percaya diri pada ibu NS ini tampak dalam kata-katanya, “Alhamdulillah kita dapat bantuan sedikit saya ambil sedikit, barang sejuta itu dibagi dua ama anak saya, bantuan itu sebenarnya jatuhnya ke adik saya Pok MR, saya cuman milu aja kalau hitungan dagang kita ini berdua begitu.”(NS, Januari, 2012).

B. Program CSR PT. Jababeka, Tbk. dengan pendekatan Pemberdayaan Ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan Telur Asin tahun 2010

Hambatan dalam pelaksanaan program juga ditemui dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi industri rumah tangga pembuatan telur asin tahun 2010, berikut penuturan Ibu EN, “yang dulu ngelola telur anak-anak dia juga, dimodalin masalah telur, dari LPPM itu ngasih berbentuk modal aja, berbentuk uang, telur belanja sendiri, dijualnya masing-masing ada yang ambil, ngedrop, ada pesenan, yang ngerjain banyak orang, di bentuk kelompok-kelompok.” (EN, Januari, 2012).

“bikin telur asin memang disini, yang ngerjain saya, si Enap, Bu Usih, saya di suruh oleh ponakan saya, ada yang dari PT.MTM, diberi dalam bentuk uang, kalau sudah dibikin dikirim ke catering, kalau tidak habis pun banyak yang datang ngambil ke rumah” (EN, Januari, 2012).

“Sekarang sudah tidak bikin, waktu itu bikin tahun 2010, yang ngosek 3 orang, yang nengok telur, mantu saya, yang nganterin ke catering,” (EN, Januari, 2012)

“Kita tahunya ada telur, dijual kira-kira cenggo satu 1500, saya nggak tahu urusannya, semua kami, ibu-ibu ini percaya dengan anak-anak muda orang mereka itu masih saudara kami sendiri, ada pesenan, ada yang mau minta telur asin ya kami kerjakan.” (EN, Januari, 2012)

“....ada ponakan saya dan kawan-kawan anak muda tetangga sini, anak-anak ini saat ini udah pada kawin, pada pindah, Cuma kami yang tetap disini.” (EN, Januari, 2012)

“berhenti karena pasokan telur tidak ada lagi, langka, kalau telurnya nggak ada ya kita tidak bisa berproduksi lagi, permintaan ada banyak dari PT. Mereka minta rutin sekitar lima puluh butir, kalau di PT ada semingguan.....” (EN, Januari, 2012)

Sedangkan menurut informan US, juga menyampaikan, “..... bangkrut, orangnya udah kagak ada, dari kiriman telur mentahnya yang langka pak, ini ngandelin dari Selang Sironggeng, pasokan telur mentahnya hanya sedikit, tidak mampu melayani permintaan yang rutin padahl mah kalau catering untuk yang ke PT.PT itu pasti rutin dan permintaannya banyak. Akhirnya bertahan hingga lebih kurang enam bulanan.” (US, Januari, 2012).

Tabel 4.1. Rangkuman Data Temuan

	<b>Pelaksanaan CSR PT. Jababeka, Tbk</b>	<b>Peran-peran dalam Program CSR PT. Jababeka, Tbk.</b>	<b>Hambatan-hambatan</b>
Pemberdayaan Ekonomi Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Rengginang	Pelaksanaan tahapan dalam pendekatan pemberdayaan seperti tahap Persiapan, Pengkajian, Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, Pemformulasian Rencana Aksi, Pelaksanaan (Implementasi) Program atau kegiatan, belum melibatkan partisipasi kelompok sasaran, sedangkan tahap evaluasi, dan terminasi tidak dilakukan atau tidak ada.	LPPM-Jababeka Berperan sebagai penghubung korporasi dengan masyarakat dan sebagai perencana program	<p>Hambatan internal Kredit berhasil diselesaikan, namun bukan dari berjalannya program (program berjalan tidak semestinya),</p> <p>Adanya kebiasaan pemasaran yang mudah dan lebih menguntungkan,</p> <p>prosedur pemasaran berbelit menyebabkan susah untuk dipenuhi,</p> <p>Adanya rasa tidak percaya diri pada penerima program untuk berkembang menjadi lebih besar.</p> <p>Kapasitas masyarakat penerima program belum sesuai karakter sasaran (keberpihakan).</p> <p>Penerima manfaat merasa tidak aman dengan adanya kredit, sehingga tidak lagi berminat</p>

			terhadap tawaran kredit berikutnya.
	Capaian program dilihat dari: Keberlanjutan, belum tercapai, atau program mengalami kegagalan.	Aparatur Kelurahan, berperan sebagai pemasok informasi data sasaran, sekaligus turut menentukan sasaran, dan sebagai penghubung antara LPPM-Jababeka dengan masyarakat.	Terdapat faktor ketergantungan terhadap alam yaitu sinar matahari dalam proses produksi hingga menghambat program.
Pemberdayaan Ekonomi Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Telur Asin	Pelaksanaan tahapan dalam pendekatan pemberdayaan seperti tahap Persiapan, Pengkajian, Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, Pemformulasian Rencana Aksi, Pelaksanaan (Implementasi) Program atau kegiatan, belum melibatkan partisipasi kelompok sasaran, sedangkan tahap evaluasi, dan terminasi tidak dilakukan atau tidak ada.	LPPM-Jababeka berperan sebagai penghubung korporasi dengan masyarakat dan sebagai perencana program dan penyalur modal/pinjaman lunak.	Hambatan internal Adanya ketergantungan terhadap kelompok pendamping yang dominan ini juga terkait adanya rasa tidak percaya diri pada penerima manfaat untuk mengatur sendiri kebutuhan kegiatan dan diserahkan sepenuhnya pada kelompok pendamping.
	Capaian program dilihat dari Keberlanjutan program, belum tercapai, atau program mengalami kegagalan.	PT. MTM sebagai pihak yang memiliki inisiatif dan modal untuk di pinjamkan	Hambatan eksternal Kelompok ini mengalami kredit macet, berhentinya kegiatan diawali sebab pasokan bahan baku terhenti, kemudian bubarnya

			kelompok pendamping.
		Aparatur Kelurahan, berperan memberikan informasi data sasaran, sekaligus turut menentukan sasaran, dan sebagai penghubung antara LPPM-Jababeka dengan masyarakat.	
		Telah dibentuk adanya Kelompok dalam masyarakat yang berperan sebagai kelompok Pendamping dan diproyeksikan menjadi agen perubahan.	

Sumber : Diolah dari penelitian, 2011

## **BAB 5**

### **ANALISA**

Bagian ini melihat pelaksanaan proses pemberdayaan ekonomi pada Program Corporate Social Responsibility di Kawasan Industri PT. Jababeka Tbk dengan perspektif yang ada di literatur akademik. Di sini temuan penelitian digolongkan, diklasifikasi, dan diurutkan sesuai elemen-elemen utama selama penelitian kemudian dibandingkan dengan literatur rujukan yang digunakan.

#### **5.1. Analisa Proses Pemberdayaan Program CSR PT. Jababeka, Tbk**

Program CSR PT. Jababeka, Tbk. merupakan respon atas adanya isu-isu utama permasalahan sosial ekonomi di sekitar kawasan industri. Isu utama di kawasan industri adalah terjadinya perbedaan yang mencolok antara pembangunan di dalam dan di luar kawasan Kota Jababeka, tampak adanya kesenjangan pembangunan di dalam kawasan dengan di sekeliling Kawasan Industri Jababeka. Isu kesenjangan ini kemudian akan tampak lebih jelas bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat di dua kelompok wilayah ini (di dalam dan di sekitar kawasan), maka program CSR yang muncul diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, ini bertujuan untuk menumbuhkan jenis usaha dan tujuan lebih jauh lagi diharapkan dapat membentuk sentra-sentra perekonomian masyarakat sekitar kawasan industri dengan ciri khas tertentu.

Terdapat perkembangan teknis dalam implementasi program tahun 2009 dengan tahun 2010, program pada awalnya dilaksanakan sendiri oleh LPPM-Jababeka, kemudian pada tahun 2010, LPPM-Jababeka mencoba menggandeng mitra tenant industri bergabung dalam *joint* program dengan peran-peran yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama kemudian memberikan bantuan permodalan berupa pinjaman modal usaha tanpa bunga yang pengembaliannya dapat diangsur setiap bulan dalam satu tahun anggaran program.

Perkembangan sasaran CSR pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan tahun 2009 terdapat perbedaan dengan yang dilaksanakan tahun 2010. Perbedaan ini tampak dari penerima manfaat, tahun 2009 anggaran diberikan pada kelompok yang telah terbentuk di dalam masyarakat, jenis usaha yang sama, dan memiliki

hubungan kekerabatan yaitu kelompok industri kecil pembuatan rengginang, sedangkan pada tahun 2010 anggaran diberikan pada kelompok yang dibentuk, dengan pertimbangan ini akan menjadi kelompok baru sebagai embrio dari sentra industri rumah tangga pembuatan telur asin untuk memasok kebutuhan catering industri.

Seperti teori yang tercantum dalam Bab 2 p. 42-44, yang dikemukakan oleh Adi. Pelaksanaan CSR PT. Jababeka, Tbk. bila dipandang sebagai program pada tahun 2009 dan 2010 telah ada tahap persiapan, pengkajian, tahap perencanaan alternatif program, tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan program, namun belum melakukan tahap evaluasi dan terminasi, program berjalan begitu saja, pengendalian baru dilakukan pada aspek pemberian pinjaman lunak dan pengembaliannya.

A. Program CSR PT. Jababeka, Tbk. dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan rengginang Tahun 2009.

Pada tahap persiapan, terdapat keterbatasan jumlah personil pelaksana kegiatan CSR, merka melakukan pendekatan awal pada kelompok sasaran melalui aparat Desa, dan peran aparat desa dalam menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai sasaran penerima program cukup besar, ini tampak dari segera disetujuinya sasaran yang diusulkan. Tahap pengkajian, perencanaan alternatif program dan pemformulasian rencana aksi dilaksanakan hampir bersamaan dan cukup singkat yaitu pada bulan Desember 2008, pada tahap ini terdapat informasi yang terlewat, seperti bahwa dalam proses produksi rengginang memerlukan cahaya matahari yang cukup, sehingga pekerjaan pembuatan rengginang tidak dapat dilaksanakan terus menerus, pekerjaan cenderung bersifat musiman yaitu sekitar tiga bulan menjelang hari raya idul fitri. Pada tahap pelaksanaan program, program menjadi terhambat. pada tahap implementasi terdapat dinamika kegiatan, masalah yang dihadapi kelompok rengginang pada saat itu adalah adanya hambatan cuaca, dan keterbatasan jumlah kemampuan dalam berproduksi. Intervensi yang dilakukan berupa program pemberian pinjaman lunak, malah menimbulkan ketakutan akan hutang yang nantinya semakin menumpuk dan dikhawatirkan tidak mampu dibayar (kredit macet). Kondisi saat ini Ibu NS dan

Ibu MR, keduanya belum berminat untuk mengambil pinjaman lagi, padahal telah beberapa kali kembali diberikan tawaran.

Pemberian akses pasar seperti dengan menitipkan hasil produksi rengginang di koperasi tenant industri malah dianggap merepotkan oleh mereka, keharusan produk dibungkus rapi dan model konsinyasi dengan pembayaran per termin, pada saat barang habis baru dibayar, model ini dianggap merepotkan oleh kelompok rengginang, maka mereka lebih suka rengginangnya dibeli oleh pedagang keliling karena pembayaran tunai dan barang segera laku.

Kondisi komunitas penerima manfaat pada saat program berjalan, pada kelompok Ibu NS, kebutuhan kelompok ini untuk kondisi pada saat itu adalah adanya alat pengering (oven) untuk mengeringkan rengginang di saat musim penghujan, namun bantuan yang diterima adalah pinjaman lunak dengan besaran sekitar Rp. 3.000.000,- dibagi untuk dua orang, karena kondisi pada saat diberikan sedang musim penghujan maka bantuan pinjaman tidak dapat segera dipergunakan, atau disimpan terlebih dahulu hingga tiga bulan menjelang Ramadhan, baru dipergunakan.

Pada kelompok rengginang mereka memang pada dasarnya berprofesi dibidang pembuatan rengginang dan berpengalaman sudah lebih dari 15 tahun, mereka memang berusaha dibidang tersebut, sehingga tanpa bantuan pinjaman lunakpun, mereka mampu beroperasi. Skema kegiatan kelompok ini adalah menerima order, kemudian mengenakan setengah pembayaran dimuka sebagai operasional produksi dan apabila telah selesai produk dibayar tunai dan dianggap sebagai keuntungan. Dengan kata lain ada atau tidak ada program, tidak berpengaruh besar terhadap keberdayaan mereka.

Pada kelompok Ibu NS terjadi bias program, dimana program sebenarnya diperuntukkan bagi kelompok ternyata kegiatan yang dilaksanakan Ibu NS dengan Ibu MR berjalan secara independent atau sendiri-sendiri dan tidak terkait satu sama lain, ini tidak sesuai dengan tujuan program yang menginginkan adanya penguatan kelompok sasaran.

Dinamika dalam kelompok rengginang program dilaksanakan pada awal tahun 2009, di bulan Januari bertepatan dengan musim penghujan dimana rengginang tidak bisa berproduksi karena tidak ada cahaya matahari yang sangat

diperlukan untuk mengeringkan produk. Bantuan modal yang diterima akhirnya hanya disimpan terlebih dahulu, padahal setiap bulan mereka diproyeksikan untuk mengembalikan pinjaman secara rutin, sedangkan proses produksi sebenarnya adalah tiga bulan menjelang ramadhan, dimana kondisi cuaca bersahabat dan permintaan untuk produk meningkat. Kredit berhasil dicicil namun dampaknya kelompok sasaran merasa takut untuk kembali menerima pinjaman.

B. Program CSR PT. Jababeka, Tbk. dengan pendekatan Pemberdayaan Ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan Telur Asin tahun 2010.

Terdapat langkah perubahan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan Telur Asin tahun 2010. Pada tahap persiapan dilakukan pendekatan dengan kelompok sasaran melalui aparat desa Pasir Gombang, sedangkan ketua RT setempat merasa tidak mengetahui keberadaan program, pelibatan jenjang terkecil dari tokoh formal masyarakat diperlukan agar program dapat berjalan dengan baik, mereka memiliki informasi mengenai karakteristik sasaran yang dapat dipergunakan untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya program.

Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan berbentuk pemberian akses atau keterjangkauan modal pada kelompok sasaran dan membuka terobosan akses pemasaran ke konsumen di kawasan industri, antara lain ke koperasi tenant industri, dibukanya jaringan dengan disampaikan informasi pada konsumen ekspatriat yang menyukai oleh-oleh khas Cikarang.

Bila dilihat dari sebuah proses pemberdayaan, Pelaksanaan CSR PT. Jababeka, Tbk. tahun 2009 dan 2010 belum melibatkan masyarakat secara penuh dalam setiap tahapan proses, program bersifat *top-down* dan di desain untuk kepentingan pelaku CSR, sehingga belum bisa dikatakan telah dilakukan pemberdayaan masyarakat.

Seperti yang tercantum dalam perencanaan program CSR bidang pemberdayaan ekonomi, ditujukan untuk pengembangan industri kecil masyarakat. Program ditujukan untuk membuka akses ekonomi (modal, pasar) pada masyarakat dan sebagai katalis untuk meningkatkan performa industri rumah tangga dalam hal ini pembuatan rengginang dan telur asin.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran kelompok telur asin pada saat itu adalah kelompok Ibu EN merupakan kelompok kedua yang berposisi sebagai tenaga pembuat telur asin, sedangkan kelompok pertama adalah kelompok ZK yang terdiri atas anak muda, yang mengkhususkan diri pada manajerial kegiatan. Seperti mencukupi kebutuhan stok bahan baku, mencari pangsa pasar, memenuhi pendanaan, dan urusan administrasi dengan industri.

Akses modal yang diberikan jatuh pada kelompok ZK, sehingga tidak ada transfer pengetahuan manajerial pada kelompok Ibu EN, kelompok Ibu EN menjadi sangat tergantung dengan kelompok ZK.

Akses pasar yang dibuka pada katering industri untuk mencukupi salah satu kebutuhan pasokan komponen lauk berupa telur asin sangat menguntungkan, karena jumlah yang dibutuhkan banyak dan berlangsung terus-menerus. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini dalam beberapa kali kesempatan berakibat pada beralihnya market ke tempat lain yang mampu menyediakan stok secara rutin dan dapat dilakukan pasca bayar.

Manfaat program tampak belum dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masing-masing kelompok dan belum sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pada Kelompok pembuat telur asin, kebutuhan utamanya adalah pasokan bahan baku telur yang rutin, pemasaran, pinjaman lunak yang memadai, dan stabilitas kelompok. Pada kelompok pembuat telur asin. Ibu-ibu memiliki ketergantungan yang besar terhadap kelompok anak muda, sehingga pada saat kelompok anak muda ini bubar karena anggota-anggotanya menikah dan mendapat pekerjaan tetap, maka usaha pembuatan telur asinpun berhenti.

Pada kelompok Ibu EN, manfaat program dirasakan secara bertingkat pada kelompok (ZK) pendamping dan kelompok Ibu EN, namun ini justru menjadi bumerang karena pembagian hasil produksi tidak mampu dipergunakan untuk menggulirkan roda usaha kembali karena menjadi terlalu kecil untuk di bagi, sehingga mereka merasa dapat lelahnya saja.

Dinamika dalam kelompok Ibu EN, program dilaksanakan mulai bulan Juni 2010, dan di proyeksikan pada Juni 2011 pinjaman tanpa bunga yang

diberikan dapat digulirkan ke penerima manfaat yang lain dan kelompok Ibu EN tetap bisa berjalan, namun baru berjalan sekitar enam bulan produksi terhenti karena terhentinya pasokan bahan baku berupa telur itik mentah. Kelompok ini mengalami kredit macet.

Kedua program ini dalam assesment perencanaan kurang mendalam, sehingga terdapat faktor yang terlewat untuk dipertimbangkan, yaitu faktor kebutuhan sebenarnya kelompok sasaran, maka akibatnya program berjalan tidak seperti yang diharapkan.

Kedua model kelompok yang diterapkan tidak berjalan, sehingga pemanfaat program belum dapat digulirkan pada penerima manfaat yang lain. Program direncanakan berjalan dalam satu tahun anggaran, dengan capaian keberhasilan dari tingkat pengembalian modal kelompok sasaran, namun dari dua kegiatan ini pada saat program berjalan sempat mengalami kredit macet.

Ini artinya capaian penyelesaian program untuk kedua kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut masih belum sesuai dengan yang direncanakan.

Apabila dilihat dari pola implementasi program, pelaksanaan CSR pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan LPPM-Jababeka masih menggunakan model *top-down*, dengan ciri masyarakat diposisikan sebagai *beneviciaries* atau penerima manfaat dan belum dilibatkan dalam setiap tahapan program. LPPM-Jababeka sebagai lembaga berperan sebagai penyedia produk CSR berupa program dan kegiatan, dari melakukan identifikasi, disain, dan meluncurkan (menawarkan/promosi) program kepada masyarakat, dan masyarakat berperan sebagai pengguna dari produk tersebut.

## 5.2. Analisa Peran Pendamping dalam Program Pemberdayaan CSR PT. Jababeka, Tbk.

Pelaksanaan CSR PT. Jababeka Tbk., terdapat peran-peran pendamping seperti peran dalam batasan yang dikemukakan oleh Adi (lihat Bab 2 h.45-47).

Organisasi dalam hal ini LPPM-Jababeka, memiliki peran yang cukup kompleks antara lain berperan dalam merencanakan, mengorganisasi program, menghubungkan dengan pihak terkait, mencari anggaran, sebagai motivator, menyediakan sarana, infrastruktur dan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan.

Secara organisasi, petugas LPPM-Jababeka telah bertindak sebagai: perantara (*broker*), dan perencana sosial (*social planner*). Sebagai Perantara (*broker*), petugas LPPM-Jababeka bertindak menghubungkan antar *stake holder*, individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat. Walaupun di tingkat pelaksanaan peran sebagai penghubung ini masih terbatas, sehingga pada saat peserta program mengalami kesulitan LPPM-Jababeka tidak dapat langsung melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti pada saat terhentinya pasokan telur mentah untuk pembuatan telur asin.

Dan dalam peran sebagai perencana LPPM-Jababeka bertugas melakukan *assesment* dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan data dan informasi dari aparat desa setempat.

Persentase anggaran yang di berikan untuk program CSR secara keseluruhan dibandingkan keuntungan perusahaan sebagai berikut : Laba bersih tahun 2009 sebesar 16.369.000.000 dan pada 2010 sebesar Rp. 62.124.000.000,- dibagi anggaran untuk CSR tahun 2009 sebesar Rp. 211.000.086,- dan 2010 sebesar Rp. 357.000.000,- jadi tingkat kontribusi PT. Jababeka, Tbk secara tersendiri tahun 2009 sebesar 1,289 % dan tahun 2010 menjadi sebesar 0,57 %. Walaupun secara rasio angka meningkat tapi jika dibandingkan dengan prosentase keuntungan relatif menurun. Besar kecilnya anggaran yang diturunkan perusahaan untuk kegiatan CSR sangat berpengaruh terhadap eksistensi program yang dibangun.

Anggaran yang ada dan dikelola oleh LPPM-Jababeka untu pemberdayaan masih relatif kecil, untuk satu kelompok seperti kelompok

rengginang adalah sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan untuk operasional telur asin dengan jumlah maksimal produksi 700 butir telur memerlukan modal tidak lebih dari Rp. 700.000,- sedangkan sebagian besar anggaran CSR dipergunakan untuk program CSR yang berkaitan dengan Infrastruktur, dan terbesar kedua adalah hibah atau charity sedangkan prosentase terkecil ada pada pemberdayaan ekonomi. Apabila volume anggaran untuk pemberdayaan ekonomi lebih diperbesar maka kesempatan untuk menambah variasi program dan meningkatkan keberhasilan program akan semakin tinggi.

Program pemberdayaan ekonomi untuk industri rumah tangga pembuatan rengginang tahun 2009, berjalan dengan sendirinya, karena memang kondisi kelompok Ibu NS sudah dalam keadaan stabil sebelum program berjalan, mereka melakukan pekerjaan musiman yang dilakukan menjelang bulan ramadhan.

Berbeda dengan pelaksanaan program CSR pemberdayaan ekonomi tahun 2010 yaitu produksi telur asin, pada program ini LPPM-Jababeka telah mencoba melakukan pembentukan kelompok sasaran sebagai pendamping bagi kelompok lain, dalam hal ini adalah kelompok ZK yang mendampingi kelompok EN.

Adapun peran yang dilakukan oleh kelompok ZK adalah sebagai perantara, mereka yang menghubungkan kelompok EN atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan lembaga yang menyediakan bantuan dalam hal ini LPPM-Jababeka, peran sebagai perantara merupakan peran mediasi. Mereka juga bertindak melakukan pengelolaan atau manajemen usaha dimana terdapat struktur organisasi ketua, bendahara dan anggota-anggota, peran ini sebenarnya lebih maju dari kegiatan bantuan usaha rengginang tahun 2009, karena pekerjaan telah terspesialisasi.

Namun dalam praktek pelaksanaan program, kelompok ZK yang terdiri atas anak-anak muda menjadi lebih dominan sehingga secara psikologis kelompok EN yang terdiri atas ibu-ibu itu sepenuhnya percaya dan menjadi tergantung dari kelompok ZK.

Dalam proses pelaksanaan program CSR PT. Jababeka, Tbk, masyarakat diposisikan sebagai konsumen yang menerima, produk CSR yang telah didesain sedemikian rupa oleh lembaga. Peran dan partisipasi masyarakat di dalam program secara keseluruhan, belum dapat dilaksanakan. Masyarakat memosisikan diri berada sebagai pihak luar.

### **5.3. Analisa Hambatan**

Memperhatikan penuturan informan penelitian di hubungkan dengan (bab 2, h.49-51 ) terdapat pola hambatan yang dapat dibagi dua yaitu hambatan yang berasal dari dalam diri individu dan hambatan kendala yang berasal dari sistem sosial, sebagai berikut :

#### **5.3.1. Kendala yang berasal dari kepribadian individu**

##### **a. Kebiasaan**

Setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan (otonomi fungsional).

Pembukaan akses pemasaran kepada penerima sasaran program tahun 2009, di kawasan industri yaitu di koperasi tenant industri tidak dapat dimanfaatkan, karena peserta program secara kebiasaan telah merasa nyaman dengan model penjualan yang tidak terlu memaksakan diri, mereka merasa sudah cukup dengan penghasilan yang ada sekarang.

##### **b. Rasa Tidak Percaya Diri**

Adanya rasa tidak percaya diri yang menghambat, seperti yang dirasakan EN, pada industri rumah tangga pembuatan telur asin, ini juga dirasakan Ibu NS yang merasa bahwa program ini sebenarnya untuk adiknya saja sedangkan ia hanya ikut-ikutan. Kelompok EN ini memosisikan diri sebagai pekerja, ada rasa tidak percaya diri untuk mengelola sendiri

##### **c. Ketergantungan**

Pada kelompok EN tampak sekali sangat tergantung dengan kelompok ZK yang ditugaskan menjadi kelompok pendamping, sehingga pada saat kelompok ZK ini bubar maka kelompok EN juga tidak dapat melanjutkan usaha.

#### d. Rasa tidak aman dan regresi

Faktor internal lain yang dapat menghambat partisipasi yang efektif adalah kecenderungan untuk mencari “rasa aman” yang ia peroleh di masa lalu. Mereka merasa bahwa perubahan yang akan terjadi justru akan dapat meningkatkan “kecemasan dan ketakutan” mereka. Berdasarkan hal ini mereka menjadi pihak yang cenderung untuk menolak pembaruan, dalam hal ini menolak model pemasaran baru di kawasan industri dan menolak untuk mengikuti kembali program atau meminta pinjaman lagi karena merasa tidak aman bila tidak dapat mengontrol jumlah pinjaman akan membuat mereka terbelit hutang.

#### 5.3.2. Kendala yang berasal dari luar individu

Ketergantungan akan alam merupakan ciri tradisional, seperti yang terjadi pada kelompok NS dimana produk rengginang hanya bisa diproduksi pada musim dengan sinar matahari yang cukup. Kondisi ini sebenarnya dapat diatasi dengan teknologi pemanasan sederhana (oven), namun keterjangkauan teknologi ini oleh mereka dirasakan masih mahal.

Pada kelompok telur asin proses produksi tergantung pada ketersediaan pasokan bahan baku dari wilayah lain, jaminan ketersediaan bahan baku berupa telur bebek mentah ini juga tidak stabil, tergantung musim dan kondisi kesehatan ternak bebek yang ada. Pasokan bahan baku terhenti akan berakibat pada terhentinya produksi.

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

##### 6.1.1. Pelaksanaan Program

Terdapat niatan baik, terutama dari tingkat management puncak PT. Jababeka, Tbk. untuk menyelenggarakan program CSR yang menjadi solusi, inisiatif ini dapat dilihat dari tindakan perseroan yang konsisten melaksanakan program CSR setiap tahun dan berusaha melakukan perbaikan-perbaikan terhadap program dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.

Perkembangan CSR PT. Jababeka, Tbk menunjukkan arah yang lebih baik, terutama secara konseptual, dari tahun 2006 hingga 2010, terdapat upaya perubahan konsep dan pendekatan, walaupun di tataran praktis terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

##### a. Kegiatan Industri Rumah Tangga Pembuatan Rengginang tahun 2009

Proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pendekatan pemberdayaan seperti tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program atau kegiatan, pemformulasian rencana aksi, pelaksanaan program atau kegiatan, belum melibatkan partisipasi kelompok sasaran, sedangkan tahap evaluasi, dan terminasi belum dilakukan atau tidak ada.

Sejak tahap awal program, terdapat informasi dan data yang terlewat untuk dicermati terutama pada tahap assessment, sehingga faktor penentu berjalan atau tidaknya produksi menjadi penyebab program berhenti.

##### b. Kegiatan Industri Rumah Tangga Pembuatan Telur Asin tahun 2010

Hal yang sama juga terjadi pada proses pelaksanaan tahapan dalam pendekatan pemberdayaan, belum melibatkan partisipasi kelompok sasaran, sedangkan tahap evaluasi, dan terminasi juga belum dilakukan atau tidak ada.

Dipandang dari pendekatan yang digunakan, program masih bersifat *Top-down*, masyarakat dianggap sebagai pengguna dari service yang disediakan oleh

pelaksana, dalam hal ini CSR LPPM-Jababeka, dan merupakan program yang sekali jalan dan tidak ada tindak lanjutnya.

Program CSR PT. Jababeka, Tbk. kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk industri rumah tangga pembuatan rengginang dan telur asin, belum bisa dikatakan menyelesaikan masalah. Dari penelitian ini terungkap bahwa, Program CSR PT. Jababeka, Tbk. yang dilaksanakan tahun 2009 dan 2010 ini belum sepenuhnya menggunakan pendekatan pemberdayaan dan belum mencapai sustainabilitas.

#### 6.1.2. Peran – peran dalam pemberdayaan

##### a. Kegiatan Industri Rumah Tangga Pembuatan Rengginang tahun 2009

Peran LPPM-Jababeka, Pemerintah Desa, dan masyarakat belum optimal sehingga masih dapat ditingkatkan, sesuai dengan peran-peran yang ada dalam pendekatan pemberdayaan. Seperti peran sebagai pendamping yang multi fungsi sesuai harapan masyarakat. Sedangkan pemerintah Kabupaten Bekasi dapat mengambil peran dalam melakukan regulasi daerah dan penyedia data sasaran program CSR yang memadai.

Dalam penelitian ini untuk kelompok industri rumah tangga pembuatan rengginang merupakan kelompok yang sudah eksis secara individu jauh sebelum intervensi program. Tidak dilakukan pelatihan jadi tidak ada transfer pengetahuan.

##### b. Kegiatan Industri Rumah Tangga Pembuatan Telur Asin tahun 2010

Peran LPPM-Jababeka, tenant industri peserta joint program, Pemerintah Desa, dan masyarakat belum optimal sehingga masih dapat ditingkatkan.

Kelompok industri rumah tangga pembuatan telur asin sudah mulai dicoba digunakan pendamping dari kelompok anak muda dalam masyarakat sendiri, namun kelompok pendamping yang diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan dan replikasi usaha pada pembentukan kelompok berikutnya, menjadi terlalu dominan sehingga fungsi pemberdayaan menjadi lemah, kelompok yang dibina malah mengalami ketergantungan.

Program masih bersifat *top – down*, komunitas atau masyarakat sasaran tidak merasa memiliki program bahkan merasa asing, sehingga masyarakat atau komunitas tampak pasif berhubungan dengan program CSR.

LPPM-Jababeka berperan sebagai lembaga pelaksana kegiatan CSR yang juga memfasilitasi kegiatan CSR tenant industri ke masyarakat. Penghubung program, yaitu pegawai LPPM Jababeka melaksanakan tugas sebagai penghubung dan berkomunikasi dengan sasaran. Demikian juga formulasi, desain, cara pelaksanaan program dibuat sendiri oleh pelaksana program, melihat pola ini (*top-down*) menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan belum terlaksana.

### 6.1.3. Kendala-Kendala

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program CSR PT. Jababeka, Tbk. dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari adanya sistem sosial yang ada dan faktor alam atau lingkungan.

#### a. Kegiatan Industri Rumah Tangga Pembuatan Rengginang tahun 2009

Kredit berhasil diselesaikan, namun bukan dari berjalannya program, merupakan rutinitas dan kewajiban dari peserta program untuk mengembalikan pinjaman tanpa bunga dalam kurun waktu satu tahun.

Prosedur pemasaran di market baru yaitu koperasi di kawasan industri memang menjanjikan, namun prosedur yang dirasakan peserta program cukup berbelit, seperti harus memenuhi syarat tertentu, menyebabkan permintaan susah untuk dipenuhi, demikian juga dengan model pembayaran mundur atau seminggu kemudian, ini masih dirasakan berat oleh peserta program.

Adanya rasa tidak percaya diri pada penerima program untuk berkembang menjadi lebih besar. Peserta program merasa bahwa usahanya tidak perlu terlalu besar, mereka khawatir untuk menjadi repot dikemudian hari.

Penerima manfaat merasa tidak aman dengan adanya kredit, sehingga tidak lagi berminat terhadap tawaran kredit berikutnya.

Terdapat faktor ketergantungan terhadap alam yaitu sinar matahari dalam proses produksi hingga menghambat berjalannya program.

b. Kegiatan Industri Rumah Tangga Pembuatan Telur Asin tahun 2010

Adanya ketergantungan terhadap kelompok pendamping yang dominan, kelompok sasaran menjadi menggantungkan diri pada kelompok pendamping, sehingga pada saat kelompok pendamping bubar maka kelompok ini juga tidak dapat bertahan.

Adannya rasa tidak percaya diri pada penerima manfaat untuk mengatur sendiri kebutuhan kegiatan, semua kebutuhan diserahkan pemenuhannya pada kelompok pendamping dengan kepercayaan penuh.

Kelompok ini mengalami kredit macet, berhentinya kegiatan diawali sebab pasokan bahan baku terhenti, kemudian bubarnya kelompok pendamping

## **6.2. Saran**

### **6.2.1. Bagi Pemilik Program PT. Jababeka, Tbk**

CSR dengan model pendekatan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan dikawasan Industri dapat berjalan efektif apabila melibatkan masyarakat secara penuh dalam setiap jenjang dari proses program. Masyarakat lebih mengetahui potensi, kebutuhan dan kemampuan yang ada pada diri mereka untuk dikembangkan lebih lanjut.

LPPM-Jababeka selaku pelaksana program dengan jumlah personil yang terbatas sebaiknya membatasi peran sebagai agen perubahan sebagai pendamping masyarakat yang memberdayakan, sehingga komunitas sasaran tidak mengalami ketergantungan terhadap program.

Selain PT.Jababeka, Tbk. dilingkup wilayah berdekatan terdapat enam wilayah industri lain yang dapat diajak berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah sosial secara bersama dilingkup kawasan dalam hal pelaksanaan program CSR sehingga memiliki pengaruh yang lebih luas dan lebih terasa manfaatnya.

Pendekatan pemberdayaan merupakan pendekatan yang tepat sebagai salah satu cara untuk mencapai sustainabilitas program. CSR diwilayah ini hanya bisa berjalan efisien apabila melibatkan masyarakat secara penuh dan terjadi sinergi antara pemerintah, korporasi dan masyarakat.

Organisasi dalam hal ini LPPM-Jababeka sebagai wadah yang mendapatkan mandat dari korporasi untuk melaksanakan program CSR PT.

Jababeka, Tbk. menghadapi banyak tantangan dan kendala di lapangan, antara lain: resistensi masyarakat, kecurigaan, dipandang sebagai penghalang atas kepentingan masyarakat terhadap korporasi, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya menjadi kurang efektif.

LPPM-Jababeka, perlu lebih menjaga reputasi agar tetap dipercaya oleh masyarakat sekitar dan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi Program CSR, cara yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan akuntabilitas, upaya transparansi, dan komunikasi yang memadai dengan masyarakat dan pemerintah.

Bagi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi terdapat beberapa catatan saran : 1) Perlunya setiap tahapan dalam proses pemberdayaan dilaksanakan secara konsisten. 2) Partisipasi masyarakat, menjadi syarat penting dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan, 3) Peran dan sinergi antar masing-masing pemangku kepentingan dalam program perlu lebih di optimalkan sesuai peran-peran yang ada dalam pendekatan pemberdayaan, 4) Program memerlukan pendampingan dan konsistensi, 5) Memberikan strategi dana talangan sebagai solusi agar prosedur dan mekanisme pemasaran di market baru teratasi, 6) Perlu adanya dorongan motifasi dari pendamping program, 7) Dalam Assesment, perlu lebih cermat dalam menentukan sasaran program dan berpihak pada yang benar-benar membutuhkan. 8) Pemberian kredit sebaiknya didasarkan pada adanya kebutuhan peserta program. 9) Dalam kasus pembuatan rengginang peserta program lebih memerlukan peralatan pengering produk dengan teknologi sederhana, (semacam Oven). 10) Perlunya transfer pengetahuan dari kelompok pendamping pada kelompok sasaran. 11) Perlu dorongan motifasi pada kelompok sasaran untuk mengambil peran bagi kepentingan mereka sendiri, 12) Perlu diberikan kelonggaran waktu dalam penyelesaian kredit. 13) Perlu adanya strategi suplai bahan baku (telur bebek) dari beberapa sumber terdekat agar pasokan dapat secara rutin diperoleh

#### 6.2.2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

Korporasi dalam hal ini, PT. Jababeka, Tbk. dalam melaksanakan CSR-nya sangat memerlukan dukungan base data, sasaran mana yang membutuhkan

program CSR, sehingga program dapat tepat sasaran. Penggunaan data dari pihak yang berwenang seperti pemerintah daerah, akan menepis kecurigaan dan kecemburuan karena memiliki dasar legalitas dan rasionalitas.

Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai penyedia data yang akurat tentang dimana sebaiknya program CSR korporasi dilaksanakan sehingga terjadi sinergi dengan program yang juga dikerjakan oleh Pemerintah dan tidak terjadi tumpang tindih dengan program dari perusahaan atau kawasan industri lainnya.

Di Kabupaten Bekasi, terdapat cukup banyak kawasan industri dengan basis tenant industri yang memiliki program CSR dan yang belum terlibat dalam CSR di wilayahnya, ini dapat di dorong dan diberikan kemudahan bagi mereka yang benar-benar ingin terlibat dalam program CSR, agar dapat melaksanakan CSR yang lebih berkualitas dan menyelesaikan masalah.

### 6.2.3. Bagi Akademisi untuk penelitian lebih lanjut

Penelitian Program CSR di Kawasan Industri PT. Jababeka, Tbk ini dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dari penelitian sejenis dengan tujuan yang lebih luas lagi guna pengembangan keilmuan.

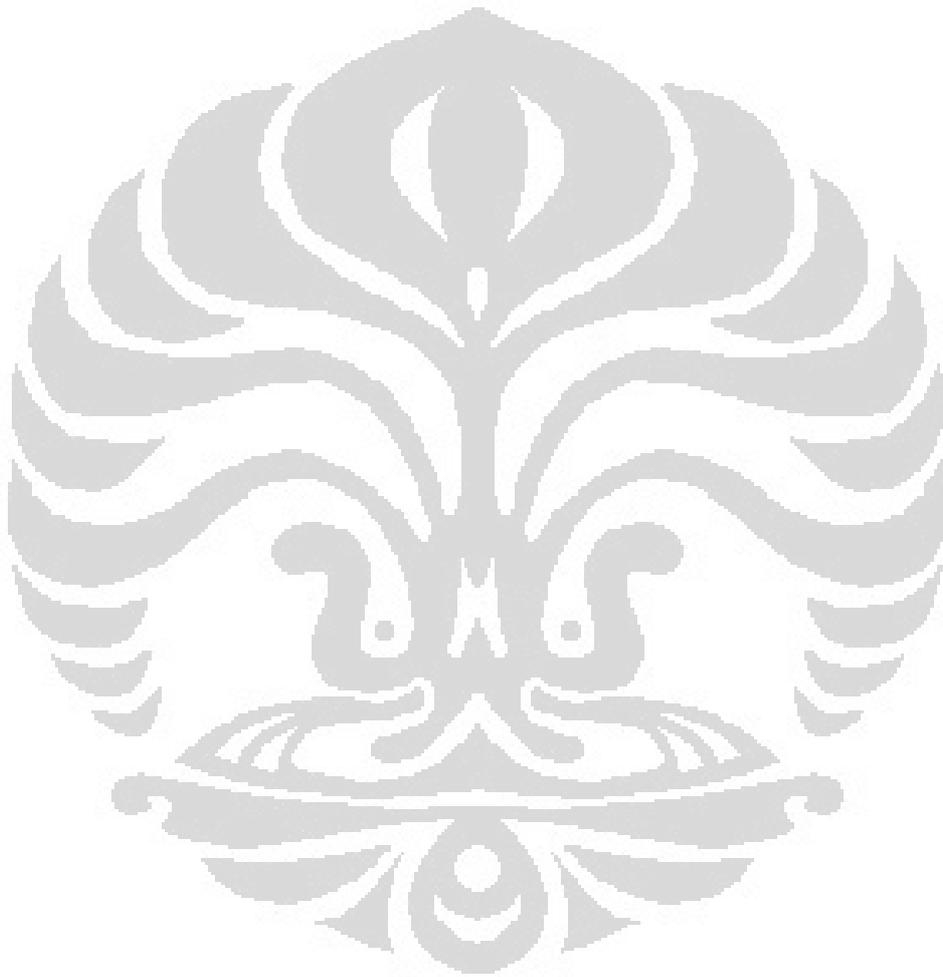
Adanya upaya pembentukan lembaga yang diproyeksikan independent sebagai pelaksana Program CSR seperti LPPM-Jababeka dan terpisah dari korporasi, secara konseptual merupakan langkah maju sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar model ini kedepan dapat berjalan lebih baik lagi dengan format yang sesuai dengan karakteristik Kota Jababeka.

Pendekatan pemberdayaan untuk mencapai sustainabilitas program yang diadopsi oleh PT Jababeka, Tbk. telah tepat, namun masih perlu penyempurnaan di tingkat implementasi. Keberadaan potensi tenaga teknis profesional seperti yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu untuk dipertimbangkan keterlibatannya dalam mempertajam implementasi program.

Dalam dimensi persaingan usaha yang positif, antar pelaku usaha kawasan industri, dalam jangka panjang, CSR dapat menjadi salah satu keunggulan dari pelakunya.

Karena untuk membuat sebuah perbedaan yang nyata, maka pelaksanaan CSR ini semestinya dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang nyata, maka

pengaruhnya di tengah masyarakat juga akan terasa, dan akibat-akibat positif dari tindakan CSR ini juga akan segera dirasakan oleh perusahaan sebagai pemilik program sebagai investasi sosial yang juga memberikan keuntungan jangka panjang bagi korporasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. ( 2002). *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Sosial*. Jakarta: LPFE-UI.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas (Dari Pemikiran Menuju Penerapan)*. \_: Fisip UI Press.
- Adi, Isbandi Rukminto.(2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Agustian, Ary Ginanjar.ed. Gunawan Sumodiningrat, Riant Nugroho D, Randi R Wrihatnolo.(2005). *Membangun Indonesia Emas*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi.(1993). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Babbie, Earl.(2006). *The Practice of Social Research*, Wadsworth Publishing Company, Belmont CA.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Arlangga University Press, Surabaya.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Creswell, John W. (2002). *Desain Penelitian : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: KIK Press (Terjemahan).
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Jo Hann Tan, Roem Topatimasang. (2004). *Mengorganisir Rakyat, Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*. Yogyakarta : Insist Press.
- Kotler, Philip et.all. (2005). *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Midgley, James. (1995). *Social Development The Development Perspective in Social Welfare*, London: SAGE Publications Ltd.

- Midgley, James (2005). *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Diperta Depag RI.
- Moleong, Lexi.J.(2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosda karya.
- Prayogo, Dody. (2011a). *Socially Responsible Corporation, Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Rubbin, Allen. Earl R. Babbie. (2008). *Research Methods for Social Work*. California: Thomson, Brooks/Cole.
- Senge, Peter. Bryan Smith. Nina Kruschwitz. Joe Laur. Sara Schley. (2008). *The Necessary Revolution : How Individuals and Organizations Are Working Together to Create a Sustainable World*. Newyork : Doubleday.
- Suharto, Edi.(2006). *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2007). *Pekerjaan Sosial Di dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility*, Refika Aditama : Bandung.
- Suharto, Edi.(2008a). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sumodiningrat. Gunawan (2007). *Merajut Kembali Konsepsi Kesetiakawanan Sosial dalam Tatanan Masyarakat*, Jakarta : Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni.(2001). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Tunggal, Amin Widjaja.(2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Harvarindo.

### Tesis

- Hariyono, Feby Setyo. (2005). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi*. Tesis. Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Setiawan, Anwar. (2003). *Identitas Ganda Bekasi “Suatu Transformasi dari Masyarakat Tradisional Menuju Masyarakat Modern”*. Tesis. Program Studi Sejarah FIB UI.
- Sirait, R.U. Maruwas. (1994). *Dampak Industri Pada Kualitas Irigasi di Daerah Bekasi*. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister ilmu Lingkungan UI.
- Sopandi, Andi. (2003). *Pola Adaptasi Dan Strategi Pemberdayaan Sekitar Kawasan Industri “Study Kasus Di Dusun Sempu Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.”* Tesis. Program Studi Sosiologi Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial FISIP UI.

### Serial

- Daniri, Mas Ahmad.(2007) *Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Chairman of Permanent Commitee on Good Corporate Governance, Kadin Indonesia*.
- Kemp, Melody. (2001). *Corporate Social Responsibility in Indonesia : Quixotic Dream or Confident Expectation?. Technology, Business and Society Programme Papper Number 6, December 2001. United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) : Genewa.*
- Siregar, Chairil N. (2007). *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada masyarakat Indonesia*. Jurnal Sosio Teknologi Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007.
- Prayogo, Dody.(2011b). *Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada Industri Tambang dan Migas*. Makara, Sosial Humaniora, Vol. 15, no.1, Juli 2011: 43-58.

Suharto, Edi.(2008b). *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate, Seminar dua hari: Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta, Jakarta 13-14 Februari 2008.

Suharto, Edi. (2008c). *Menggagas Standar Audit Program Corporate Social Responsibility: Initiating Audit Standard of CSR Programme*, Disampaikan pada 6th Round Table Discussion “Menggagas Standar Audit Program CSR: Implemetasi UU Perseroan Terbatas.Asosiasi Auditor Internal (AAI), Financial Club Jakarta, 27 Maret 2008.

Suhartono. (2009). “Kajian Prospek Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Indonesia: Perspektif Kebijakan Perdagangan.” Vol. 14, No.4. h.606.

### **Publikasi Elektronik**

*DPRD Bekasi Gagas Lembaga Pengelola CSR.*(2011). diakses 24 Desember 2011  
<http://www.antaranews.com> .

*Berita Perkembangan Aktifitas CSR dari Kab. Bekasi.* diakses 24 Desember 2011.  
<http://www.csrjabar.com>.

*Perluasan Jababeka III* (2010). Diakses tanggal 15 Juni 2011.  
<http://bekasiterkini.com>.

*Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).* (2011). diakses 15 Juni 2011.  
<http://www.hki-industrialestate.com>;

*Kawasan Industri Jababeka a Transforming City Developer.* (2009). Diakses 15 Oktober 2011. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/04/26/08164655>

*Profil Cikarang Utara dan Cikarang Selatan* (2009). <http://phki.pl.itb.ac.id>, diakses tanggal 11 Nopember 2011.

*PT. Jababeka, Tbk.*(2009).<http://www.jababeka.com/services/1/infrastructure/ind>

Holtorf, Gunther W.(2005), *Peta Jakarta : Jabodetabek, Street Atlas and index Cartografi Version 2.0*, CD-Rom 2005/06, Huber Kartographie : Munchen, German.

Indonesian CSR Awards 2011, Social Investment & Sustainable Development,  
Buku Panduan Indonesian CSR Awards 2011, CFCD Corporate Forum  
For Community Development.

Jawa Barat Dalam Angka 2010 (11-8-2010) BPS Provinsi Jawa Barat Updated:  
10-3-2011

### **Bahan-Bahan Lain**

Annual Report PT, Kawasan Industri Jababeka Tbk., Tahun 2006.

Annual Report PT, Kawasan Industri Jababeka Tbk., Tahun 2007.

Annual Report PT, Kawasan Industri Jababeka Tbk., Tahun 2008.

Annual Report PT, Kawasan Industri Jababeka Tbk., Tahun 2009.

Annual Report PT, Kawasan Industri Jababeka Tbk., Tahun 2010.

Berita Resmi Statistik BPS. (2010). Kependudukan

Bisnis keuangan kompas, 2010

*Data Base Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha di 33 Propinsi* (2010),  
Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Direktorat  
Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan  
Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Darma, I Made S (ed). (2011), *Jababeka Fact Sheet 2011/2012*, Jababeka  
Corporate Marketing: Cikarang.

Departemen Sosial RI (2004), *Indikator Potensi dan Sumber Kesejahteraan  
Sosial, ditinjau dari aspek ketahanan sosial masyarakat*, Sekjen Pusdatin  
Kesos.

Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 28, No. 1, Juli 2000: 54-61. *Pengembangan  
Kawasan Industri di Indonesia*, Timoticin Kwanda.

Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Direktorat Jenderal  
Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia. (2009).

**Universitas Indonesia**

*Penghargaan CSR 2008 Indonesia CSR Award 2008 Penghargaan Sembilan Belas Perusahaan.*

Draft Peraturan Gubernur Jawa Barat, *Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat.*

*Eco Industrial Sebagai Konsep Dasar Pengembangan, Master Plan Jambi Agro Industrial Park, p.VI.7.*

Iso 26000 (2010), *Guidance on Social Responsibility.*

*Kabupaten Bekasi dalam Angka.* (2010). Badan Pusat Statistik, Kab. Bekasi.

*Kecamatan Cikarang Selatan Dalam Angka.* (2010). Badan Pusat Statistik, Kab. Bekasi.

*Kecamatan Cikarang Utara Dalam Angka.* (2010). Badan Pusat Statistik, Kab. Bekasi.

Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.

Keputusan Presiden No. 33 tahun 1991 tentang penggunaan tanah bagi kawasan industri

Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011

Laporan Bulanan Situasi dan Kondisi Daerah (Sikonda) Bulan Maret 2011, Pemerintahan Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Utara

Pemda Kab. Bekasi. (2007). *Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2003-2013.* Lampiran Perda No.4 Tahun 2007 ditetapkan tanggal 2 Juli 2007.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

**Universitas Indonesia**

Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2003 *Rencana Tata ruang Wilayah Kab. Bekasi*  
Tahun 2003-2013.

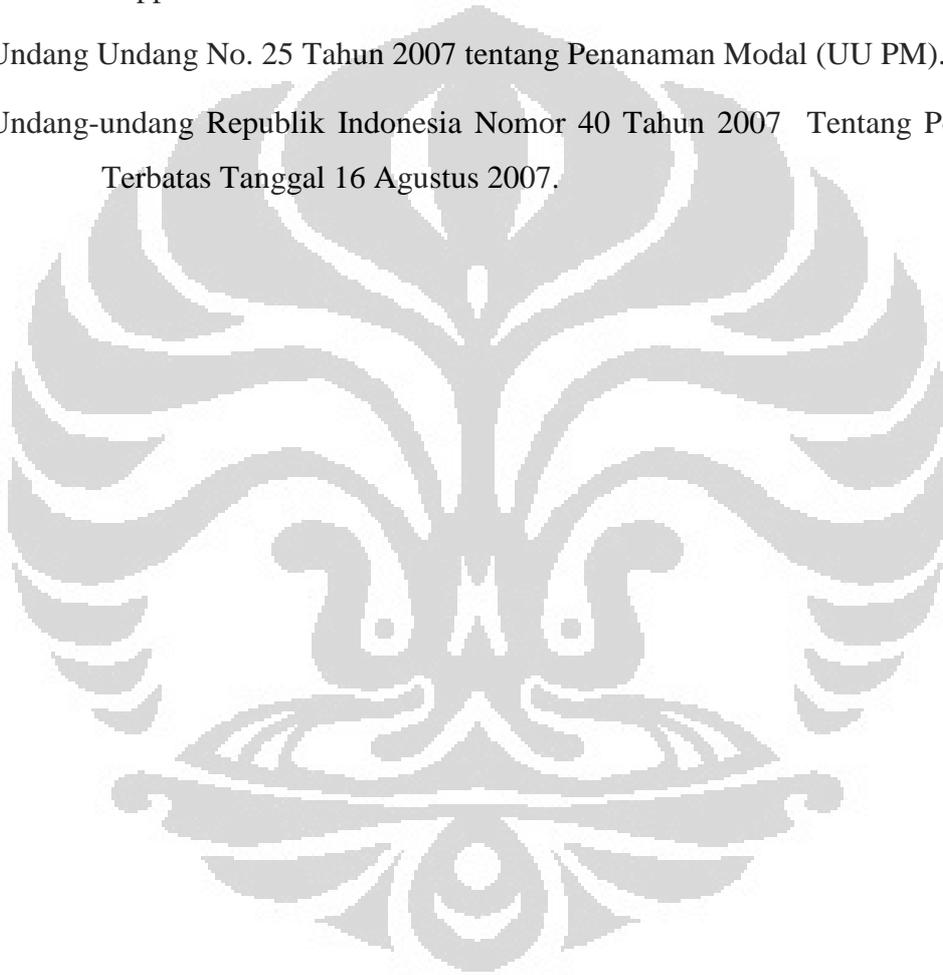
Republika, 13 Oktober 2011.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jakarta :  
Bappenas.

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan  
Terbatas Tanggal 16 Agustus 2007.





UNIVERSITAS INDONESIA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 KAMPUS UI, DEPOK 16424, TELP. (021) 7270006, 7869785, 7872823  
 FAX. : (021) 7872820, 7270007

Nomor : 573/H2.F9.06.PPs/PDP.04.02/2011  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

30 November 2011

Yang terhormat,  
 Bapak Bupati Bekasi  
 cq. Kepala Kantor Kesbang Linmas  
 Kabupaten Bekasi  
 Di  
 Tempat

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, para peserta wajib untuk melakukan penulisan tesis. Sehubungan dengan itu, salah seorang peserta Program kami yaitu :

Nama : Mohamad Azam  
 N P M : 0906655742  
 Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
 Pascasarjana : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
 Judul Tesis : Program *Corporate Social Responsibility* di Kawasan Industri PT. Jababeka, Tbk. Kabupaten Bekasi.

bermaksud mengadakan penelitian, mencari data dan informasi di Instansi Bapak/Ibu. Untuk maksud tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin penelitian bagi mahasiswa kami.

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial  
 Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI  
 Sekretaris,

Dra. Fitriyah, M.Si  
 NIP. 195904081987022001



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-89970065, 021-89970129 Fax. 021 89970064  
**BEKASI**

Cikarang Pusat, 13 Desember 2011

Nomor : 0701/1509/Kesbangpol  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada  
Yth. 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bekasi  
2. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Bekasi  
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Bekasi  
4. Camat Cikarang Utara  
5. Camat Cikarang Selatan  
6. Presiden Direktur PT. Jababeka. Tbk  
7. Ketua LPPM-Jababeka  
8. Ketua Umum Forum Komunikasi Investor Jababeka  
di-

**BEKASI**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor 573/H2.F9.06.PPs/PDP.04.02/2011 tanggal 30 November 2011, perihal mohon izin penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MOHAMAD AZAM**  
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 30-10-1974  
Npm : 0906655742  
Jurusan/Program : Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial/Program Pascasarjana  
Perguruan Tinggi / : Universitas Indonesia  
Universitas  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jl.Puri Citayam Permai 2 Blok D.5 No.11A Rt. 007/022 Desa Rawapanjang Kec.Bojong Gede Kab. Bogor.

Bermaksud akan mengadakan kegiatan penelitian ke Dinas/Instansi yang Bapak pimpin dalam rangka pengumpulan data dan keterangan guna penyusunan tugas akhir Pembuatan Tesis (S-2) dengan Judul "**Program Corporate Sosial Responsibility di Kawasan Industri PT. Jababeka, Tbk. Kabupaten Bekasi**". yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 s/d 26 Desember 2011.

Memperhatikan maksud dan tujuan, apabila situasi dan kondisi memungkinkan mohon kiranya yang bersangkutan untuk dapat diberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian agar maklum atas kerjasamanya kami haturkan terimakasih.

An. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bekasi  
Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Demokrasi



**Drs. H. Maksum Muchbar**

Pembina

NIP. 19580509 198603 1 002

**Tembusan :** disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;

## Taksonomi Penelitian

A.	Proses pelaksanaan Program CSR PT. Jababeka, Tbk. dengan pendekatan Pemberdayaan Ekonomi pada industri rumah tangga pembuatan rengginang dan telur asin	A.1.	Tahap persiapan ( <i>engagement</i> )
		A.2.	Tahap pengkajian ( <i>assessment</i> ),
		A.3.	Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan ( <i>designing</i> ),
		A.4.	Tahap pemformulasian rencana aksi ( <i>designing</i> ),
		A.5.	Tahap pelaksanaan program (implementasi),
		A.6.	Tahap evaluasi
		A.7.	Tahap terminasi.
B.	Peran-peran di dalam program	B.1.	Pendamping sebagai <i>community worker</i>
		B.1.1.	pemercepat perubahan ( <i>enabler</i> ),
		B.1.2.	perantara ( <i>broker</i> ),
		B.1.3.	pendidik ( <i>educator</i> ),
		B.1.4.	tenaga ahli ( <i>expert</i> ),
		B.1.5.	perencana sosial ( <i>social planner</i> ),
		B.1.6.	advokat ( <i>advocate</i> ) dan
		B.1.7.	aktivis ( <i>activist</i> ).
		B.2.	Peran Masyarakat
		B.2.1.	Masyarakat dengan lembaganya menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah mengenai kondisi lingkungannya.
		B.2.2.	Peran asistensi pendampingan.
		B.2.3.	Peran kontrol sosial. Secara individu maupun kolektif, masyarakat melakukan kontrol dalam

			pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaannya melalui mekanisme partisipatori
C.	Hambatan-hambatan di dalam Program	C.1.	Kendala yang berasal dari kepribadian individu
		C.1.1.	Kestabilan (Homeostatis)
		C.1.2.	Kebiasaan (Habit)
		C.1.3.	Hal yang Utama
		C.1.4.	Seleksi Ingatan dan Persepsi (Selective Perception and Retention)
		C.1.5.	Ketergantungan (dependence)
		C.1.6.	Superego
		C.1.7.	Rasa Tidak Percaya Diri (Self-Distrust)
		C.1.8.	Rasa Tidak Aman dan Regresi (Insecurity and Regression)
		C.1.9.	Faktor Predisposisi (Predisposing Factors)
		C.2.	Kendala yang Berasal dari Sistem Sosial atau dari lingkungan
		C.2.1.	Kesepakatan terhadap Norma Tertentu ( <i>Conformity to Norms</i> )
		C.2.2.	Kesatuan dan Kepaduan Sistem dan Budaya ( <i>Systemic and Cultural Coherence</i> )
		C.2.3.	Kelompok Kepentingan (Vested Interests)
		C.2.4.	Hal yang Bersifat Sakral (The Sacrosanct)
		C.2.5.	Penolakan terhadap “Orang Luar” (Rejection of “Outsiders”)
		C.2.6.	Faktor Penguat Perubahan (Reinforcing Factors)
		C.2.7.	Faktor Pemungkin Perubahan (Enabling Factors)

## Pedoman Wawancara

### Daftar Pertanyaan

#### Informan :

#### **Pedoman Wawancara untuk Penerima Manfaat Program**

- Pemahaman program dan kegiatan
- Bagaimana awal mula berkenalan dengan program, bisa diceritakan apa saja yang dilakukan pada waktu itu.
- Pengalaman selama mengikuti kegiatan
- Hasil apa yang dirasakan, apasaja manfaat dan yang ditawarkan program
- Keterlibatan dalam program (Partisipasi)
- Apakah ada orang dari LPPM-Jababeka, atau dari kelurahan yang selalu siap membantu jika Bapak/Ibu mengalami kesulitan, dan bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan mereka (pendampingan)
- Apakah ada kesulitan selama mengikuti program
- Kondisi pada saat ini / setelah program (kemandirian)
- Siapa saja yang terlibat didalam program
- Apa tanggapan / kesan dan harapan / masukan dan saran terhadap program

#### **Pedoman Wawancara untuk Tokoh Masyarakat**

- Pemahaman program dan kegiatan
- Pandangan tentang CSR pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LPPM-Jababeka
- Hasil apa yang di capai
- Apakah program dinilai telah memberdayakan
- Keterlibatan dalam program (Partisipasi)
- Apa tanggapan / kesan dan harapan mereka/ masukan dan saran terhadap program

#### **Pedoman Wawancara untuk Pejabat PT. Jababeka Tbk.**

- Bagaimana design program
- Apa tujuan program
- Bagaimana pembiayaannya
- Apa saja kebijakan perusahaan terkait program
- Bagaimana konsep pemberdayaan dan sustainabel yang diterapkan
- Hubungannya dengan lembaga lain
- Hasil apa yang di capai
- Apa yang dirasakan terhadap program
- Apa tanggapan / kesan dan harapan / terhadap program

#### **Pedoman Wawancara untuk Pelaksana Program, Pejabat/ petugas LPPM-Jababeka**

- Pemahaman program dan kegiatan
- Bagaimana program dirancang
- Metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan
- Apakah tahapan- tahapan pemberdayaan telah dilakukan, bagaimana caranya
- Bagaimana konsep pemberdayaan dan sustainabel yang diterapkan
- Pengalaman selama pelaksanaan kegiatan
- Hasil apa yang di capai hingga saat ini
- Keterlibatan dalam program (Partisipasi)
- Bagaimana pendampingan yang dilakukan selama ini.
- Apa saja kesulitan yang dihadapi

## Karakteristik Informan

No.	Inisial Informan	Jabatan	Karakteristik Informan
1.	SD	Pejabat PT. Jababeka, Tbk	Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 62 tahun, pendidikan D3.
2.	WD	Petugas LPPM- Jababeka	Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 30 tahun, pendidikan S1.
3.	MR	Penerima manfaat pemberdayaan industri rengginang	Jenis Kelamin Perempuan, Umur 46 tahun, pendidikan SD
4.	NS	Penerima manfaat pemberdayaan industri rengginang	Jenis Kelamin Perempuan, Umur 52 tahun, pendidikan Setingkat SD
5.	EN	Penerima manfaat pemberdayaan industri telur asin	Jenis Kelamin Perempuan, Umur 42 tahun, pendidikan SMP
6.	US	Penerima manfaat pemberdayaan industri telur asin	Jenis Kelamin Perempuan, Umur 40 tahun, pendidikan SD
7.	DA	Pejabat LPPM- Jababeka	Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 54 tahun, Pendidikan S1
8.	EC	Tokoh Masyarakat Dusun Sempu, DS. Pasir Gombong	Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 50 tahun, Pendidikan SLTA. Masyarakat Asli Cikarang
9.	AS	Tokoh formal di Kecamatan Cikarang Utara	Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 37 tahun, Pendidikan S1

Sumber : Diolah dari Data Lapangan 2011



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Memberikan Penghargaan

**TERBAIK 3**

Bidang Lingkungan

# Indonesian CSR Awards 08

Sektor: Properti dan Infrastruktur

Judul Program: Jababeka Botanical Garden

Kepada:

**PT JABABEKA INFRASTRUKTUR**

Penilaian dilakukan oleh:

**Komite Ahli Indonesian CSR Awards 2008**

KEPALA Prof. Dr. Ir. Hachsanah, M.S. SEKRETARIS Ir. Baharman Nurmanan,  
ANGGOTA: Dr. Ir. Ayu Ratihah Triandri, M.A., Dr. Ir. Anwar M. Fadhil,  
Dr. Djalal Akbari Suryaningrat, Drs. Edo Sudono, M.PM, Ir. Jafar, M.S.,  
Drs. Nurrah Sunandono, Drs. Eddy Edho Sani, M.Com, M.PM,  
Drs. Sanny Susanto Sukada, M.Sc., Ir. Triandri Dyanaharta, M.E.

Jakarta, 21 Februari 2009

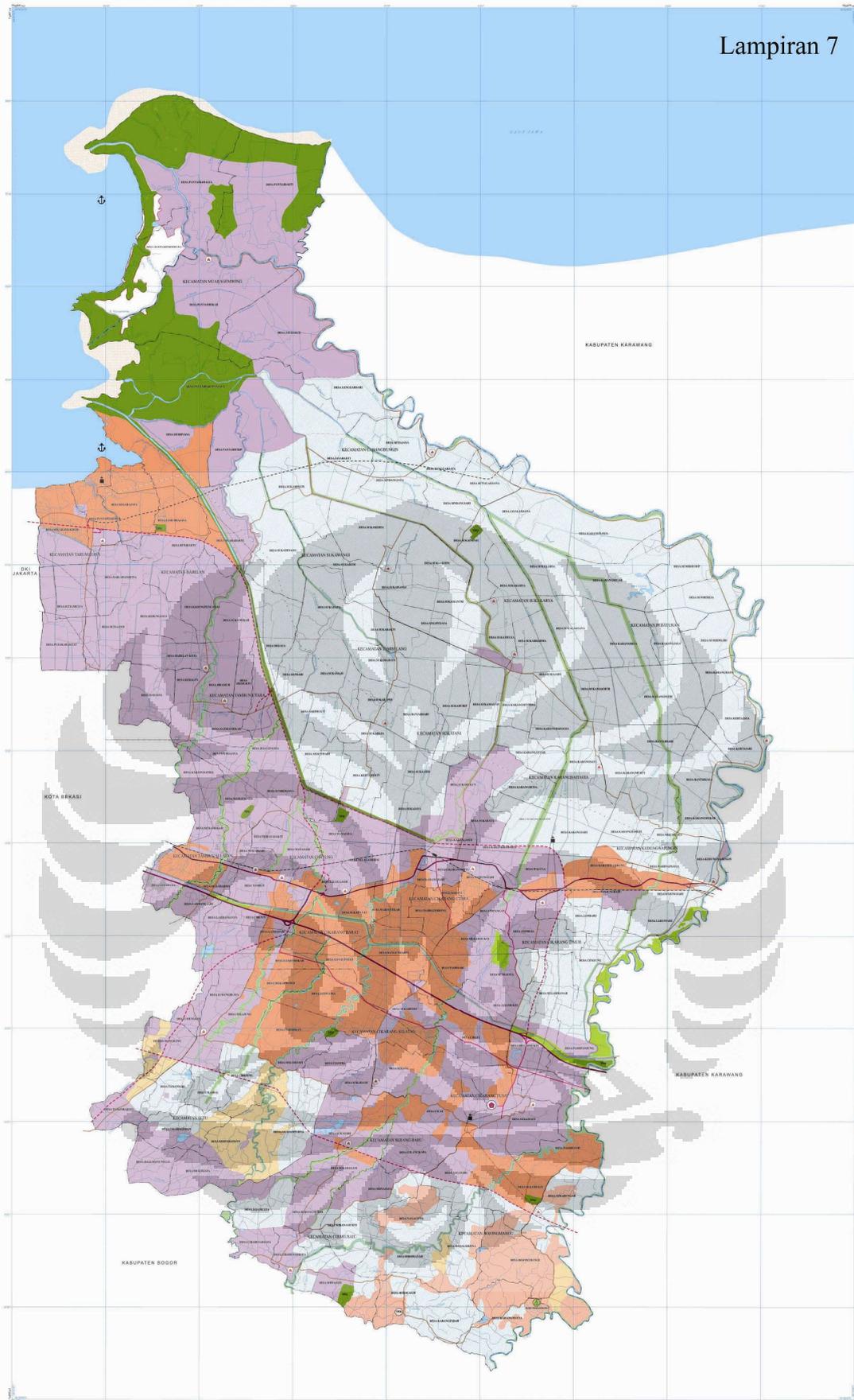
**BACHTIAR CHAMSYAH**

Pemanggilan:



Pelaksanaan:





**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BEKASI  
TAHUN 2003 - 2013**

LAMPIRAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007  
DITETAPKAN DI : BEKASI  
PADA TANGGAL : 2 JULI 2007

BUPATI BEKASI

  
H. SA'UDDIN

LEGENDA :

 Batas Propinsi	 Sungai	 Pertanian Lahan Kering
 Batas Kabupaten	 Rawai / Situ	 Tanaman Tahunan
 Batas Kecamatan	 Endapan Lumpur / Sedimen	 Permukiman
 Batas Desa	 SUTET 500 KV	 Industri
 Jalan Tol	 SUTET 150 KV	 Kawasan Pariwisata
 Jalan Arteri Primer	<b>KAWASAN LINDUNG</b>	 Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
 Jalan Kolektor Primer	 Hutan Lindung	 Bumi Perumahan
 Jalan Lokal Primer	 Sempadan Pantai, Sungai, Situ	 Ibukota Kabupaten
 Jalan Arteri Sekunder	 Jalur Hijau / Hutan Kota	 Ibukota Kecamatan
 Rencana Jalan	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>	 Stasiun Kereta Api
 Jalan Kereta Api	 Pertanian Lahan Basah	 Gardu Induk
 Garis Pantai		 Pelabuhan

**RENCANA POLA PEMANFAATAN LAHAN  
TAHUN 2003 - 2013**

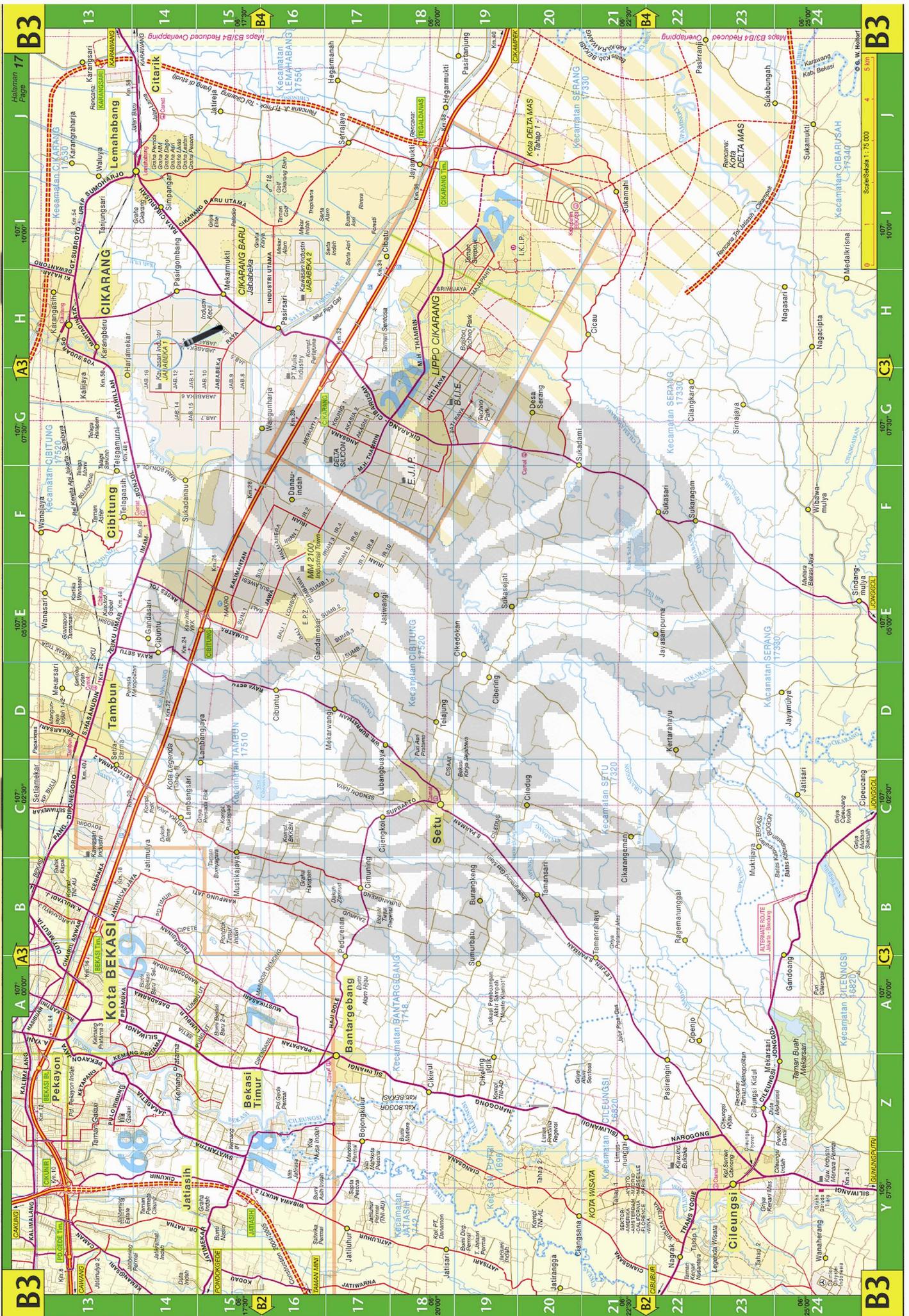
SKALA 1 : 50.000

SUMBER

- Peta Dasar skala 1 : 25.000 BAKOSURTANAL
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 - 2013 : Lampiran Perda No. 4 Tahun 2003
- Peta Citra Satelit Spot 9 Tahun 2004
- PP No. 10/2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Perencanaan Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
PROPINSI JAWA BARAT





*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Program corporate..., Mohamad Azam, FISIP UI, 2012

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232448 – 4233347 4230963 Fax. (022) 4203450  
Bandung – 40115

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI JAWA BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-

6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Jawa Barat.
8. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen Perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat secara umum.
9. Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat.
10. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan di Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah untuk menggalang program tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan dalam rangka optimasi program pembangunan di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan Program Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
- c. terarahnya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggungjawab sosial dan lingkungan di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN FASILITASI

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

##### Pasal 5

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan di Daerah dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan; dan
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mencapai manfaat bersama.

##### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan

##### Pasal 6

Pelaksanaan program pembangunan di Jawa Barat yang dapat dibiayai melalui Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah:

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, serta kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
- c. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan;
- d. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui agribisnis, pengembangan perikanan serta pengembangan dan perlindungan pasar tradisional.

##### Bagian Ketiga

##### Mekanisme dan Prosedur

##### Pasal 7

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh Perusahaan, yaitu :

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program;
- b. penyusunan rencana kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan ;
- c. penandatanganan naskah kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan;

- d. pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan; dan
- e. pendampingan program berupa monitoring dan evaluasi.

## Bagian Keempat

### Kelembagaan

#### Pasal 8

(1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan, dibentuk Tim Fasilitasi dengan struktur organisasi terdiri atas :

- a. Penanggungjawab;
- b. Koordinator;
- c. Wakil Koordinator;
- d. Koordinator Wilayah;
- e. Sekretaris;
- f. Kelompok Kerja I;
- g. Kelompok Kerja II; dan
- h. Kelompok Kerja III.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan di Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Fasilitasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, meliputi:
  1. pemberian informasi kepada OPD untuk mengidentifikasi/inventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Daerah;
  2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan;
  3. pemberitahuan jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan kepada OPD sebelum acara dilakukan, agar OPD melakukan persiapan;
  4. penyiapan peralatan/bahan berupa data/informasi terkini untuk pertemuan;
  5. kompilasi daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra tanggungjawab sosial dan lingkungan di Daerah;
  6. sinergitas antarprogram/kegiatan antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Mitra tanggungjawab sosial dan lingkungan terpilih; dan

7. penandatanganan kerjasama penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
- b. pelaksanaan, meliputi:
  1. verifikasi oleh Tim Fasilitasi untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan yang layak diusulkan kepada calon mitra tanggungjawab sosial dan lingkungan;
  2. pemaparan rancangan rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh Koordinator;

3. menyepakati prioritas program dan kegiatan untuk diajukan melalui Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan; dan
  4. menyepakati Berita Acara Penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan.
- (4) Bagan struktur organisasi Tim Fasilitasi tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Pengendalian

#### Pasal 9

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan, Tim Fasilitasi melakukan pengendalian dan evaluasi kepada Perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

#### Bagian Keenam

#### Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. realisasi pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan;
  - b. realisasi penggunaan Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan;
  - c. capaian kinerja pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan;

- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
- e. rencana tindak lanjut.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan, dibebankan pada Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

##### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

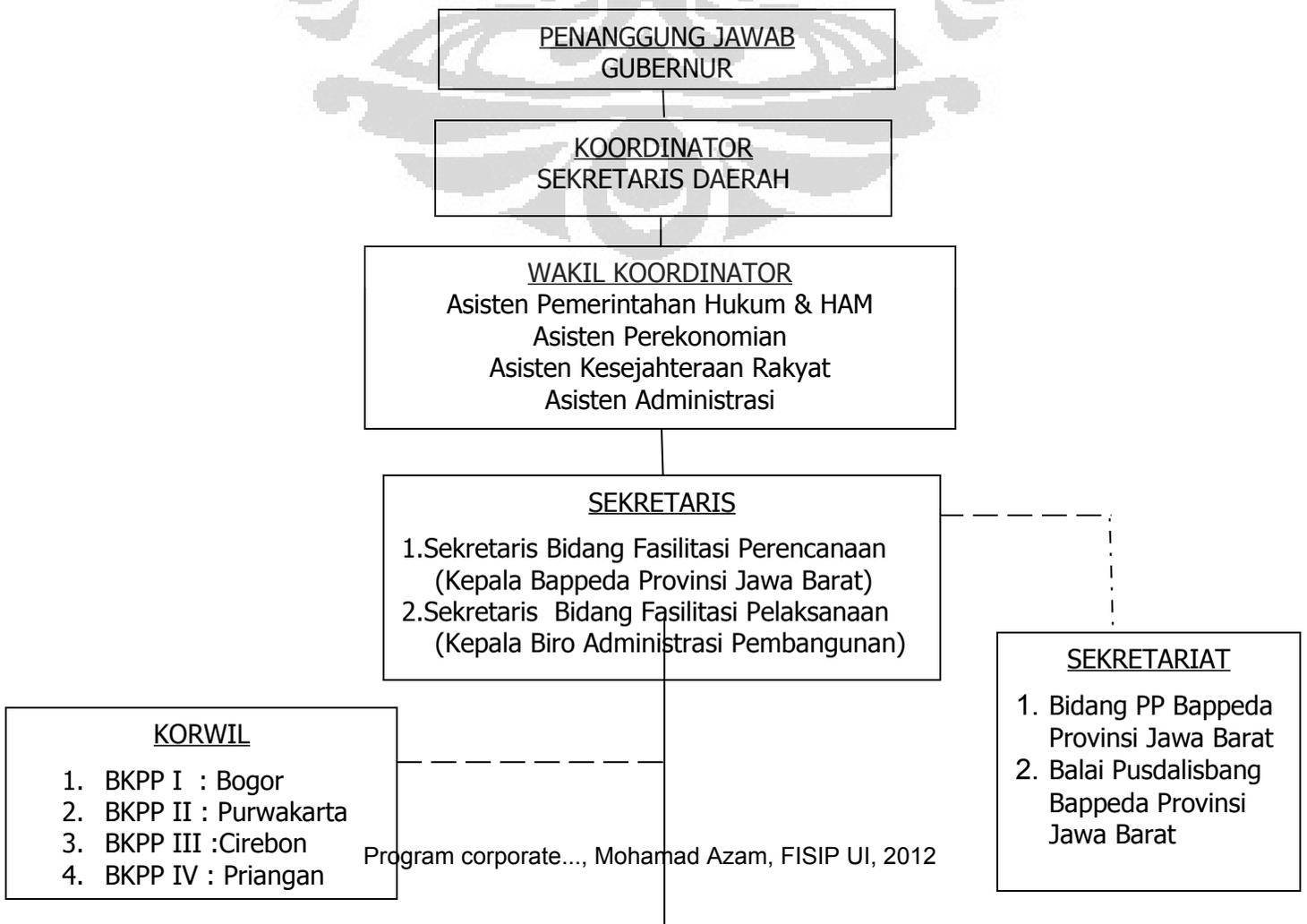
AHMAD HERYAWAN

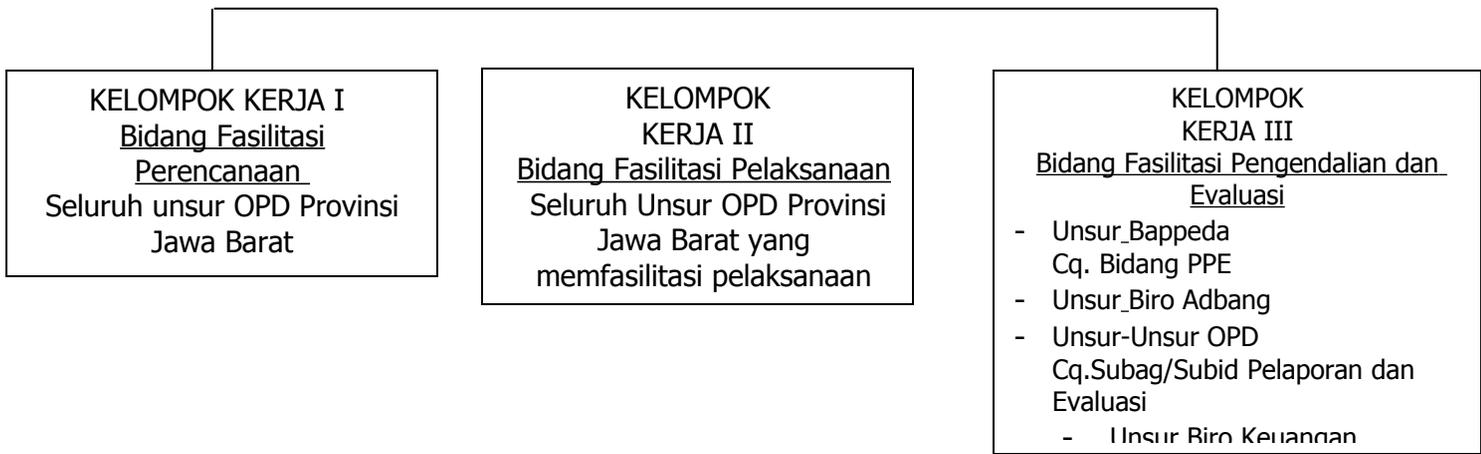
Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : FASILITASI PENYELENGGARAAN  
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI  
 JAWA BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI FASILITATOR





GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

